



**PENGELOLAAN
PENDIDIKAN VOKASI
YANG BERMUTU
PADA SMK
BIDANG KEAHLIAN
KEPARIWISATAAN**

**PENGELOLAAN PENDIDIKAN VOKASI
YANG BERMUTU
PADA SMK BIDANG KEAHLIAN
KEPARIWISATAAN**

**PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

2020

PENGELOLAAN PENDIDIKAN VOKASI YANG BERMUTU PADA SMK BIDANG KEPARIWISATAAN

Penulis:

Dr. Agung Purwadi, M.Eng., B.S. (Kontributor Utama)
Agustina, A.Md.Par., S.Pd. (Kontributor Anggota)
Fadhilah Darma Sulisty, S.Kom. (Kontributor Anggota)
Untung Tri Rahmadi, S.Sos. (Kontributor Anggota)
Asma Aisha, S.Hum. (Kontributor Anggota)

ISBN: 978-602-0792-72-9

Penyunting:

Dr. Daryanto, M.T.
Lisna Sulinar Sari, S.Kom

Tata Letak:

Fadhilah Darma Sulisty

Desain Cover:

Genardi Atmadiredja

Sumber Cover:

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365, faks. +6221-5741664
e-mail: puslitjakdikbud@kemdikbud.go.id
website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>

Cetakan pertama, 2020

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2019. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mendukung dua prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024, yakni di Bidang SDM dan di Bidang Pariwisata.

Penerbitan ini dimaksudkan untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian, termasuk pengembangan, dan perekayasaan kepada para pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Selain itu penerbitan merupakan wujud akuntabilitas publik. Hasil penelitian, pengembangan, atau perekayasaan ini telah disajikan pada berbagai kesempatan sesuai dengan kebutuhannya.

Buku laporan ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para penentu kebijakan dan referensi bagi para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku laporan hasil penelitian ini.

Jakarta, Agustus 2020
plt.Kepala Pusat

Irsyad Zamzani, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Pariwisata merupakan sektor yang diunggulkan sebagai penyumbang devisa terbesar pada tahun 2045. Untuk itu strategi yang digunakan adalah mengundang kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak mungkin. Guna mendatangkan lebih banyak wisman Indonesia harus bersaing atau melakukan *coopetition* dengan negara-negara tetangga yang mampu mendatangkan wisman lebih banyak, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina (WEF, 2017). Dalam rangka itu sekaligus mengoperasionalkan prioritas pembangunan 2020-2024.

Pengembangan SDM melalui SMK secara umum terkendala dan atas dasar itu kegiatan perekayasaan ini ditujukan guna menghasilkan opsi-opsi kebijakan mengatasi kendala peningkatan mutu SMK Pariwisata. Kendala mencolok adalah pada tingkat pengangguran lulusan yang tertinggi diantara satuan-satuan pendidikan lainnya. Pengangguran ditengarai berkaitan dengan perbedaan tingkat penguasaan *skills* lulusan terhadap yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Tingkat penguasaan tersebut dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran yang pada awalnya berhubungan dengan ketersediaan sumber daya pendidikan untuk melaksanakan kurikulum yang ada. Dengan demikian untuk menyusun opsi-opsi tersebut diperlukan informasi mendalam tentang kedua variabel ini.

Besar harapan hasil perekayasaan ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas penyiapan SDM Kepariwisataan melalui SMK. Dalam konteks ini, saya secara pribadi berterima kasih kepada Kapuslitjakdikbud atas kesempatan terakhir mengabdikan pada bidang penyiapan SDM melalui pendidikan vokasi. Selain itu juga mendukungnya dengan pelibatan tim junior yang berpandangan segar karena berasal dari luar pendidikan vokasi dan mengizinkan pelibatan pendidik profesional yang berkiprah secara komprehensif di “tiga dunia” vokasi, yakni pendidikan, asesmen kompetensi SDM, dan pelaku industri. Kepada Sdri. Agustina, SPd., AMd.Par., ucapan terima kasih ditujukan atas berbagai masukan melalui keterlibatannya yang bahkan sejak penyusunan proposal sampai analisis data dan penyusunan laporan ini.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN, TINJAUAN PUSTAKA, DAN METODE	1
A. RASIONAL, MASALAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN LINGKUP PENGKAJIAN, SERTA SASARAN PENGGUNA	1
B. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
C. METODE	12
BAB II KOMPETENSI LULUSAN, KURIKULUM, SUMBERDAYA PENDIDIKAN YANG TERSEDIA, DAN KERJASAMA SMK PARIWISATA DENGAN DUNIA INDUSTRI	17
A. TINGKAT KOMPETENSI LULUSAN	17
B. KURIKULUM DAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN YANG TERSEDIA.....	31
C. KERJASAMA SMK PARIWISATA DENGAN PELAKU INDUSTRI PARIWISATA YANG TENGAH BERLANGSUNG	81
BAB III KOMPETENSI LULUSAN DAN FAKTOR-FAKTOR TERKAIT DENGANNYA, SERTA DUKUNGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PEMBELAJARAN	87
A. KOMPETENSI LULUSAN SMK PARIWISATA.....	87
B. FAKTOR-FAKTOR TERKAIT DENGAN KETERCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN.....	89
C. STATUS KERJASAMA SMK PARIWISATA DENGAN PELAKU INDUSTRI PARIWISATA.....	105
BAB IV OPSI-OPSI KEBIJAKAN PENINGKATAN KOMPETENSI LULUSAN SMK PARIWISATA	115
A. INDIKASI TINGKAT KOMPETENSI LULUSAN DAN FAKTOR-FAKTOR TERKAIT DENGAN CAPAIAN TINGKAT KOMPETENSI TERSEBUT	115
B. OPSI KEBIJAKAN.....	116
DAFTAR PUSTAKA	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peran penting sektor pariwisata dalam penerimaan negara 2045 .	2
Gambar 2. Sepuluh besar daerah tujuan wisatawan keseluruhan dan kunjungan wisatawan mancanegaranya	2
Gambar 3. Visi pembangunan SDM 2020-2024 Pemerintah RI	4
Gambar 4. Perbandingan kedatangan dan penerimaan dari wisman, 2017	5
Gambar 5. Kepariwisata Indonesia dalam perbandingan dengan tetangganya	6
Gambar 6. Prinsip kerjasama: saling memperoleh manfaat.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Prioritas pengembangan kepariwisataan 2019-2020.....	3
Tabel 2.	Contoh Struktur Kurikulum SMK 2013, KK Perhotelan.....	19
Tabel 3.	Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk seluruh mata pelajaran pada Kelompok Mata Pelajaran C3, Kompetensi Keahlian Pariwisata	20
Tabel 4.	Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mapel House Keeping pada KK Pariwisata ditetapkan dalam struktur kurikulum mereka.	21
Tabel 5.	Format Silabus	22
Tabel 6.	Penggeseran waktu pembelajaran mapel produktif akibat adanya pakerin dan 3 ujian akhir.....	79

BAB I

PENDAHULUAN, TINJAUAN PUSTAKA, DAN METODE

A. RASIONAL, MASALAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN LINGKUP PENGAJIAN, SERTA SASARAN PENGGUNA

Rasional pelaksanaan kajian ini berasal dari aspek-aspek dari upaya penelitian dan pengembangan ini. Aspek pertama berasal dari sisi visi pembangunan nasional ketika Indonesia mencapai usia emasnya, yaitu tahun 2045 termasuk visi khusus 2020-2024. Visi Indonesia Emas 2045 a.l. adalah menjadi 5 besar negara dengan perekonomian terkuat dengan sejumlah target a.l. peringkat 5 PDB terbesar di dunia, rasio gini 0,34, percepatan layanan pendidikan yang merata, dan ketenagakerjaan yang tereformasi¹. Untuk menggapai Indonesia emas 2045, terdapat tiga strategi yang digunakan, yakni pembangunan infrastruktur, pengembangan industri pengolahan berbasis bahan mentah, dan pengembangan industri jasa dan disebutkan secara khusus sektor pariwisata². Aspek ke dua adalah kendala yang dihadapi dalam perwujudan misi tersebut.

1. Pendidikan vokasi dalam pengembangan Sektor Pariwisata sebagai unggulan perekonomian nasional 2045

Dari sisi perekonomian nasional, pariwisata merupakan sektor yang diunggulkan sebagai penyumbang devisa terbesar pada tahun 2045³. Untuk mencapainya, pada periode 2015-2019 Sektor Pariwisata dijadikan sektor unggulan nasional, termasuk dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN⁴ (RPJMN 2015-2019). Strategi yang digunakan adalah peningkatan daya saing melalui pembangunan destinasi, industri, kelembagaan, dan pemasaran⁵. Pada periode 2020-2024 sektor ini tetap menjadi sektor unggulan (Gambar 1.). Strategi yang digunakan adalah memasukkan pariwisata dalam Proyek Prioritas Strategis, yang dioperasionalkan a.l. dalam penetapan Destinasi Pariwisata Prioritas yang meliputi 5 destinasi superprioritas dan 4 destinasi prioritas.

¹ *Presiden Jokowi Luncurkan Visi Indonesia 2045*. <https://www.merdeka.com/uang/presiden-jokowi-luncurkan-visi-indonesia-2045.html> Diunggah 9 Mei 2019, diunduh 10 Mei 2019.

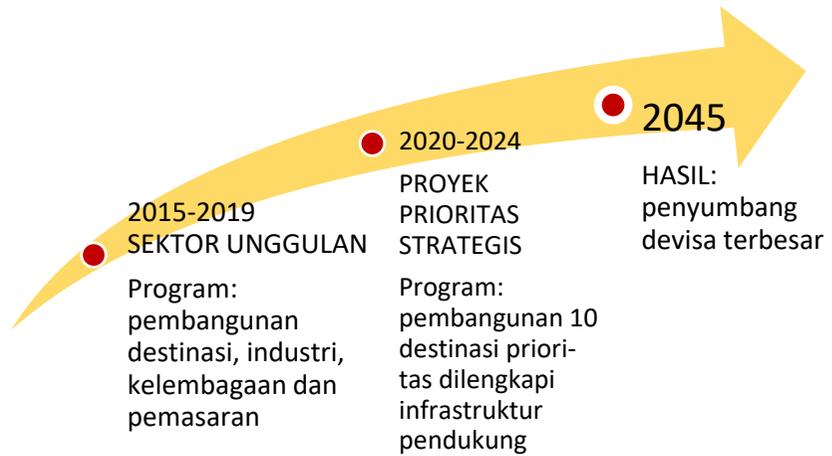
² *Presiden Jokowi Paparkan Tiga Tahapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045* <https://merahputih.com/post/read/presiden-jokowi-paparkan-tiga-tahapan-menuju-visi-indonesia-emas-2045> Diunggah 27 Maret 2017 Diunduh 1 Oktober 2018

³ *Pariwisata Diproyeksikan jadi Penyumbang Devisa Terbesar*. <https://www.antaraneews.com/berita011145300/pariwisata-diproyeksikan-jadi-penyumbang-devisa-terbesar> Diunggah 15 Oktober 2019, diunduh 16 Oktober 2019.

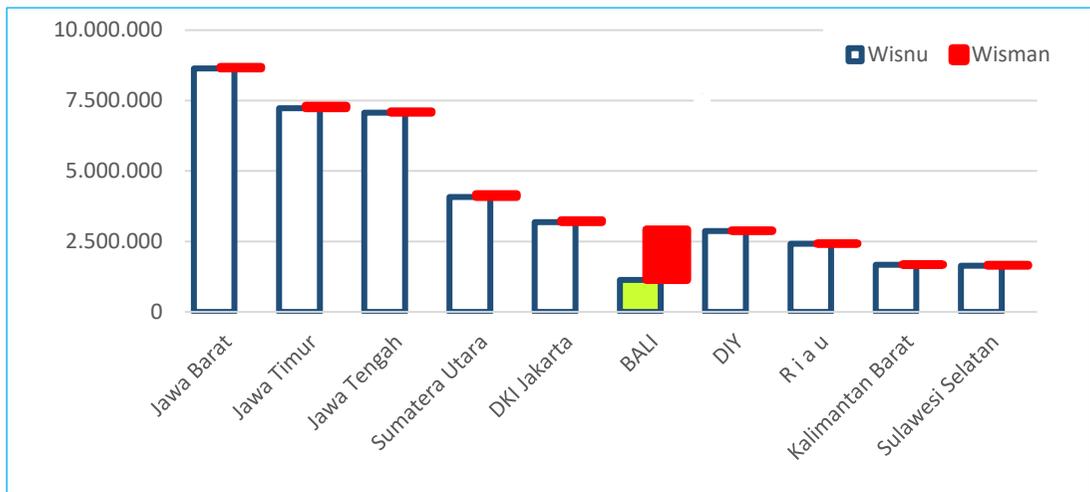
⁴ RPJMN 2015-12019

⁵ Kedeputian Ekonomi Bappenas (2019). *Peningkatan Daya Saing Pariwisata*. Disampaikan dalam Pra-Musrenbangnas, Jakarta, 16-24 April.

Pengembangan destinasi-destinasi tersebut didukung dengan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara⁶.



Gambar 1. Peran penting sektor pariwisata dalam penerimaan negara 2045⁷



Gambar 2. Sepuluh besar daerah tujuan wisatawan keseluruhan dan kunjungan wisatawan mancanegaranya

Indonesia memiliki banyak daerah tujuan (destinasi) wisata (DTW). DTW dengan kedatangan wisatawan terbanyak adalah ke Provinsi Jawa Barat. Hampir 9 juta wisatawan datang ke berbagai DTW di provinsi ini untuk tujuan wisata belanja, wisata alam, wisata kuliner dan lain-lain, pada

⁶ Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Lampiran II.

⁷ Purwadi, A (2019). *Paparan FGD Pengelolaan Pendidikan Vokasi yang Bermutu pada SMK Bidang Keahlian Kepariwisata* di Medan, Samarinda, Manado, Yogyakarta, dan Mataram, 2019

tahun 2017 (Gambar 2). Setelah itu baru disusul oleh 2 provinsi di Jawa lainnya, kemudian Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Bali pada posisi ke enam. Daftar 10 besar provinsi berdasarkan kedatangan wisatawan ditutup oleh Sulawesi Selatan.

Dari sisi penyumbangan devisa, sumbangan ini diindikasikan oleh besarnya penerimaan dari kedatangan wisatawan mancanegara (wisman). Kedatangan wisman terbanyak adalah ke Pulau Bali⁸. Jumlah wisman yang datang ke Pulau Bali banyaknya mencapai 9 kali lipat dibanding daerah tujuan wisata wisman kedua terbesar, yaitu NTB, puluhan kali lipat besarnya dibanding dengan yang datang ke daerah tujuan wisata terkecil dalam daftar 10 besar provinsi yang dikunjungi wisatawan (Gambar 2).

Tabel 1. Prioritas pengembangan kepariwisataan 2019-2020

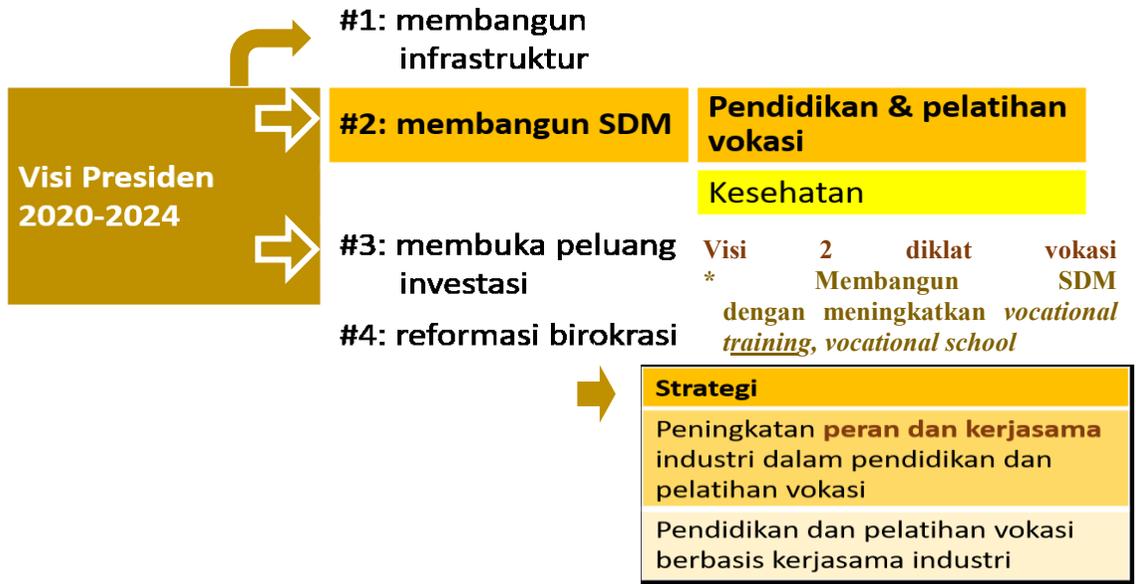
Prioritas pengembangan 2017	Penajaman prioritas, 2019-2020
Danau Toba, Sumut	Danau Toba, Sumut
Tanjung Kelayang, Kep. Babel	Super-prioritas
Tanjung Lesung, Banten	2019-2020
Kepulauan Seribu, DKI Jakarta	Labuan Bajo, NTT
10 Bali baru	
Borobudur, Jateng	Likupang, Sulut
Bromo-Tengger-Semeru, Jatim	Pangandaran, Jabar
Mandalika, NTB	5 unggulan
Labuan Bajo, NTT	2019
Wakatobi, Sultra	Cikidang, Jateng
	Tanjung Gunung, Babel
	Sungailiat, Babel
Morotai, Maluku	

Berkenaan dengan upaya untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar, maka Pemerintah pada tahun 2017 mencanangkan program 10 Bali Baru dengan tujuan agar kedatangan wisman ke daerah-daerah tersebut meningkat dan mendekati jumlah wisman yang datang ke Bali. Selanjutnya program tersebut dipertajam menjadi Super-Prioritas 2019-2020 dan Unggulan 2019, seperti pada Tabel 1.

Destinasi Pariwisata Prioritas tersebut diharapkan dapat meningkatkan devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD dari meningkatnya jumlah wisatawan nusantara sebanyak 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara sejumlah 22,3 juta kunjungan pada tahun 2024.

⁸ BPS (2018). Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara

Selanjutnya dari aspek **visi Presiden 2020-2024**, dinyatakan bahwa salah satu dari keempat visinya adalah: “Membangun SDM dengan meningkatkan *vocational training, vocational school*. Salah satu beberapa **strategi untuk mencapai misi** ini adalah “peningkatan peran dan kerjasama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi” (Gambar 3).



Gambar 3. Visi pembangunan SDM 2020-2024 Pemerintah RI

2. Masalah yang dihadapi kepariwisataan nasional dan masalah kebijakan dalam pemeranan SMK Pariwisata untuk mendukungnya

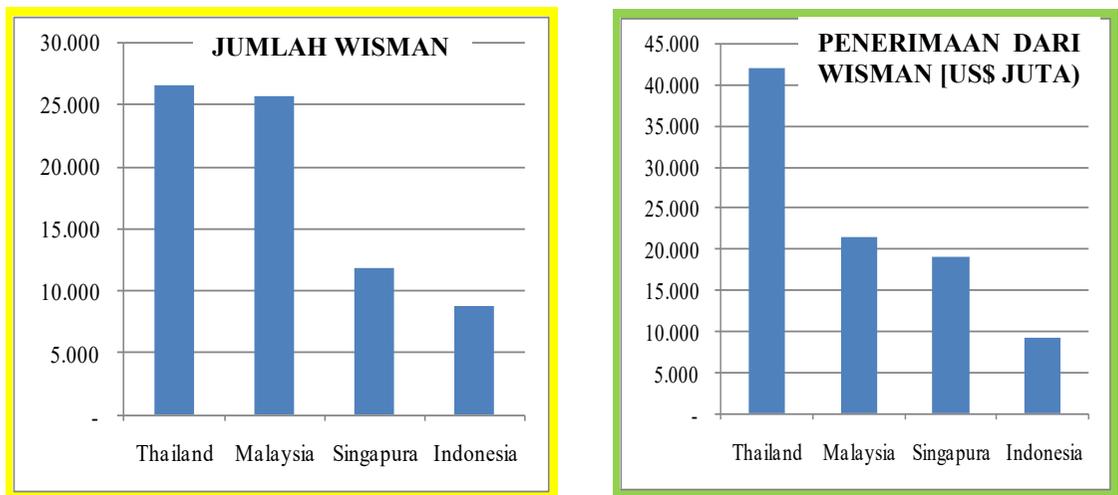
- Masalah pada sektor kepariwisataan nasional dalam menggapai visi ekonomi 2045

Sumbangan devisa yang diharapkan ditunjukkan oleh besarnya penerimaan dari kedatangan wisman. Besarnya penerimaan dari wisman yang datang ke Indonesia saat ini ternyata merupakan yang terendah di antara negara-negara tetangga: Singapura, Malaysia, dan Thailand, demikian juga jumlah kedatangan wismaninya seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.

Tantangan utama yang dihadapi Sektor Pariwisata adalah kekalahan bersaing Indonesia dari ketiga negara tetangganya dalam kompetensi SDM Pariwisata. Mendasarkan pada temuan studi dua-tahunan WEF tentang daya saing perjalanan dan pariwisata tahun 2017, dalam aspek-aspek daya saing pariwisata ditemukan bahwa Indonesia unggul dalam aspek visi Pemerintah dan berbagai hal terkait dengan warisan masa lalu dan nilai tukar uang yang rendah, serta keamanan dan keselamatan dibanding 2 sampai 3 negara tetangganya, namun

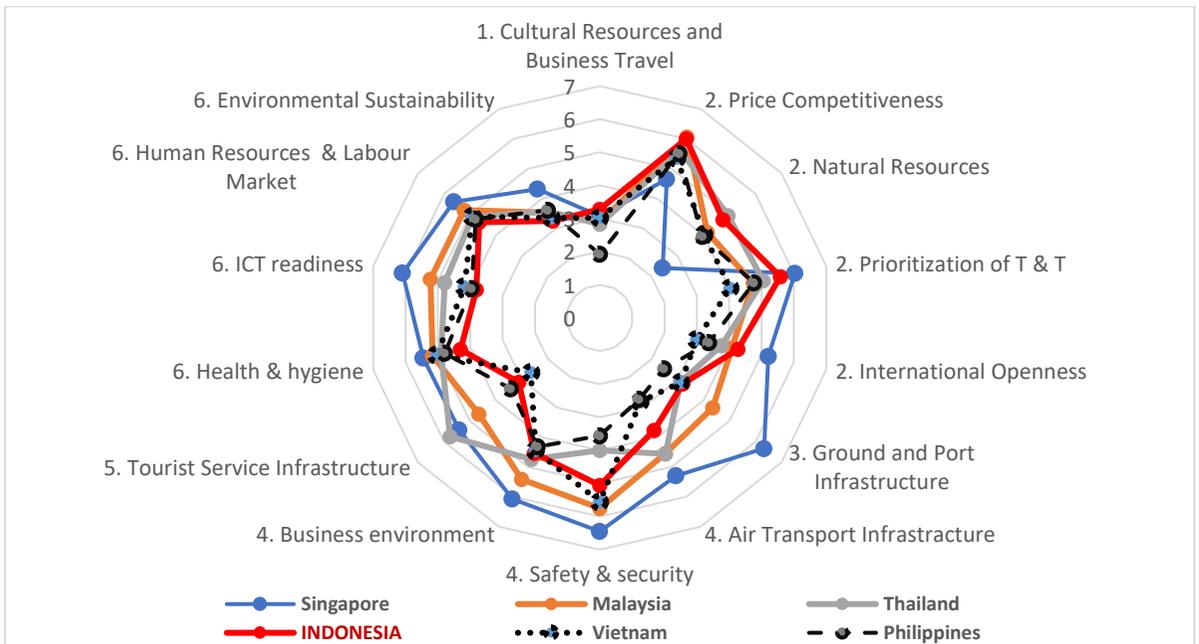
kalah dalam 9 indikator lainnya dari ketiga negara tetangga dalam aspek yang sama, seperti terlihat pada Gambar 5.

Kekalahan persaingan tersebut disebabkan oleh kelemahan SDM pariwisata Indonesia, yang diindikasikan oleh kekalahan daya saing kepariwisataan dalam 9 komponen, yakni kemampuan SDM dan komponen-komponen yang dipengaruhi oleh kemampuan SDM. Kemampuan SDM diwakili oleh komponen SDM dan pasar kerja. Ke-8 komponen yang dipengaruhi oleh komponen kemampuan SDM adalah lingkungan bisnis, kesehatan dan kebersihan, kesiapan TIK, keterbukaan internasional, keberlanjutan lingkungan, infrastruktur perhubungan udara, infrastruktur perhubungan darat dan pelabuhan, dan infrastruktur layanan wisatawan.



Gambar 4. Perbandingan kedatangan dan penerimaan dari wisman, 2017⁹

⁹ WEF (2017). *Travel and Tourism Competitiveness Report 2017*. Geneva: World Economic Forum.



Gambar 5. Keperawatan Indonesia dalam perbandingan dengan tetangganya¹⁰

b. Penyiapan SDM Pariwisata di Indonesia dan karakteristik pengelolaannya

SDM Pariwisata utamanya disiapkan melalui dua jenjang pendidikan, yakni pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Penyiapan SDM pada jenjang pendidikan menengah dilaksanakan oleh SMK Pariwisata. Penyiapan SDM pada jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan melalui berbagai bentuk, seperti sekolah tinggi, politeknik, dan universitas.

Dari sisi pengelolaan, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi pariwisata berbeda pengelolanya. SMK Pariwisata merupakan layanan pendidikan yang dikelola secara mandiri oleh kementerian pembina sektor pendidikan, yakni Kemdikbud. Di sisi lain, pendidikan tinggi pariwisata ada yang dikelola oleh kementerian pembina sektor kepariwisataan (Kemenpar) dan ada yang dikelola oleh organisasi pelaku industri pariwisata. Pendidikan tinggi pariwisata yang dikelola oleh pembina sektor pariwisata ada yang berbentuk sekolah tinggi (misalnya Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali)¹¹, dan ada pula politeknik (misalnya Poltekpar Makassar).

¹⁰ WEF, 2017, Op. cit

¹¹ Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali. www.campus.quipper.com/sekolah-tinggi diunduh 9 Agustus 2019

Selanjutnya pendidikan tinggi pariwisata yang dikelola oleh organisasi pelaku industri pariwisata dicontohkan oleh *Sahid Group* yang membina Akademi Pariwisata Sahid¹², *Salak Hospitality* yang membina sejumlah hotel dan apartemen dan STP Bogor (*Bogor Hotel Institute*)¹³.

Esensi dari pembedaan pembinaan ini adalah kerjasama antara lembaga pendidikan vokasi dan industri yang dilayani penyiapan SDM-nya. Kerjasama yang dimaksud di sini intinya adalah pada aspek *quality assurance* dan penempatan lulusan. Kerjasama harus dilaksanakan sejak persiapan, pengelolaan masukan instrumental dan pelaksanaan KBM, evaluasi kompetensi yang menentukan kelulusan, dan penempatan lulusan. Tidak dapat dibayangkan kompetensi lulusan yang dihasilkan apabila penyiapan SDM pariwisata dilaksanakan secara mandiri oleh lembaga pendidikan vokasi tanpa kerjasama dengan pelaku industri calon pemakai lulusan yang dihasilkannya.

Bagi lembaga pendidikan vokasi pariwisata yang dibina oleh pelaku industri, seperti Akademi Pariwisata Sahid dan STP Bogor, kerjasama antara lembaga pendidikan vokasi pariwisata dan pelaku industri pariwisata adalah hal yang natural. Bagi lembaga pendidikan vokasi yang dibina oleh pembina sektor pariwisata, kerjasama antara STP dan Poltekpar di bawah Kemenpar dengan pelaku industri pariwisata dikontrol langsung oleh Kemenpar selaku pembina sektor. Bagi lembaga pendidikan vokasi yang dibina oleh Kemdikbud, kerjasama SMK Pariwisata dengan pelaku industri pariwisata merupakan hal yang masih harus diusahakan, mengingat kerjasama adalah hubungan yang bersifat *win-win*, saling memberi dan menerima. Secara lebih terinci faktor-faktor terkait kerjasama ini akan dibahas pada kajian literatur.

c. SMK Pariwisata

SMK memberikan berbagai layanan penyiapan SDM untuk seluruh sektor, dari pariwisata sampai penerbangan. Pemberian layanan oleh SMK dikelompokkan menjadi 9 bidang keahlian, yang masing-masing dirinci menjadi beberapa program keahlian (PK), dan selanjutnya unit terkecil, yang di masa lalu disebut jurusan dalam terminologi kekinian adalah kompetensi keahlian, yang jumlahnya berubah secara dinamis dan saat ini secara keseluruhan SMK

¹² STP Sahid Surakarta. www.stpsahidsolo.ac.id diunduh 9 Agustus 2019

¹³ BHI Hospitality School. www.bhi.ac.id diunduh 9 Agustus 2019

memberikan layanan dalam 146 kompetensi keahlian (KK). Ke-146 KK ini secara nasional pembelajarannya dikelola oleh satu direktorat.

Individu SMK dapat memberikan layanan untuk lebih dari satu sektor ekonomi, misalnya sektor pariwisata dan sektor teknologi-informasi, sehingga satu SMK dapat saja menyelenggarakan 4 KK Bidang Pariwisata dan 1 KK Bidang Bisnis dan Manajemen. SMK penyelenggara Bidang Keahlian Pariwisata dalam kajian ini untuk selanjutnya disebut SMK Pariwisata.

Bidang Keahlian Pariwisata terdiri dari 4 program keahlian dan pada tataran yang paling terinci menjadi 9 KK dengan lama pembelajaran 3 atau 4 tahun. Ke-4 program keahlian (PK) tersebut adalah Perhotelan dan Jasa Wisata, Kuliner, Tata Kecantikan, dan Tata Busana. KK pada PK pertama adalah Perhotelan 3 tahun, dan Usaha Perjalanan Wisata 3 tahun, Wisata Bahari 4 tahun, serta Perhotelan dan Restoran 4 tahun. KK pada PK ke dua adalah Tata Boga 3 tahun. KK pada PK ke tiga adalah Tata Kecantikan Kulit dan Rambut 3 tahun serta Spa dan *Beauty Therapy* 4 tahun, serta pada PK ke empat adalah Tata Busana 3 tahun dan Desain Feisyen 4 tahun.

3. Tujuan, lingkup kajian, dan sasaran pengguna

Salah satu fungsi utama SMK adalah untuk menyiapkan lulusannya untuk bekerja, namun kenyataannya tingkat pengangguran lulusan SMK justru merupakan yang tertinggi di antara seluruh satuan pendidikan yang ada. Salah satu kemungkinan penyebab tingginya tingkat pengangguran ini adalah kurangnya kompetensi lulusan SMK. Kompetensi yang tidak memadai lulusan SMK Pariwisata ini terjadi karena masalah klasik pendidikan vokasi, yang juga terjadi di SMK Pariwisata, yang salah satunya adalah kekurangan sumberdaya utama pendidikan vokasi, yakni instruktur kompeten berpengalaman industri, fasilitas praktik, dan biaya operasional.

Berkenaan dengan itu tujuan pengkajian ini adalah menggali kemungkinan pemenuhan kebutuhan sumberdaya utama SMK Pariwisata ini melalui kerjasama atau gotong royong dengan para pemangku kepentingan sekolah, yakni pemda, orang tua, dan pelaku industri pariwisata. Dalam kaitan itu, Presiden menyampaikan perlunya kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, sedangkan Mendikbud secara lebih operasional menyatakan perlunya gotong royong dari berbagai pihak terkait. Strategi gotong royong ini dipilih bukan karena alasan birokratis, melainkan karena tiga alasan logis. Pertama, tidak mungkin Kemdikbud

sendirian membiayai seluruh kebutuhan sumber daya dari 14.064 SMK negeri dan swasta dengan 5.009.300 siswanya (BPS, 2019). Ke dua, perubahan cepat industri pariwisata menjadikan cepat-kadaluwarsanya teknologi yang digunakan dan wawasan pendidik di sekolah, misalnya pemanfaatan TIK dalam pembelian tiket perjalanan dan pemesanan hotel menuntut perubahan cepat pada materi dan metode pembelajaran pada KK Usaha Perjalanan Wisata, sehingga tanpa prinsip gotong royong diperkirakan kesenjangan sekolah-industri melebar. Ke tiga, periode perpindahan dari siswa di dunia pendidikan menjadi pekerja di dunia kerja, atau yang lazim diistilahkan *transition from school to work*, yang menjadi salah satu masalah utama pendidikan vokasi akan semakin parah karena harapan dunia kerja akan kompetensi minimal yang perlu dimiliki pencari kerja tidak dapat dipenuhi.

Kajian ini dibatasi pada SMK Pariwisata 3 tahun. Terdapat dua alasan yang digunakan untuk menetapkan batasan ini. Alasan pertama adalah adanya kerancuan antara SMK 4 tahun dan Program Diploma I. Alasan ke dua, adalah perbedaan level keahlian pada KKNI, lulusan SMK menduduki Level 2 dan Diploma I menduduki Level 3, apakah lulusan SMK 4 tahun diakui menduduki Level 3? Alasan ke tiga adalah ketidaksepakatan pelaku industri yang dilayani oleh sejumlah KK, misalnya KK Desain dan Feisyeen, seperti butik, tentang waktu 4 tahun yang harus dihabiskan untuk sekedar menguasai keterampilan yang dikuasai oleh lulusan KK ini dan ini dipandang terlalu lama.

Sasaran pengguna hasil kajian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, instansi eksternal Kemdikbud di tingkat nasional, yakni DPR (Komisi X), Bappenas (Kedeputian SDM dan Agama, Kedeputian Ketenagakerjaan), Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan Kemenpar serta asosiasi-asosiasi industri dan profesi pariwisata di tingkat nasional (DPP). Ke dua, dinas/instansi di daerah yakni Bappeda Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, serta BPD asosiasi industri dan asosiasi profesi kepariwisataan. Ke tiga, instansi internal Kemdikbud, yakni Biro Perencanaan dan KLN, Ditjen Dikdasmen, dan Ditjen GTK.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Terapat dua landasan utama yang membangun kerangka kerjasama penelitian dan pengembangan pemenuhan sumberdaya utama SMK Pariwisata ini. Keduanya adalah teori kerjasama dan teori jenis pelatihan.

Landasan kerjasama antara dua pihak atau lebih adalah adanya manfaat yang diperoleh dari melaksanakan kerjasama. Kerjasama antar-organisasi sebenarnya memiliki beberapa aspek, namun salah satu diantaranya yang langsung berkaitan dengan kegiatan ini adalah aspek koordinasi dan pengontrolan sumber daya¹⁴. Teori-teori yang mendasari koordinasi dan pengontrolan sumber daya adalah Teori Biaya Transaksi¹⁵ Teori Keagenan¹⁶, dan Teori Ketergantungan Sumberdaya¹⁷. Ketiga teori tersebut bertitik tolak dari asumsi-asumsi antropologi yang sama, yakni, pertama, sifat manusia terbentuk berdasarkan kemanfaatan yang diperoleh masing-masing pihak (*opportunism*). Ke dua, kerjasama harus dikordinasikan dan dikontrol secara ketat agar asas kemanfaatan yang dilakukan oleh mitra-kerjasama tidak merugikan karena kesempatan justru terambil oleh mitra kerjasama atau pihak lain yang tidak ikut bekerjasama.



Gambar 6. Prinsip kerjasama: saling memperoleh manfaat

¹⁴ Rossignoli, C., ed. (2015). Agency Theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives dalam *Indian Journal of Corporate Governance*, Vol. 10 Issue 1, 2017.

¹⁵ Williamson, OE. (2007). Transaction Cost Economics: An Introduction. Dalam *Jurnal Economic Discussion Paper 2007-3*, 1 Maret

¹⁶ Panda, B & Leepsa, M (2017). Agency Theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives dalam *Indian Journal of Corporate Governance*, Vol. 10 Issue 1, 2017.

¹⁷ Delke, V. (2015). *The Resource Dependence Theory: Assessment and Evaluation as a Contributing Theory for Supply Management*. Bachelor degree thesis. University of Twente, the Netherland.

Training atau pendidikan dan pelatihan vokasi menurut jenisnya terdiri dari *specific training* dan *general training*^{18,19}. *General training* adalah pendidikan dan pelatihan vokasi yang manfaatnya, berupa lulusan yang kompeten, dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, perusahaan mana saja. Sebaliknya, *specific training* adalah pendidikan dan pelatihan vokasi yang manfaatnya, berupa lulusan yang kompeten, hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu saja, tidak sembarang perusahaan dapat memanfaatkannya.

Dengan demikian kerjasama pemenuhan sumber daya SMK Pariwisata dengan para pemangku kepentingan tergantung dari dihasilkannya lulusan berkompeten di bidang pariwisata itu dinikmati oleh siapa, oleh pihak mana? Keberadaan lulusan SMK Pariwisata yang berkompeten, yang pengadaan ketiga input utamanya berasal dari kerjasama dengan Hotel A, Biro Perjalanan B, Perusahaan Kuliner C, Perusahaan Garmen D, Salon E hanya akan bermanfaat bagi perusahaan A,B,C, D, dan E? Pasti tidak. Lulusan SMK Pariwisata dibekali dengan kompetensi yang dapat dimanfaatkan di industri pariwisata mana saja sesuai dengan kompetensi keahliannya, bukan secara khusus hanya dapat digunakan di industri pariwisata tertentu. Berdasarkan itu kerjasama dengan pelaku industri pariwisata semestinya dilakukan dengan asosiasi, bukan dengan individu, pelaku industri pariwisata. Asosiasi pelaku industri meliputi asosiasi industri dan asosiasi profesi.

Kerjasama pemenuhan sumber daya SMK pariwisata dengan pemprov dan orang tua memiliki sudut pandang tersendiri. Pemprov adalah penanggung jawab operasional penyelenggaraan SMK sedangkan Pemerintah hanya memiliki kewenangan penetapan standar dan norma, walaupun kenyataannya Pemerintah melalui Dit. PSMK masih mengirim berbagai jenis *block grant* ke SMK dengan kriteria yang ditentukan oleh pengirim dana. Seharusnya dukungan pemprov kepada penyelenggaraan SMK Pariwisata (dan semua satuan pendidikan menengah lainnya) tidak dalam konteks kerjasama. Inpres 9/2016 nampaknya belum menjadikan semua pemprov menyediakan dukungan sumberdaya bagi penyelenggaraan SMK Pariwisata. Apabila pemberian dukungan kepada SMK Pariwisata didasari pada peran penyiapan SDM pariwisata terhadap perekonomian daerah, apakah memang provinsi-provinsi pemilik daerah tujuan wisata (DTW) berskala nasional sudah memberikan dukungan itu? Adakah kekhawatiran provinsi bukan-DTW akan aliran lulusan SMK Pariwisata daerahnya (*brain-drain*) ke provinsi DTW?

¹⁸ Loewenstein, M, & Speltzer, J (1999). General and Specidic Training: Evidence and Implications. *The Journal of Human Resources*, 34 (4), 710-733. Doi: 10.2307/146414

¹⁹ Acemoglu, D (2011). *Labor Economics*, 14.661. *Lectures 9 and 10: Investments in General and Specific Skills*. MIT. Nov. 29 and Dec 1.

Kerjasama pemenuhan sumber daya SMK pariwisata dengan orang tua memiliki sudut yang lain. Peraturan perundangan menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua juga, tidak hanya Pemerintah dan pemda. Oleh sebab itu menjadi *absurd* ketika orangtua dibatasi keikutsertaannya dengan larangan pungutan kepada orang tua yang kemudian sumbanganpun diartikan sebagai pungutan terselubung?

C. METODE

Penelitian dan pengembangan kerjasama penyelenggaraan SMK Pariwisata bermutu ini dilaksanakan dengan pendekatan studi kasus yang diwarnai oleh kebijakan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Strategi pengembangan yang dipilih adalah pengembangan konsep, verifikasi dan validasi (verval) lapangan terhadap konsep, dan penyusunan opsi kebijakan yang bersifat operasional.

Pengembangan konsep dilakukan dengan mengandalkan data sekunder dan diskusi dengan perwakilan pelaku industri pariwisata, pengelola nasional industri pariwisata dan ekonomi kreatif, pakar riset, dan pendidik profesional dari sejumlah SMK Pariwisata di Jakarta. Pelaku industri pariwisata dikelompokkan menjadi dua yakni asosiasi industri dan asosiasi profesi. Asosiasi industri diwakili oleh DPP Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) dan DPP Asosiasi Industri Kecantikan Tiara Kusuma. Asosiasi profesi diwakili oleh DPP Indonesia Hotel General Manager Assosiasion (IHGMA) dan BPD IHGMA Jakarta. Pengelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif diwakili oleh Asdep Pengembangan SDM Kepariwisata, Kemenpar (sekaligus sebagai Nara Sumber Utama kajian ini), dan Kasubdit Informasi dan Pengolahan Data Bekraf. Sebagai pakar riset nasional adalah Sekretaris Dewan Riset Nasional. Pendidik pariwisata profesional diwakili oleh Ketua Asosiasi SMK Pariwisata se Indonesia dan beberapa guru mapel produktif berkompentensi tinggi²⁰ dari sejumlah SMK negeri di Jakarta.

Verval terhadap konsep yang dikembangkan dilaksanakan di 5 daerah. Penetapan jumlah daerah ditentukan oleh penyandang dana. Penetapan ke-5 daerah tersebut dilakukan secara bertujuan, sehingga statusnya adalah staudi

²⁰ Mereka adalah lulusan program penyiapan guru Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP, sekarang SMK Bidang Keahlian Pariwisata) yang dilaksanakan oleh Dit. Dikmenjur dengan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali di bawah Kemenpar dan STKIP Singaraja (sekarang Universitas Pendidikan Ganesha) yang berlangsung selama enam angkatan. Selain itu juga lulusan program beasiswa guru mapel produktif Dit. Dikmenjur bekerjasama dengan STP Trisakti Jakarta.

kasus di 5 lokus. Penetapan lokusnya dilaksanakan dengan mempertimbangan 3 aspek, yakni kecenderungan kedatangan wisman 5 tahun terakhir, keterwakilan wilayah secara geografis, dan status pembangunan pariwisata. Berdasarkan status pembangunan pariwisata, provinsi-provinsi dikelompokkan menjadi 3, yakni super-prioritas, unggulan, dan provinsi bukan-prioritas dan bukan-unggulan pembangunan pariwisata.

Provinsi yang kecenderungan kedatangan wismanya meningkat sekaligus berstatus super-prioritas atau unggulan dalam pengembangan pariwisata adalah: Sumut, DIY, NTB, dan Sulut. Di sisi lain, provinsi yang menurun kedatangan wismanya dan sekaligus bukan daerah prioritas dan juga bukan unggulan adalah Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur menjadi perwakilan provinsi yang ingin mengubah perekonomiannya dari berbasis SDA menjadi berbasis pariwisata terutama wisata alam dan wisata budaya.

Mengoptimalkan dana verval yang terbatas 3 hari, termasuk perjalanan, verval dilaksanakan dengan minimal 2 FGD di masing-masing lokasi, yakni kelompok eksekutif dan pendidik profesional. FGD kelompok eksekutif utamanya diikuti oleh ketua BP/DPD asosiasi profesi dan asosiasi industri ditambah perwakilan disdikprov dan disparprov atau disbudparprov. FGD kelompok pendidik profesional diikuti oleh perwakilan guru mapel produktif profesional yang merupakan alumni dari lembaga pendidikan pariwisata ternama. Sedangkan FGD ke 3 dilaksanakan di provinsi unggulan pariwisata yang masing-masing mewakili kawasan barat, Jawa, dan Timur, yaitu Sumut, DIY, dan NTB. DIY dipilih untuk mengadakan FGD dengan sejumlah wirausahawan kreatif unggulan Bekraf yang berlokasi di dalam kota, sedangkan Sumut dan NTB dipilih untuk mengadakan FGD siswa.

Pengolahan dan analisis data hasil verval dilakukan dengan prinsip-prinsip pengolahan dan analisis data kualitatif. Strategi yang digunakan adalah mereduksi set data besar untuk mengurangi kerumitannya, bukannya menambah bahan dengan mengembangkan lebih dari satu interpretasi terhadap data yang sama²¹. Untuk itu digunakan 2 metode sekaligus, yakni metode 3 langkah dan 4 langkah sebagai berikut.

Pada metode 3 langkah, secara berurutan dilakukan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data tujuan utamanya adalah mencari pola dari data yang dikumpulkan, karena pola inilah yang nantinya dapat dianalisis. Reduksi dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal

²¹ Flick, Uwe (2014). *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. Los Angeles: SAGE

yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Penyajian ditujukan untuk menyusun kelompok-kelompok untuk mempermudah analisis yang selanjutnya digunakan baik untuk menyusun simpulan²². Sedangkan pada metode 4 langkah, secara berurutan dilakukan pemahaman data, membuat kode tentang tema-tema yang ditemukan, mencari pola-pola dan hubungan-hubungan yang ada, dan mengembangkan tafsiran-tafsiran²³.

Selanjutnya untuk meningkatkan obyektivitas informasi yang dihasilkan dilaksanakan triangulasi data dari berbagai sumber data yang ada untuk mengintegrasikan berbagai pandangan yang ditemukan^{24,25,26,27,28}. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni hasil FGD-FGD pra-verval, hasil FGD-FGD ketika verval, dan hasil FGD-FGD pasca-verval. FGD ketika verval meliputi FGD eksekutif pariwisata di 5 lokasi, FGD pendidik mapel produktif pariwisata profesional di 5 lokasi, FGD siswa di 2 lokasi, dan FGD wirausahawan di 1 lokasi.

Dengan menggabungkan kedua langkah tersebut, analisis yang dilengkapi dengan triangulasi data dilakukan untuk menemukan sejumlah informasi strategis berikut.

- Informasi pertama, tingkat kompetensi lulusan, baik sebagai pekerja maupun pencipta pekerjaan. Ini dilakukan dengan menggunakan pendapat perwakilan asosiasi pelaku industri pariwisata dan indikasi tingkat kompetensi menurut guru mapel produktif.
- Informasi ke dua, kualitas pembelajaran. Informasi ini diperoleh dengan menggunakan pendapat guru mapel produktif, siswa, dan alumni yang sudah bekerja.

Analisis lanjutan dari kedua informasi ini menghasilkan tentang hubungan kualitas pembelajaran dengan kompetensi lulusan.

²² Miles, Matthew B dan Huberman, Michael A (Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Second Ed. Thousand Oaks, CA: Sage publications, 1994

²³ *Qualitative Data Analysis and Methods*. <http://www.intellspot.com/qualitative-data-analysis-methods/> Diunduh 10 September 2018

²⁴ Op.cit Flick, Uwe (2014).

²⁵ The Use of Triangulation in Qualitative Research. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25158659/> Diunduh 10 September 2018

²⁶ Patton, Michael Q (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Los Angeles: SAGE.

²⁷ Triangulation. <http://www.qualres.org/HomeTria-3692.html> Diunduh 10 September 2018

²⁸ Triangulation in Qualitative Research. <https://www.quirkos.com/learn-qualitative/step-by-step-instructions.html>. Diunduh 10 September 2018

- Informasi ke tiga, kekurangan sumberdaya, yang meliputi (i) beban kerja dan faktor terkait dengannya serta pelaksanaan pembelajaran oleh GMP dan tingkat keterlaksanaannya, (ii) kekurangan dalam penyiapan kompetensi melalui praktik kejuruan baik di sekolah maupun di industri melalui prakerin, dan (iii) kekurangan biaya operasional pelaksanaan praktik kejuruan.
- Informasi ke empat, ketersediaan sumber daya pelaksanaan pembelajaran di industri pariwisata dan di keluarga siswa serta strategi dan prasyarat pemanfaatannya.

Analisis lanjutan dari informasi ke dua dan ke tiga akan menghasilkan informasi lanjutan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Sementara itu analisis lanjutan dari informasi ke tiga dan ke empat menghasilkan informasi lanjutan tentang kemungkinan pemanfaatan sumber daya industri pariwisata dan keluarga dalam rangka mencukupi kebutuhan sumber daya pendidikan kejuruan di sekolah serta prasyarat pemanfaatannya.

Terakhir, dari hasil-hasil analisis lanjutan dikembangkan opsi kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran di SMK Pariwisata. Dengan peningkatan kualitas pembelajaran diharapkan kompetensi lulusannya menjadi sesuai dengan harapan sektor pariwisata

BAB II

KOMPETENSI LULUSAN, KURIKULUM, SUMBERDAYA PENDIDIKAN YANG TERSEDIA, DAN KERJASAMA SMK PARIWISATA DENGAN DUNIA INDUSTRI

A. TINGKAT KOMPETENSI LULUSAN

SMK memiliki dua fungsi utama. Fungsi utama pertama adalah menyiapkan lulusannya sebagai pekerja yang bertugas melaksanakan pekerjaan yang diciptakan oleh orang atau pihak lain. Fungsi ke dua adalah sebagai pencipta lapangan kerja, untuk dirinya sendiri namun lebih baik apabila dapat menciptakan lapangan kerja untuk orang lain juga. Analisis ini difokuskan pada ketercapaian fungsi pertama, walaupun fungsi ke dua juga dianalisis secara komprehensif.

1. Indikasi pencapaian tingkat kompetensi lulusan sebagai calon pekerja

Dalam rangka melaksanakan fungsi pertamanya, masalah utama SMK Pariwisata, sebagaimana halnya dengan SMK pada umumnya, adalah tingginya proporsi lulusan yang menganggur. Ini merupakan sebuah ironi mengingat fungsi utama SMK adalah menyiapkan lulusan untuk bekerja. Salah satu penyebab menganggurnya lulusan adalah kompetensi yang rendah, sebagaimana diungkapkan oleh asosiasi pelaku industri, asosiasi profesi, dan pemilik usaha di bidang pariwisata. Kurangnya kompetensi lulusan SMK Pariwisata 3 tahun bersifat menyeluruh, yaitu seluruh kompetensi keahlian yang ada. Indikator yang digunakan oleh para pelaku industri tersebut adalah mulai dari kegamangan kerja, perilaku kerja, sampai kekekurangan wawasan lulusan yang teramati dan ini dibahas di masing-masing tempat kerja, bahkan sampai ke tingkat asosiasi.

Kekurangan kompetensi ini dinyatakan oleh asosiasi-asosiasi terkait²⁹ dengan masing-masing KK tersebut pada kelima lokasi verval³⁰. Para pelaku industri pariwisata tersebut diwakili oleh baik asosiasi industri maupun asosiasi profesi, seperti misalnya PHRI, ASITA, IGHMA, IHGM, IHKA, HPI untuk Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata, ICA dan PCPI untuk Kuliner, Tiara Kusuma dan ASTI untuk Tata Kecantikan, dan IPBI untuk Tata Busana.

Selain penilaian yang disampaikan oleh perwakilan para pelaku industri pariwisata, alumni dan siswa serta GMP menyampaikan indikasi penyebab rendahnya kompetensi lulusan. Indikator yang dikemukakan oleh alumni dan siswa adalah serupa, yakni kurangnya frekuensi praktik di sekolah. Bahkan ada alumni yang menyatakan bahwa selama bersekolah, KK yang ia masuki tidak pernah menyelenggarakan praktik. Bagaimana siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan apabila frekuensi praktiknya rendah atau tidak melakukan praktik sama sekali? Di sisi lain, GMP secara tidak langsung mengamini pernyataan siswa dan alumni dengan menyatakan bahwa fasilitas praktik tidak memadai dan anggaran untuk melaksanakan praktik di sekolah yang tidak mencukupi yang menjadikan rendahnya frekuensi praktik di sekolah.

²⁹ Testimoni asosiasi profesi ini berasal dari asosiasi terkait perhotelan yakni PHRI dan IHGMA, usaha perjalanan wisata yakni ASITA, tata boga yakni ICA dan PCPI, kecantikan yakni Tiara Kusuma, dan tata busana yakni IPBMI.

³⁰ Lokasi verval adalah Sumatera Utara, NTB, dan DI Yogyakarta (super-prioritas pengembangan pariwisata), Sulawesi Utara (unggulan pertama), dan Kaltim (bukan-prioritas, bukan-unggulan, calon ibukota negara yang baru). DI Yogyakarta dipilih karena yang dimasukkan sebagai super-prioritas adalah Borobudur, namun wisman Borobudur sebagian besar adalah wisman DI Yogyakarta, bukan Jateng.

Tabel 2. Contoh Struktur Kurikulum SMK 2013, KK Perhotelan³¹

MATA PELAJARAN	KELAS						KASIKTU
	X		XI		XII		
	1	2	1	2	1	2	
A. Muatan Nasional							
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3	3	3	3	18
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2	12
3. Bahasa Indonesia	4	4	3	3	2	2	20
4. Matematika	4	4	4	4	4	4	24
5. Sejarah Indonesia	3	3	-	-	-	-	08
6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*)	3	3	3	3	4	4	44
Jumlah A							52
B. Muatan Kewilayahan							
1. Seni Budaya	3	3	-	-	-	-	08
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2	2	-	-	08
Jumlah B							08
C. Muatan Peminatan Kejuruan							
C1. Dasar Bidang Keahlian							44
1. Simulasi dan Komunikasi Digital	3	3	-	-	-	-	18
2. IPA Terapan	3	3	-	-	-	-	84
3. Kepariwisataan	3	3	-	-	-	-	84
C2. Dasar Program Keahlian							34
1. Komunikasi Industri Pariwisata	3	3	-	-	-	-	30
2. Sanitasi, Hygiene dan Keselamatan Kerja	3	3	-	-	-	-	30
3. Administrasi Umum	3	3	-	-	-	-	30
4. Bahasa Asing Pilihan	4	4	-	-	-	-	30
C3. Kompetensi Keahlian							16
1. Industri Perhotelan	-	-	4	4	-	-	
2. Front Office	-	-	5	5	7	7	
3. Housekeeping	-	-	5	5	6	6	
4. Laundry	-	-	5	5	6	6	
5. Food and Beverage	-	-	5	5	6	6	
6. Produk Kreatif dan Kewirausahaan	-	-	7	7	8	8	
Jumlah C							33
Total							48

Di sisi lain, rendahnya frekuensi praktik di sekolah juga disebabkan **tidak diatur**nya jumlah jam praktik untuk masing-masing mapel produktif yang membutuhkan praktik dalam meningkatkan pengetahuan, mengasah keterampilan, dan menanamkan sikap kerja siswa. Pengaturan jam praktik tidak ditemukan di struktur kurikulum yang berlaku saat ini, yakni termasuk Struktur Kurikulum SMK dan MAK yang ditetapkan bulan Juni tahun 2018 (Tabel 2). Pengaturan itu juga tidak muncul di daftar KI dan KD (Tabel 3 dan Tabel 4). Juga tidak dalam silabus (Tabel 5).

³¹ Peraturan Dirjen Dikdasmen no. 07/D.D5/KK/2018 th. 2018 tgl. 7 Jun 2018 tentang Struktur Kurikulum SMK dan MAK

Tabel 3. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk seluruh mata pelajaran pada Kelompok Mata Pelajaran C3, Kompetensi Keahlian Pariwisata³²

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
<p>3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Perhotelan pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.</p>	<p>4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Akomodasi Perhotelan.</p> <p>Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja.</p> <p>Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.</p> <p>Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.</p>

Tidak diaturnya jumlah jam praktik di sekolah, apalagi di industri, menjadi hal yang berbeda³³ apabila dibandingkan dengan SMK-SMK di bawah kementerian-kementerian yang lain sesuai sektor industri yang ditugaskan pada kementerian tersebut. Ada sekolah-sekolah serupa yang dikoordinasikan oleh kementerian-kementerian lain, jumlah jam praktik di sekolah (ada yang menyebut di kampus) selama satu siklus pendidikan dan bahkan per semester dan praktik kerja di industri.

³² Lampiran Peraturan Dirjen Dikdasmen no. 464/D.D5/KR/2018 th. 2018 tgl. 30 Agustus 2018 tentang KI dan KD Mata Pelajaran Muatan Nasional (A), Muatan Kewilayahan (B), Dasar Bid. Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian (C2), dan Kompetensi Keahlian (C3).

³³ Tidak dapat dikatakan "tidak lazim", karena kelaziman mengindikasikan sesuatu yang digunakan oleh kebanyakan pihak, sementara jumlah SMK yang dikelola Kemdikbud jauh lebih banyak dibanding dengan yang dikelola berbagai kementerian lain.

Tabel 4. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mapel *House Keeping* pada KK Pariwisata³⁴ ditetapkan dalam struktur kurikulum mereka.

KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
3.1 Memahami <i>public area section</i>	4.1 Melakukan pengelompokkan <i>public area section</i>
3.2 Menerapkan penggunaan peralatan	4.2 Menggunakan peralatan
3.3 Menerapkan penataan peralatan	4.3 Menata peralatan
3.4 Memahami bahan pembersih	4.4 Melakukan klasifikasi bahan pembersih
3.5 Memahami jenis dan objek yang akan dibersihkan	4.5 Melakukan klasifikasi jenis dan objek yang akan dibersihkan
3.6 Menganalisis pembersihan area kering dan basah	4.6 Melakukan pembersihan area yang kering dan basah
3.7 Menganalisis Penyimpanan peralatan pembersih dan bahan kimia	4.7 Melakukan penyimpanan peralatan pembersih dan bahan kimia
3.8 Menganalisis penataan ruang serbaguna	4.8 Melakukan penataan ruang serbaguna
3.9 Menganalisis penataan taman di dalam dan luar ruangan	4.9 Menata taman di dalam dan luar ruangan
3.10 Menganalisis rangkaian bunga	4.10 Membuat rangkaian bunga
3.11 Memahami <i>room section</i>	4.11 Melakukan pengelompokkan <i>room section</i>
3.12 Menerapkan penataan perlengkapan dan <i>trolley</i>	4.12 Melakukan penataan perlengkapan dan <i>trolley</i>
3.13 Menerapkan proses akses ke kamar untuk pelayanan	4.13 Melakukan akses ke kamar untuk pelayanan
3.14 Menerapkan penataan tempat tidur	4.14 Melakukan penataan tempat tidur
3.15 Menerapkan pembersihan dan perapihan kamar	4.15 Melakukan pembersihan dan merapikan kamar
3.16 Menerapkan penyimpanan <i>trolley</i> dan perlengkapan	4.16 Menyimpan <i>trolley</i> dan perlengkapan
3.17 Menerapkan penghitungan room linen dan amenities	4.17 Menentukan kebutuhan room linen dan amenities

³⁴ Lampiran Peraturan Dirjen Dikdasmen no. 464/D.D5/KR/2018 th. 2018 tgl. 30 Agustus 2018 tentang KI dan KD Mata Pelajaran Muatan Nasional (A), Muatan Kewilayahan (B), Dasar Bid. Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian (C2), dan Kompetensi Keahlian (C3).

3.18 Menerapkan layanan Jasa Housekeeping	4.18 Melaksanakan layanan Jasa Housekeeping
3.19 Menganalisis masalah layanan <i>housekeeping</i>	4.19 4.18 Menangani masalah layanan <i>housekeeping</i>
3.20 Menerapkan pemberian saran kepada tamu mengenai perlengkapan <i>housekeeping</i>	4.20 Memberikan saran kepada tamu mengenai perlengkapan <i>housekeeping</i>

Hal ini misalnya terjadi di SUPM di bawah binaan KKP dan Diklat Pelaut di bawah Kemenhub, dan dalam versi pengaturan praktik berbeda pada SMK di bawah Kemenperin³⁵.

Tabel 5. Format Silabus³⁶

SILABUS MATA PELAJARAN

Nama Sekolah :
 Bidang Keahlian :
 Program Keahlian :
 Kompetensi Keahlian :
 Mata Pelajaran :
 Durasi (Waktu) :
 KI-3 (Pengetahuan) :
 KI-4 (Keterampilan) :

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Alokasi Waktu (JP)	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian
1	2	3	4	5	6
3.1					
4.1					
3.2					
4.2					
.... dst					

³⁵ Kemenperin mengelola 9 SMK, 9 poltek, dan 1 akademi komunitas. Sumber: kemenperin.go.id/sekolah. Pada SMK disusun daftar KD per mapel yang berisi praktik kejuruan di sekolah.

³⁶ Dit. PSMK (2018). Implementasi Kurikulum 2013 SMK: Materi Penyusunan Silabus SMK. Jakarta: Dit. PSMK

Boks 1. Penentuan alokasi waktu pembelajaran praktik

6. Menentukan Alokasi Waktu

Alokasi waktu dicantumkan untuk setiap pasangan KD, menunjukkan berapa lama waktu yang disediakan bagi peserta didik dan pendidik untuk melakukan interaksi pembelajaran hingga peserta didik menguasai pasangan KD dimaksud. Satuan waktu jam pembelajaran adalah 45 menit jam waktu normal dan dialokasikan dalam satuan bilangan bulat.

Jumlah jam praktik di Diklat Pelaut dan prakerin atau PKL juga diatur dalam kurikulum. Pembelajaran praktik tersebut dijadwalkan selama 2.503 jam @ 60 menit atau setara dengan 83 persen dari jumlah jam belajar secara keseluruhan pada program pendidikan 2 tahun berasrama. Pembelajaran praktik tersebut terdiri dari praktik di sekolah dan prakerin atau PKL yang disebut praktik laut (prala) selama 1.266 jam @ 60 menit dan pendidikan karakter kerja pelaut dalam bentuk praktik karakter pelaut di asrama selama 960 jam @ 60 menit. Prala dilaksanakan pada tahun ke dua pendidikan. Dengan demikian jumlah jam praktik di kampus adalah 1.237 jam @ 60 menit. Jumlah jam belajar secara keseluruhan adalah 3.008 jam @ 60 menit selama 2 tahun. Namun demikian, jumlah tersebut tidak termasuk beberapa mata pelajaran praktik untuk persiapan ujian sertifikasi kompetensi tingkat internasional yang menyaratkan siswa untuk menyelesaikan prala-nya lebih dahulu.

Tidak diaturnya jumlah jam praktik di sekolah pada SMK-SMK di bawah Kemdikbud nampaknya berdampak pada dua hal. Dampak pertama, dapat menghindarkan tuntutan kepada direktorat pengelola atas pemberian peralatan dan mesin serta bantuan biaya operasional yang jauh dari memadai untuk melaksanakan praktik di sekolah sesuai dengan struktur kurikulum. Tanpa hitungan terincipun sudah dapat diduga bahwa biaya praktik tidak memadai, sekedar dengan membandingkan besarnya BOS/siswa SMK hanya Rp 100.000/tahun lebih tinggi dibanding SMA. Dampak ke dua adalah, sebagaimana telah disampaikan, walaupun

kemungkinan sebagian besar GMP memiliki kompetensi³⁷ dan memiliki tanggungjawab menyiapkan SDM masa depan dan jiwa mendidik, nampaknya masih ada GMP yang tidak seperti itu. Bagi GMP yang kurang bertanggungjawab dan kurang memiliki jiwa mendidik, peluang ini diterjemahkan sebagai pemberian kebebasan untuk melaksanakan praktik sebisanya atau tidak melaksanakan praktik sama sekali. Kalau pun melaksanakan praktik, frekuensi praktiknya juga dalam frekuensi sekadarnya. Alasan yang dapat digunakan adalah frekuensi dan jumlah jam praktik tidak diatur dalam kurikulum dan/atau peralatan dan mesin praktik yang kurang, dan/atau yang paling sering digunakan adalah biaya praktik yang tidak mencukupi.

Boks 2. Unit waktu silabus³⁸

Penyusunan Silabus SMK

F. Unit Waktu Silabus

1. **Silabus mata pelajaran**
 - a. Disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
 - b. Penyusunan silabus dilaksanakan bersama-sama oleh guru yang mengajarkan mata pelajaran yang sama pada tingkat satuan pendidikan untuk satu sekolah atau kelompok sekolah, dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing sekolah.
2. **Implementasi pembelajaran per semester**
 - a. Penggalan silabus mata pelajaran muatan Nasional (A) dan muatan Kewilayahan (B), dapat diatur sesuai dengan urutan pembelajaran KD serta alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum.
 - b. Penggalan silabus kelompok mata pelajaran muatan Peminatan Kejuruan (C), ditetapkan berdasarkan unit kompetensi berdasarkan skema sertifikasi dan disesuaikan dengan prinsip pembelajaran tuntas (*mastery learning*).

2. Tingkat kompetensi lulusan sebagai calon pencipta lapangan kerja

³⁷ Kompetensi GMP tidak hanya meliputi aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi lebih-lebih lagi aspek psikomotorik yakni keterampilan membimbing siswa menggunakan tangan, peralatan, dan mesin dalam konteks pembuatan produk barang atau jasa atau keduanya, dan aspek afektif, yakni kemauan dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam membimbing siswa. Singkatnya GMP tidak hanya harus mengetahui, tetapi juga mampu melaksanakan dengan benar, dan yang terpenting mau membimbing siswa atas dasar pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.

³⁸ Bakrun (2018). *Penyusunan Silabus*. Bahan Pelatihan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi keduanya, walaupun pengukuran formal tentang tingkat kompetensi kewirausahaan belum ada – mungkin juga tidak perlu ada karena pengukuran kompetensi formal yang ada selama ini cenderung bias ke aspek-aspek kognitif dan kuantitatif -- namun indikasi-indikasinya sudah dapat ditasirkan apakah mengarah ke tercapai atau tidaknya penyiapan kewirausahaan kepada siswa. Untuk keperluan itu tingkat kompetensi lulusan diindikasikan oleh dua indikator. Indikator pertama adalah penilaian wirausahawan-wirausahawati muda binaan sekaligus unggulan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) terhadap peserta PKL di perusahaan *start-up*-nya. Hasil penilaian ini dianggap sebagai indikator yang cukup handal untuk memprediksi kompetensi lulusan, karena setelah kepulangan siswa dari PKL tidak ada banyak waktu lagi bagi siswa untuk meningkatkan kompetensinya karena mereka segera dihadapkan pada tiga ujian akhir, yakni ujian nasional (UN) atau asesmen lain sebagai penggantinya, ujian sekolah (US), dan uji kompetensi keahlian (UKK).

Indikator ke dua adalah proses pengembangan kompetensi kewirausahaan di sekolah melalui Mata Pelajaran (Mapel) Produk Kreatif dan Kewirausahaan (PKK). Mapel ini mendapat alokasi waktu terbesar di antara mapel-mapel Kelompok C3. Menurut struktur kurikulum yang berlaku saat ini, alokasi waktunya di Kelas XI mencapai 23 persen sementara mapel-mapel kelompok C3 lainnya secara rerata hanya 16 persen. Selanjutnya, di Kelas XII menjadi 24 persen sedangkan mapel-mapel C3 lainnya rerata alokasi waktunya 19 persen (Tabel 2).

Agar lebih teliti, bermakna dan fair analisis dilakukan pada tingkat kompetensi keahlian. Indikasi penilaian kompetensi terhadap peserta PKL adalah untuk KK Kuliner, sedangkan indikasi proses pembelajaran adalah untuk KK Perhotelan.

Tingkat kompetensi lulusan KK Kuliner, sebagaimana diindikasikan oleh tingkat kompetensi siswa PKL, adalah tidak memadai. Siswa PKL dinilai sangat kurang dalam ketiga kelompok kompetensi dasar kewirausahaan, yakni kompetensi personal, kompetensi inter-personal, dan kompetensi bisnis. Ketiga kompetensi ini masing-masing secara berurutan diwakili oleh kreativitas, komunikasi, dan visi berbisnis. Siswa tidak menunjukkan kreativitasnya dan juga tidak menggali informasi tentang pemilihan jenis usaha. Siswa kurang memiliki kompetensi komunikasi terutama dalam mengemukakan pendapat apalagi dalam aspek meyakinkan pihak lain

dengan cara pemberian alasan pendukung terhadap pendapat yang diberikan atau memberikan data penguat. Untuk visi berbisnis, siswa juga dinilai kurang mampu dan kurang memiliki kemauan menggali informasi pengusaha terkait hal-hal yang berkaitan dengan pandangan-pandangan pengusaha tentang pembukaan usaha dan menjalankan usaha.

Indikasi tingkat kompetensi siswa KK Perhotelan beragam dan akan disajikan dalam 3 kasus sekolah dari 3 provinsi yang berbeda. Pada kasus sekolah pertama terdapat indikasi bahwa penyiapan kewirausahaan bagi siswa KK perhotelan kurang berhasil. Indikasinya adalah kekurangsiapan manajemen sekolah dalam menyelenggarakan pembekalan kewirausahaan bagi siswa dan pendapat siswa tentang Mapel PKK. Kekurangsiapan pihak manajemen ini ditunjukkan oleh tidak dianggapnya PKK sebagai mapel yang membekali siswa dalam mencapai tujuan kedua dari pendidikan SMK, yaitu kemampuan lulusan dalam menciptakan pekerjaannya sendiri. Secara implisit ini mengindikasikan bahwa mindset manajemen sekolah adalah bahwa SMK ditujukan untuk mencetak lulusan sebagai pekerja, karyawan, atau buruh yang pekerjaannya sudah disiapkan orang tua atau pihak lain.

Nampak bahwa keberadaan tujuan ke dua dari pendidikan SMK, yakni mencetak lulusan yang mampu menciptakan pekerjaannya sendiri dan untuk itu lulusan perlu dibekali dengan satu kompetensi lainnya, selain membuat produk barang dan jasa, yakni pembukaan usaha baru, kurang atau tidak disadari. Pembekalan kunci bagi kepemilikan kompetensi pembukaan usaha baru tersebut diberikan melalui Mapel PKK. Ketiadaan mindset tentang tujuan ke dua, yaitu menyiapkan calon pelaku wirausaha, menjadikan Mapel PKK dianggap sebagai pelengkap, walaupun posisinya dalam struktur kurikulum sudah dipindah ke kelompok mapel C3 dan sama dengan mapel Kelompok C3 pada umumnya yakni diletakkan pada semester 3 s.d. 6 (Tabel 2).

Ketiadaan mindset tersebut berdampak pada keputusan manajemen sekolah dalam menetapkan guru mapel produktif pengampu Mapel PKK. Berbeda dengan mapel lainnya, pengampuan mapel PKK setidaknya secara teoritis memerlukan dua jenis kompetensi, yakni pembuatan produk barang atau jasa dan perintisan usaha baru. Pada sekolah kasus ini. para guru senior, yang notabene berlatar belakang pendidikan pembuatan produk barang atau jasa memilih untuk tidak mengajarkan Mapel PKK. Mereka cenderung memilih untuk berada pada “zona nyaman”-nya, mengajar mapel yang sudah digelutinya sejak kuliah. Dapat dikatakan

bahwa para guru tidak pernah mempelajari materi perintisan usaha baru di LPTK atau perguruan tinggi lainnya dan pelatihanpun tidak memadai, walaupun sempat diundang oleh “pusat”, disamping adanya alasan dari sebagian guru bahwa KI dan KD mapel ini sangat teoritis sehingga sulit difahami.

Ketika semua guru senior pada sekolah kasus tersebut sudah memilih mapel yang ingin diampunya, tersialah guru honorer yang belum mendapat tugas mengajar. Penugasan guru honorer untuk mengampu mapel ini cenderung agar guru tersebut mendapatkan jam mengajar; tidak terfikirkan bahwa guru tersebut tidak mempunyai salah satu atau kedua kompetensi yang dibutuhkan. Beberapa responden guru mapel produktif senior, termasuk kaprodi, menyatakan “... kasihan, kalau tidak dapat jam mengajar, dia tidak dapat honor ...”.

Dari pendapat siswa yang mapel PKK-nya diampu oleh guru yang ditetapkan atas dasar pembagian jam mengajar, bukan indikasi relevansi kompetensi yang dimiliki terhadap Mapel PKK, ditemukan dua indikator. Keduanya mengindikasikan adanya visi yang tidak tersampaikan dan misi pembelajaran PKK yang tidak terwujud karena guru yang tidak berkompoten. Indikator pertama adalah pernyataan sejumlah siswa bahwa mata pelajaran PKK tidak ada gunanya. Indikator ke dua adalah pendapat tentang terlalu banyaknya jam pelajaran PKK, yang sebanyak 7 jampel per minggu di kelas XI dan 8 jam per minggu di kelas XII. Pernyataan bahwa mata pelajaran PKK tidak ada gunanya disampaikan oleh siswa KK Perhotelan yang ditugaskan guru mapel PKK untuk membuat bunga kertas atau kain. Para siswa tidak mengetahui tujuan guru menugaskan mereka yang belajar di bidang perhotelan untuk membuat bunga. Praktik pada mapel PKK ini dinilai tidak relevan dengan materi-materi pembelajaran KK Perhotelan. Rupanya guru ini tidak sadar bahwa tujuan dari pembelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan salah satunya adalah mengembangkan kreatifitas siswa. Salah satu dari kompetensi inti untuk menjadi wirausaha adalah kompetensi personal, yang di dalamnya terdapat kreatifitas dan inovasi^{39,40}.

³⁹ Prats, J dan Agules R (2013). Three Competencies Every Entrepreneur Should Develop. Diunggah tahun 2013 dalam <https://www.ideasforleaders.com/ideas/three-competencies-every-entrepreneur-should-develop>. Diunduh 29 Juni 2019

⁴⁰ Top 7 Personal Competencies of an Entrepreneur. <https://www.paggu.com/entrepreneurship/top-7-personal-competencies-of-an-entrepreneur/> Diunduh 29 Juni 2019.

Pada kasus SMK ke dua, yakni sama-sama dari KK Perhotelan, terdapat indikasi bahwa penyiapan kewirausahaan siswa mengindikasikan keberhasilan. Keberhasilan tersebut didasarkan pada tiga faktor. Pertama, manajemen sekolah, yaitu kepala sekolah bersama kepala program keahlian (kaprog) dan kepala kompetensi keahlian (kaprodi) memahami esensi mapel PKK sebagai pemberi kompetensi bagi pencapaian tujuan kedua pendidikan SMK, yakni mencetak calon pelaku wirausaha. Berdasarkan itu pemilihan guru pengampu dilakukan atas dasar kompetensi yang dimiliki, yakni setidaknya kompetensi dalam pembelajaran pembuatan produk barang atau jasa.

Ke dua, pada kasus sekolah ke dua ini, ketua kaprodi ikut bertanggungjawab dalam pengembangan strategi pembelajaran mapel PKK. Kaprodi dan guru pengampu menggunakan strategi kesesuaian pembelajaran praktik PKK terhadap materi pembelajaran KK Perhotelan. Masing-masing kelompok siswa diminta melaksanakan enam jenis praktik penerapan kewirausahaan berdasarkan materi-materi mata pelajaran kelompok C3. Keenam jenis praktik pemberian layanan jasa tersebut adalah laundry pakaian, laundry sepatu, laundry helm, cuci motor, cleaning service, dan service AC (daftar mata pelajaran pada Tabel 2). Sebagai contoh ada kelompok siswa yang menawarkan jasa pembersihan rumah kepada masyarakat yang tinggal di lingkungan sekolah. Kompetensi pembersihan rumah (*house cleaning service*) yang ditawarkan oleh siswa diperoleh siswa melalui materi pelajaran House Keeping⁴¹.

Penawaran produk jasa *cleaning service* ini dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama siswa melakukan penawaran ke rumah-rumah guru. Setelah berpengalaman menjual jasa ke rumah guru, pengalaman ini dibahas bersama oleh seluruh siswa dan guru pengampu dan mendapatkan masukan perbaikan. Pada tahap ke dua, berulah mereka menawarkan kepada masyarakat umum yang tinggal di lingkungan sekolah.

Pada tahap awal guru pengampu menyilakan siswa berkelompok, minimal 2 orang, untuk memilih produk barang atau jasa apa yang akan dipasarkan. Salah satu peran penting guru pengampu adalah membesarkan hati siswa, yang semula ragu-ragu dan takut-takut untuk memulai bisnis, menjadi memiliki kepercayaan diri. Proposal sederhana jenis usaha yang dipilih disampaikan lebih dahulu kepada guru pengampu untuk mendapatkan

⁴¹ *House Keeping* adalah salah satu mapel pada KK Perhotelan, yang masuk pada Kelompok Mapel C3 (Tabel 2.1)

penyempurnaan. Salah satu catatan yang selalu diingatkan guru adalah pengelolaan keuangan. Pembekalan kompetensi pengelolaan keuangan bisnis sudah diberikan kepada mereka pada materi pembelajaran PKK sebelum pelaksanaan praktik. Para siswa menilai pengalaman tersebut sangat berharga, mereka merasa “pede” untuk berwirausaha dan manajemen sekolahpun sependapat.

Pada kasus SMK ke tiga, dari KK Perhotelan, juga terdapat indikasi bahwa penyiapan kewirausahaan siswa mengindikasikan keberhasilan. Penilaian keberhasilan ini memiliki tiga indikator. Pertama, ketiga lini manajemen sekolah, yakni kepala sekolah bersama kepala program keahlian (kaprog) dan kepala kompetensi keahlian (kaprodi) memahami esensi Mapel PKK sebagai pemberi kompetensi bagi pencapaian tujuan kedua pendidikan SMK, yakni mencetak calon pelaku wirausaha. Berdasarkan itu ketiga lini manajemen tersebut secara kolektif memilih guru-guru pengampu yang berkompeten, yakni setidaknya memiliki kompetensi dalam pembelajaran pembuatan produk barang atau jasa.

Indikator ke dua, pada kasus SMK Pariwisata KK Perhotelan ke tiga ini, kepala kompetensi keahlian juga ikut bertanggungjawab dalam pengembangan strategi pembelajaran mapel PKK, tidak melepaskan tanggung jawab itu kepada guru pengampu sendirian. Mereka menyepakati dua hal, yakni (i) sesuai dengan nama mata pelajarannya, yakni PKK, disepakati perlunya upaya untuk mengembangkan, mewadahi, dan menyalurkan kreatifitas siswa, dan (ii) strategi pemilihan bisnis dengan memperhatikan tiga kompetensi inti kewirausahaan, yakni kompetensi personal, kompetensi inter-personal, dan kompetensi bisnis. Ketiga kompetensi ini masing-masing secara berurutan diwakili oleh kreativitas, komunikasi, dan visi berbisnis⁴², yang teorinya secara sederhana sudah disampaikan dalam pembelajaran harian.

Dalam rangka mengembangkan, mewadahi, dan menyalurkan kreatifitas siswa, guru pengampu⁴³ menyilakan siswa membentuk kelompok sendiri dan kelompok dibebaskan secara kreatif memilih sendiri “proyek” apa yang akan dilakukan, dapat berupa proyek yang sesuai dengan salah satu mapel atau beberapa mapel pada Kelompok Mapel C3 atau di luar mapel-mapel tersebut. Guru ini meyakini dua hal, pertama bahwa passion pelaku usaha berperan penting dalam pembukaan usaha. Ke dua, pengetahuan dan keterampilan pembuatan produk barang atau jasa – terutama pada era internet ini -- dapat dipelajari oleh siswa dari Generasi Z (yakni generasi

⁴² Prats dan Julia (2013). Op. cit.

⁴³ Salah satu guru pengampu adalah Kepala Kompetensi Keahlian Perhotelan.

yang lahir ketika internet sudah ada) dari manapun, seperti internet, hobby, atau kegiatan kaum muda lainnya baik ekstrakurikuler maupun kelompok di luar sekolah, tidak hanya di sekolah. Pengembangan wawasan, dan penyaluran kreatifitas siswa dan tidak dibatasinya usaha yang akan dikembangkan hanya kepada yang materi yang dipelajari di kelas tersebut, merupakan indikator keberhasilan ke tiga.

Salah satu kelompok siswa ternyata memilih produk jasa *event organizer* (EO) di dalam sekolah. Kelompok menawarkan sebuah event bertajuk SMK 123⁴⁴ Day kepada seluruh kelas yang ada untuk mengisinya dan sasaran pengunjung (*target audience*) seluruh warga sekolah termasuk guru, siswa, para pengelola kantin, toko, dan koperasi sekolah, dan bahkan juga diundang perwakilan dari sekolah lain yang berdekatan (kebetulan SMK ini berhadapan dengan SMK lain yang kebetulan juga bukan-pariwisata). Ada gerai kelas yang menjual produk kudapan, produk kerajinan tangan, produk minuman perusahaan terkenal, serta ada kelas yang membuka pertunjukan band kelas, dan kelas lain menyelenggarakan pertunjukan kesenian. Setelah dilaksanakan ternyata proyek EO mereka menuai sukses dan siswa berbangga atas karyanya dan mereka merasakan manfaat pembelajaran PKK. Para siswa menilai pengalaman tersebut sangat berharga dan manajemen sekolahpun berpendapat sama bahwa praktik EO dalam rangka mapel PKK ini berhasil baik dalam menyiapkan kewirausahaan siswa.

Peran guru pengampu, sebagai mana judul mapelnya, yakni Produk Kreatif dan Kewirausahaan, pertama-tama adalah membuka cakrawala kreatifitas siswa, mewadahnya, dan kemudian menyalurkan kreatifitas siswanya dalam bentuk kegiatan yang benar. Peran penting lainnya adalah membesarkan hati siswa agar mereka memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Guru pengampu menemukan bahwa apabila siswa diberi ruang dan peluang kreativitas secara memadai, kepercayaan diri mereka menjadi tinggi, guru tinggal mendukung saja. Guru pengampu hanya meminta siswa menuliskan idenya dalam bentuk proposal sederhana dan disampaikan lebih dahulu kepada guru pengampu untuk mendapatkan masukan perbaikan dan kemudian dibahas bersama dengan seluruh siswa untuk saling belajar. Guru pengampu juga mengingatkan agar semua pengeluaran dan pemasukan dicatat lengkap, namun siswa dipesan untuk tidak mengutamakan keuntungan usaha. Mengingat siswa sudah dibekali dengan tiga kompetensi utama, yakni personal, inter-personal, dan bisnis, maka pada pembahasan proposal ketiganya tidak dibekalkan lagi.

⁴⁴ 123 adalah nama SMK tempat siswa belajar.

B. KURIKULUM DAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN YANG TERSEDIA

1. Karakteristik kurikulum dan penyiapan lulusan sebagai calon pekerja

a. Kepadatan materi pembelajaran

Materi pembelajaran dalam proses pendidikan selama 3 tahun terlalu padat. Hal ini diindikasikan oleh setidaknya tiga hal. **Pertama**, siswa yang dianggap sebagai manusia super yang tidak mempunyai rasa lelah, yakni siang hari harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja ketika melaksanakan PKL atau prakerin selama 3 sampai 6 bulan (termasuk berdiri sepanjang hari di industri bagi sebagian siswa) sementara di malam hari mereka diharuskan untuk belajar materi-materi yang seharusnya pada saat itu diterima di sekolah. Akibatnya dapat diduga, karena mereka adalah manusia biasa, baik pembelajaran materi pelajaran yang seharusnya diberikan di sekolah, maupun peningkatan wawasan dan keterampilan, serta perbaikan sikap kerja menjadi tidak optimal.

Ke dua, PKL atau prakerin memerlukan kompetensi siswa sampai level tertentu agar dapat secara langsung memahami pelaksanaan pekerjaan di industri. Agar siswa dapat menata diri menghadapi ujian-ujian di semester 6, sebagian besar SMK Pariwisata menjadwalkan prakerin selesai dilaksanakan sebelum atau pertengahan semester 5 dan untuk itu PKL atau prakerin 6 bulan harus dimulai pada semester 4. Sehingga pembekalan siswa agar dapat langsung *tune-in* (nyambung) ketika mengikuti prakerin, maka mapel-mapel produktif yang memberikan bekal kompetensi dasar untuk mengikuti PKL atau prakerin harus dimajukan ke semester 1 s.d. 3, ketika pada semester itu sudah terjadwal materi-materi lainnya (Tabel 2). Akibatnya terjadi *overload* materi pada ketiga semester tersebut. Agar pembelajaran dapat dilaksanakan, maka penyelenggaraan pembelajaran mata-mata pelajaran dilakukan dengan “dipadatkan” sehingga penguasaan kompetensi siswa untuk materi-materi mapel tersebut menjadi tidak optimal. Kalau memang dapat optimal, mengapa tidak semua materi dipadatkan saja? Contoh bukti ketidakefektifan ini adalah keluhan pemilik salon kecantikan (yang sekaligus pengurus DPP Tiara Kusuma) yang menerima siswa KK Tata Kecantikan prakerin selama 6 bulan yang selama 4 bulan pertama harus mengulangi pemberian materi yang diperlukan untuk “*tune-in*” di salonnnya. Materi-materi tersebut tidak hanya keterampilan tetapi bahkan juga pengetahuan dan sikap dan diberikan

secara khusus seperti belajar pada kelas-kelas sekolah pada umumnya, bukan belajar sambil bekerja di salon.

Ke tiga, materi mata-mata pelajaran produktif yang dijadwalkan diberikan pada semester 6, semester ketika berlangsung tiga ujian akhir -- yakni UN (atau asesmen lainnya), ujian sekolah, dan Ujian Kompetensi Keahlian -- harus digeser ke semester-semester sebelumnya sehingga menambah beban pembelajaran semester 1, 2, 3 dan 5 (kalau prakerin harus selesai sebelum semester 5). Pembelajaran pada keempat semester ini menjadi semakin padat. Di depan sudah dibahas bahwa dalam rangka menyiapkan siswa untuk mengikuti PKL atau prakerin, pembelajaran sudah dipadatkan untuk menampung pembelajaran mapel produktif untuk menyiapkan siswa mengikuti PKL/prakerin. Sehingga materi yang distrukturkan untuk diberikan pada 6 semester harus diberikan pada 4 semester, sehingga pembelajaran menjadi tidak optimal.

b. Kelemahan kurikulum

Kelemahan kurikulum dapat ditinjau dari tiga aspek, yakni waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, dan alokasi jam praktik. **Pertama**, kelemahan kurikulum dari sisi waktu meliputi dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah prakerin yang tidak dicantumkan di struktur kurikulum, sehingga kenyataan pembelajaran berbeda terhadap rencana pembelajaran sebagaimana muncul berupa struktur kurikulum. Kegiatan ke dua adalah jadwal pembelajaran selama semester 6, padahal di semester ini terdapat 3 ujian, yakni UN atau asesmen akhir penggantinya, UKK, dan ujian sekolah. Lebih-lebih lagi jumlah jam pelajaran per minggu pada semester ketika berlangsung 3 ujian akhir ini justru merupakan jumlah jam pelajaran tertinggi selama siswa 3 tahun bersekolah (Tabel 2).

Kedua, kelemahan kurikulum dari sisi materi diindikasikan oleh dua hal. Indikasi pertama adalah kadaluwarsanya materi pembelajaran praktik. Hal ini disampaikan oleh alumni yang sudah bekerja di industri yang secara berkala diundang untuk mengisi materi pembelajaran di sekolah. Kelemahan ini ditemukan di berbagai provinsi validasi model dan bahkan di Jakarta ketika kajian ini berada pada langkah pengembangan konsep model. Indikasi ke dua adalah pernyataan yang diberikan oleh pelaku industri pariwisata bahwa materi pembelajaran praktik di sekolah tidak sesuai dengan kenyataan di dunia kerja. Tentu saja hal ini mengejutkan mengingat adanya pernyataan bahwa kurikulum SMK disusun bersama oleh pelaku pengelola pendidikan nasional dan sekolah bersama dengan industri.

Namun demikian ada pelaku industri yang menyampaikan hal lain di depan forum Puslitjardikbud untuk hasil-hasil penelitian tahun 2018. Pada saat itu salah satu pelaku industri menyatakan bahwa ia diundang untuk membahas Kurikulum 2013, ketika kurikulum tersebut sudah ditandatangani oleh dirjen. Indikasi ke tiga adalah kasus-kasus siswa yang menyatakan bahwa materi dan prosedur kerja yang diajarkan di sekolah berbeda dengan di industri. Hal ini dinyatakan baik oleh siswa yang sudah melaksanakan PKL atau prakerin maupun siswa yang memperoleh informasi dari pelaku industri yang dikenalnya.

Ke tiga, kurikulum SMK Bidang Keahlian Pariwisata, sebagaimana dengan bidang-bidang keahlian lainnya, tidak mencantumkan jumlah jam praktik dalam struktur kurikulumnya. Hal ini jauh berbeda dengan kurikulum pendidikan menengah kemaritiman di Kemenhub dan KKP. Pada kurikulum kedua lembaga pendidikan menengah dari kedua kementerian tersebut tertera dengan jelas proporsi mata pelajaran teori dan praktik. Apalagi pada pendidikan kemaritiman di Kemenhub, rincian waktu komponen teori dan praktik pada setiap mata pelajaran tertera dengan jelas. Sehingga lembaga dan guru harus mengikutinya. Sebaliknya pada spektrum kurikulum SMK tidak tertera jumlah jam teori dan praktik, apalagi untuk masing-masing mata pelajaran.

Prinsip bahwa banyaknya waktu materi pembelajaran praktik yang diserahkan kepada guru menjadikan sangat beragamnya pelaksanaan praktik di sekolah. Lulusan sebuah SMKN Pariwisata yang menjadi ketua BPD asosiasi chef profesional pada diskusi terfokus di salah satu provinsi menyatakan secara terbuka, yang bahkan di depan kepala sekolah, bahwa ia dulu tidak belajar praktik sama sekali selama belajar di sekolah itu. Hal senada dalam kadar yang lebih ringan, dinyatakan oleh siswa pada diskusi terfokus khusus siswa, di provinsi lainnya, bahwa praktik hanya dilaksanakan 3 sampai 4 kali dalam satu tahun dan siswa kompetensi keahlian lain menyatakan bahwa praktik hanya 1 kali dalam satu tahun, yaitu praktik table manner di salah satu hotel. Siswa sekolah yang sama juga menyatakan bahwa praktik menggunakan peralatan tertentu yang sudah tersedia di sekolah tidak dilaksanakan oleh guru mapel produktif dengan alasan bahwa bahan yang digunakan harganya sangat mahal.

2. Kurikulum dan karakteristik penyiapan lulusan sebagai calon pelaku wirausaha

Pelaku wirausaha juga memerlukan keterampilan membuat produk barang atau jasa, namun tidak secara otomatis bahwa pelaku wirausaha akan mengusahakan barang dan jasa yang diproduksi sendiri. Ketika pelaku wirausaha mengusahakan produk barang atau jasa yang dibuat oleh pihak lain, maka diskusi berikut berkaitan dengan karakteristik penyiapan calon pelaku wirausaha pada umumnya di SMK Pariwisata.

- a. Kekurangsiapan manajemen sekolah dalam melaksanakan penyiapan lulusan untuk menjadi pelaku wirausaha

Kekurangsiapan manajemen sekolah ini ditunjukkan oleh tidak dianggapnya PKK sebagai mapel yang membekali siswa dalam mencapai tujuan kedua pendidikan SMK, yakni mencetak calon pelaku wirausaha. *Mindset* manajemen sekolah adalah bahwa SMK ditujukan untuk mencetak lulusan sebagai pekerja, karyawan, atau buruh. Ketidadaan *mindset* tentang tujuan ke dua menjadikan Mapel PKK dianggap sebagai pelengkap. Hal ini berdampak pada keputusan manajemen sekolah dalam menetapkan guru mapel produktif pengampu mapel PKK, yang lebih berdasar ke pemerataan tugas mengajar, bukan pada kepemilikan kompetensi pembuatan produk barang atau jasa dan kompetensi dalam menemukan dan mengelola usaha baru.

- b. Peran serta kaprodi dalam penentuan strategi pembelajaran PKK

Pada sekolah-sekolah yang cukup dan sangat berhasil dalam menyiapkan kewirausahaan siswa, pemilihan strategi pembelajaran PKK tidak diserahkan kepada individu guru pengampu. Strategi tersebut dikembangkan bersama oleh kaprodi dan para guru pengampu. Selain itu kaprodi juga melakukan upaya pemastian kualitas pembelajaran lainnya, termasuk supervisi pelaksanaan pembelajaran termasuk praktik pembukaan usaha baru oleh siswa.

- c. Pemberian peluang dan ruang kepada siswa untuk menuangkan kreativitas mereka

Penuangan kreativitas siswa dengan tepat melalui pembelajaran PKK adalah salah satu esensi mapel ini, sebagaimana nama mapelnya yang memiliki komponen “Produk Kreatif”. Penuangan ini terdiri dari dua aspek, yakni kreativitas dalam pembentukan kelompok, dan menentukan koordinatonya, serta kreativitas dalam menentukan

jenis usaha yang akan dipraktekkan untuk dibuka bersama. Penentuan ini tidak dibatasi dengan jenis usaha yang terkait dengan mapel Kelompok C3 (kompetensi keahlian) di sekolah. Siswa masa kini mempunyai sumber informasi yang luas terkait pembuatan produk barang atau jasa, termasuk dari internet, *hobby*, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kepemudaan, dll. Agar siswa mampu melahirkan produk layanan yang kreatif, kreativitas siswa sendiri perlu dikembangkan, diwadahi, dan disalurkan. *Passion* pelaku usaha berperan penting dalam pembukaan usaha baru.

3. Sumber daya pendidikan: guru mapel produktif serta pembiayaan praktik dan keterlaksanaannya

a. Kekurangan jumlah, beban mengajar, dan kompetensi guru mapel produktif, serta upaya yang telah dilakukan

1) Kekurangan jumlah guru mapel produktif (GMP) yang sangat tinggi

Kekurangan GMP sudah dirasakan sejak lama. Kekurangan ini terjadi setidaknya karena tiga hal. Pertama, pembukaan SMK baru tidak dibarengi dengan pengadaan GMP secara memadai. Ke dua, terdapat bidang-bidang keahlian di SMK yang tidak tersedia LPTK-nya, sementara itu lulusan perguruan tinggi non-keguruan cenderung bekerja di bidang keahliannya yang menawarkan penghasilan yang jauh lebih memadai. Ke tiga, adanya guru yang pensiun di setiap tahun dan tidak tergantikan, sehingga mengurangi jumlah stok guru yang sudah tidak mencukupi dibanding jumlah kebutuhan.

Pada awal tahun 2017 jumlah kekurangan GMP tersebut mencapai 91.861 orang⁴⁵. Untuk Bidang Keahlian Pariwisata sendiri terjadi kekurangan GMP sebanyak 4.326 orang pada awal tahun 2017⁴⁶. Apabila ditinjau dari sudut pandang program keahlian (PK), kekurangan terbesar terjadi pada Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata, baik dari sisi jumlah maupun persentase kekurangan guru. Selanjutnya dari kedua sisi tersebut disusul oleh PK Kuliner. Kekurangan jumlah GMP pada kedua PK ini merupakan 76 persen dari seluruh kekurangan GMP pada Bidang Keahlian Pariwisata program 3 tahun. Pada posisi

⁴⁵ Ditjen GTK (2017a). *Penataan, Pemerataan, dan Pemenuhan Guru Pendidikan Menengah*. Bahan paparan Dit. Pembinaan Guru Pendidikan Menengah.

⁴⁶ Ditjen GTK (2017b). *Pedoman Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik Bagi Guru SMK/SMA (Keahlian Ganda) Angkatan 2*. (Paparan PowerPoint)

ke tiga dan ke empat kekurangan GMP-nya masing-masing sekitar 500 orang saja. Namun demikian, karena jumlah GMP KK Tata Busana yang tidak besar, maka kekurangan tersebut cukup bermakna, karena merupakan 44 persen dari jumlah GMP yang seharusnya ada.

2) **Beban kerja GMP yang ada saat ini**

a) **Beban kerja GMP yang ada karena kekurangan jumlah GMP**

Guru mapel produktif (GMP) adalah guru yang bertugas menyiapkan siswa agar memiliki kompetensi khas tertentu, dan guru tersebut memiliki dua fungsi yakni sebagai pengajar teori dan sebagai instruktur atau pembimbing praktik. Dari sudut pandang ketersediaan dan beban kerja GMP pada saat ini mengalami masalah utama kekurangan jumlah. Kekurangan jumlah ini berdampak pada menumpuknya beban kerja guru.

Kekurangan yang sangat besar jumlah GMP tersebut, menjadikan beban kerja GMP luar biasa berat. Kekurangan jumlah GMP seluruh SMK Pariwisata, atau lebih tepatnya Bidang Keahlian Pariwisata, mencapai 38 persen dari jumlah GMP yang seharusnya ada. Kekurangan jumlah sebesar ini menjadikan seluruh beban kerja pembelajaran ditanggung oleh hanya 62 persen GMP yang ada. Artinya beban kerja GMP seluruh KK pada SMK Pariwisata bertambah berat hampir sebesar 50 persen dari beban kerja yang seharusnya ada⁴⁷. Beban kerja terberat dirasakan oleh GMP Bidang Keahlian Prehotelan dan Jasa Wisata yang kekurangannya mencapai 51 persen dari GMP yang seharusnya ada. Kekurangan ini menjadikan seluruh beban kerja pembelajaran ditanggung oleh hanya 49 persen GMP yang ada. Artinya beban kerja GMP seluruh KK pada SMK Pariwisata bertambah berat hampir sebesar 104 persen dari beban kerja yang seharusnya ada, atau meningkat menjadi lebih dari 2 kali beban kerja yang seharusnya ada.

Beban kerja masing-masing GMP BK ini adalah 51 persen lebih tinggi dibanding beban kerja normal bila tidak terjadi kekurangan guru. Beban kerja GMP adalah 40 jam/minggu yang meliputi 37,5 jam kerja efektif. Apabila kekurangan jumlah GMP BK ini mencapai separuh dari jumlah GMP

⁴⁷ 100 persen beban kerja ditanggung oleh 68 persen GMP = meningkat 47 persen.

yang seharusnya ada, maka beban kerja GMP dari pelaksanaan kegiatan pembelajar tatap muka (teori dan praktik) saja mencapai 56,25 jam/minggu atau setara 75 jampel/minggu. Pada sistem sekolah 5 hari, maka beban jam kerja efektif GMP pada kenyataannya mencapai setara 15 jampel/hari. Perhitungan ini di luar beban kerja untuk persiapan pembelajaran dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang juga menjadi tugas mereka.

Beban kerja tersebut tidak sekedar hitungan di atas kertas. Kasus GMP KK Kuliner di salah satu SMK menyatakan bahwa jadwal harian pembelajarannya baru berakhir pada jam ke 15. Namun demikian, beban kerja guru tersebut tidak selesai dengan selesainya pelaksanaan praktik siswa. GMP harus membersihkan ruang praktik dan menyiapkan peralatan dan bahan praktik untuk praktik berikutnya, karena tidak adanya jabatan petugas bengkel atau laboran pada pembelajaran praktik di SMK. GMP harus melaksanakan semuanya, dari penyiapan bahan dan peralatan praktik, menjelaskan siswa tentang prosedur praktik, membimbing siswa melaksanakan praktik menggunakan bahan serta peralatan dan mesin yang ada, membersihkan ruang praktik, sampai penyiapan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan praktik berikutnya. Akibatnya setelah selesai melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, GMP Kuliner tersebut baru pulang pada pukul 19:00 wib, setiap hari sepanjang semester.

Dengan beban kerja sebanyak itu, seorang GMP yang kompeten sekalipun, hanya dari analisis aspek beban kerja saja, tidak mungkin dapat membimbing praktik siswa secara optimal. Bukan karena tidak mampu atau kurang kemauan, namun karena pembebanan yang tidak manusiawi. Apabila dibandingkan dengan pekerja pabrik, hari kerja standar mereka hanyalah 8 jam, artinya bila masuk bekerja pada pk. 07:00 maka pekerja tersebut pulang pada pukul 15:00. Lebih dari itu ada hitungan uang lembur. GMP tersebut harus sudah mulai bekerja pada pukul 07:00 pulang pada pukul 19:00, bekerja 12 jam @ 60 menit tanpa uang lembur.

Ketika ditemukan bahwa menurut penilaian para pelaku industri ternyata kompetensi karyawan baru lulusan SMK Pariwisata kompetensinya tidak memuaskan, maka ada kemungkinan salah satu penyebabnya bukanlah GMP yang tidak kompeten. GMP-nya berkompotensi maksimalpun,

kalau harus mengajra 15 jampel sehari pasti kelelahan, dan ini menyebabkan pembelajaran praktik tidak optimal. Karena ia bekerja lebih berat dari buruh yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan⁴⁸.

Peraturan bahwa jam kerja efektif guru, termasuk GMP, adalah 37,5 jam atau setara 50 jampel/minggu atau 10 jampel/hari untuk Sekolah 5 Hari ini sebenarnya bukan jam tatap muka saja⁴⁹. Beban kerja guru tersebut terdiri dari 5 komponen. Kelima komponen tersebut – selain merencanakan dan menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan melekat -- bagi GMP SMK meliputi 2 kegiatan besar yakni (i) melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, serta (ii) membimbing dan melatih siswa. Sedangkan tugas-tugas tambahan, yang relevan untuk GMP SMK, adalah waka satuan, kapro keahlian, wali kelas, kepala-kepala perpustakaan, laboratorium, bengkel, unit produksi, TEFA, pembina-pembina OSIS dan ekskul, serta para koordinator PKB dan PKG.

Sebenarnya menurut peraturan tersebut jam kerja efektif guru tidak hanya dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, yang untuk GMP terdiri dari kegiatan tatap muka untuk pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan siswa. Oleh sebab itu beban kerja efektif selama setara 50 jampel/minggu atau 10 jampel/hari tersebut juga meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan dan penilaian hasil pembelajaran, serta tugas tugas khusus memangku berbagai jabatan di SMK.

Dengan demikian beban kerja GMP yang sangat berlebihan, sebagaimana salah satu contohnya ditemukan pada GMP KK Kuliner dari salah satu SMK Pariwisata tersebut disebabkan oleh kekurangan jumlah GMP. Dengan adanya kekurangan jumlah GMP dan banyaknya rombel paralel, maka untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif, GMP tersebut harus bekerja sangat keras.

⁴⁸ UU no. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ps. 7 ayat 1: lama bekerja pada sistem kerja 5 hari adalah 8 jam/hari atau 40 jam/minggu. Memang untuk ASN tidak berlaku UU ini tetapi **ASN adalah tenaga kerja juga**.

⁴⁹ Permendikbud no. 15 th. 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru

Karena beban berlebihan terhadap GMP yang berkompeten sekalipun menjadikan kelelahan guru yang berdampak pada kurang-optimalan pembelajaran yang berujung pada kekurangan kompetensi lulusan maka demi menghasilkan lulusan yang berkompeten harus dilaksanakan upaya bijak berikut. Upaya ini berupa pengurangan jumlah rombel pada kelas paralel. **Artinya target peningkatan jumlah siswa SMK perlu diredam dengan keinginan menghasilkan lulusan yang berkompeten.** Dengan kata lain, **rendahnya kompetensi siswa nampak disengaja apabila yang dikejar hanya prestasi kuantitatif jumlah siswa SMK.**

- b) Jumlah siswa per rombel yang terlalu besar namun pola pembimbingan praktik melalui *team teaching* tidak diakui sebagai pelaksanaan tugas mengajar oleh sistem Dapodik

Beban kerja tersebut menjadi semakin berat dengan peraturan jumlah siswa per rombel yang mencapai 36 siswa⁵⁰ dan dihapuskannya sistem *team-teaching* dalam kriteria pengakuan Dapodik, terhadap pelaksanaan tugas guru, sejak tahun 2011⁵¹. Para GMP menyatakan adanya dua masalah yang disebabkan oleh pengampuan siswa dalam jumlah yang terlalu banyak. Masalah pertama adalah sulitnya membimbing siswa yang sudah beranjak remaja apabila jumlahnya sangat banyak dalam melaksanakan praktik. Pelaksanaan praktik dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, terutama ketika menggunakan peralatan, apalagi pada praktik memasak pada KK Kuliner, berdampak pada perhatian guru terhadap masing-masing siswa menjadi kurang memadai. Bukan karena guru praktiknya kurang perhatian, melainkan karena perhatian yang dimilikinya harus dibagi kepada terlalu banyak siswa. Kesulitan ini berdampak pada kualitas proses pembelajaran, yakni individu siswa tidak memperoleh perhatian khusus pada proses pembelajaran yang dilaksanakan, sehingga

⁵⁰ Permendikbud no. 17 th. 2017 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK atau yang sederajat. Ps. 24.

⁵¹ Team Teaching Tidak Diperbolehkan. http://datadapodik.com/kontenweb/modul/download_dapodik.php?id_berita=142

memungkinkan terjadinya kesalahan dalam proses yang tidak terdeteksi oleh guru.

Masalah ke dua ketika jumlah siswa dalam satu rombel terlalu besar merupakan masalah yang menjadi konsekuensi dari keterbatasan jumlah peralatan praktik. Pelaksanaan praktik yang benar menghendaki terdistribusinya satu peralatan secara merata untuk masing-masing siswa. Keterbatasan jumlah peralatan praktik, terutama peralatan yang besar, mengakibatkan kekurangan jumlah peralatan untuk digunakan oleh masing-masing siswa pada saat yang sama. Karena pelaksanaan praktik secara bertahap -- misalnya satu rombel dibagi menjadi dua, shift pertama dan shift ke dua, misalnya, agar setiap siswa menggunakan satu peralatan pada saat yang sama -- tidak memungkinkan karena keterbatasan jumlah jam pelajaran, maka digunakan praktik secara berkelompok. Dampak dari pelaksanaan praktik berkelompok ini adalah tidak meratanya kesempatan siswa menggunakan peralatan besar.

Kenyataan yang sering terjadi adalah satu siswa memperoleh kesempatan mengoperasikan peralatan, sedangkan siswa lainnya dalam kelompok tersebut hanya menonton saja, tidak memperoleh kesempatan mempraktikkan penggunaan peralatan tersebut dalam konteks proses pembuatan suatu produk. Artinya kualitas pembelajaran praktik menjadi rendah, sehingga kompetensi dasar yang dikuasai siswa dari pelaksanaan praktik di sekolah menjadi tidak memadai. Akumulasi dari tidak dikuasainya berbagai kompetensi dasar adalah tidak dicapainya kompetensi minimal oleh siswa ketika melaksanakan praktik di industri melalui PKL atau prakerin.

- c) Beban belajar siswa menurut struktur kurikulum yang hiper-optimistis (pelaksanaan PKL yang tidak dimasukkan dalam struktur kurikulum dan pembelajaran pada semester 6 ketika terdapat 3 ujian akhir) atau beban pembelajaran yang terlalu banyak

Analisis beban guru ini dilakukan juga pada analisis pelaksanaan pembelajaran praktik (atau analisis sarana dan prasarana), namun penegasan pada dampak struktur kurikulum terhadap beban GMP perlu ditegaskan di sini.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa beban pembelajaran di SMK terlalu banyak⁵².

Sebagaimana dikemukakan dalam temuan pelaksanaan pembelajaran praktik, terdapat indikasi dua unsur ketidakjujuran perancang kurikulum yang diamini oleh pembuatan kebijakan struktur kurikulum SMK. Indikasi tersebut berbasis analisis dengan dua asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa setidaknya sebagian dari penyusun kurikulum SMK memiliki pengalaman menjadi guru mapel produktif SMK. Asumsi ke dua adalah bahwa seluruh penyusun memiliki kerangka logika yang runtut, yakni bahwa untuk terlibat dalam pelaksanaan proses produksi di industri, yang merupakan praktik lanjutan, diperlukan kompetensi keterampilan minimal agar dapat mengikuti pelaksanaan pekerjaan di industri sebagai kesempatan peningkatan kompetensi penggunaan peralatan dan bahan di industri.

Kedua ketidakjujuran tersebut adalah, pertama, tidak dicantumkan pelaksanaan prakerin atau PKL dalam struktur kurikulum. Ke dua, dijadwalkannya proses pembelajaran dalam struktur kurikulum pada saat siswa dan guru melaksanakan proses ujian-ujian akhir. Ke tiga, jumlah mapel per mapel Kelompok C justru meningkat pada Kelas XII, termasuk Semester 6 yang juga berisi 3 ujian akhir.

Tidak dicantumkan kegiatan prakerin atau PKL dalam struktur kurikulum menjadikan penyusun kurikulum sendiri terkecoh, namun GMP di lapangan tidak. Agar dapat mengikuti pelaksanaan pekerjaan di industri, yang dianggap sebagai pembelajaran praktik lanjutan, diperlukan penyiapan siswa di sekolah sebelum siswa berangkat untuk mengikuti prakerin. Prakerin atau PKL pada umumnya dilaksanakan selambat-lambatnya sampai dengan pertengahan Semester 5 untuk memberikan kesempatan siswa mengatur diri menyiapkan ujian-ujian akhir di Semester 6⁵³. Ini berarti bahwa prakerin atau PKL selama 6 bulan harus dimulai selambat-lambatnya pada pertengahan Semester 4. Konsekuensinya adalah bahwa pembelajaran praktik yang

⁵² Walau tidak harus secara simplisistik disimpulkan perlunya perpanjangan waktu SMK setahun lagi

⁵³ Terdapat 3 ujian akhir di SMK, yakni Ujian Kompetensi Keahlian, Ujian Sekolah, dan Ujian Nasional atau asesmen akhir.

dijadwalkan selama 4 semester harus dimajukan, sehingga dapat berakhir selambat-lambatnya pertengahan semester tersebut, agar selanjutnya siswa dapat melaksanakan pembelajaran praktik di dunia kerja melalui pakerin/PKL.

Untuk itu masing-masing GMP pada setiap semester memiliki beban mengajar 2 kali lipat, yakni pada semester gasal mengajar teori dan praktik untuk semester gasal (semester 5) Kelas XII yang dimajukan dan semester gasal (semester 3) Kelas XI. Pada semester genap mengajar teori dan praktik untuk semester genap (semester 6) Kelas XII yang dimajukan dan semester genap (semester 4) Kelas XI, ditambah dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ketiga jenis ujian akhir.

d) Beban kerja tambahan guru

GMP mempunyai beban kerja tambahan, yakni beban administrasi dan tugas tambahan sekolah yang berasal dari Direktorat PSMK. Beban administrasi meliputi beban kerja administrasi dalam menyiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan tugas mendidik per mapel.

Kedua beban kerja tambahan tersebut adalah sebagai berikut. Beban kerja tambahan pertama adalah beban administrasi GMP dalam menyiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan tugas mendidik per mapel. Beban kerja tambahan ke dua adalah banyaknya tugas tambahan kepada GMP yang berasal dari pemberian program-program Direktorat PSMK, terkait upaya peningkatan mutu, kepada sekolah. Memperoleh program tersebut, kecenderungannya program-program ini menjadi beban GMP. Terdapat dua faktor yang menjadikan pelaksanaan program tersebut membebani GMP. Faktor pertama adalah kepala sekolah cenderung menetapkan bahwa program-program tersebut diurus oleh GMP. Faktor ke dua adalah tidak adanya visi guru mapel muatan nasional dan muatan kewilayahan (kelompok A dan B, dulu mapel-mapel adaptif dan normatif) dan tenaga kependidikan bahwa mereka merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari SMK tempat tugasnya. Akibat kesalahan cara pandang ini maka mereka enggan terlibat dalam pelaksanaan program-program peningkatan mutu SMK dari Direktorat yang dipercayakan ke sekolah karena merasa bahwa beban kerja itu bukan urusan mereka. Niat baik Dit. PSMK meningkatkan kualitas pembelajaran di atas pengorbanan

GMP dengan adanya beban kerja administratif yang seharusnya bukan beban guru.

- e) Kekurangan GMP yang akut cenderung menjadikan tugas-tugas melekat dari PPDB sampai ujian akhir tidak dihitung sebagai jam kerja

Tidak dihitungnya tugas-tugas melekat, yang menurut peraturan dari Pemerintah, dihitung ekuivalensinya dengan jam pembelajaran tata muka, tetapi tidak dihitung lagi, jelas memperberat beban kerja GMP. Tugas-tugas ini misalnya wali kelas dan kaprodi (beban kerja selama 6 semester), serta panitia/penguji untuk ke-3 ujian akhir, dan panitia PPDB (beban kerja di Semester 6, PPDB pada masa liburan sekolah sebelum tahun ajaran baru).

Beban pekerjaan guru menjadi sangat berat apabila kelima sumber pembebanan kerja tersebut terjadi bersamaan. Dalam kondisi ini, analisis kuantitatif ini menunjukkan bahwa apabila hal-hal ini terjadi bersamaan, GMP dengan kualitas atau kompetensi maksimalpun sulit untuk melaksanakan pembekalan praktik secara optimal sehingga siswanya menguasai kompetensi minimal untuk mengikuti pembekalan kompetensi praktik lanjutan melalui prakerin atau PKL di dunia kerja. Apalagi apabila dari sisi kualitas tidak semua GMP memiliki kualitas maksimal yang disyaratkan.

3) Upaya yang telah dilakukan akhir-akhir ini

Untuk mengatasi itu kekurangan GMP tersebut, melalui upaya cepat (*crash program*) diselenggarakan *retraining* guru mapel-mapel bukan-produktif, melalui Program Keahlian Ganda (PK Ganda) dalam dua angkatan yang telah menghasilkan tambahan 22.380 GMP untuk 51 paket keahlian⁵⁴. Angkatan pertama dilakukan untuk memberi keahlian ke dua bagi para guru SMK kelompok mapel normatif, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia agar dapat membimbing siswa SMK melaksanakan praktik mengelas, misalnya. Penambahan kompetensi keahlian kepada guru-guru mapel

⁵⁴ Jumlah Guru Produktif di SMK Meningkat. Dalam <https://edukasi.kompas.com/read/2018/05/03/07000081/jumlah-guru-produktif-di-smk-meningkat>. Diunduh 1 Agustus 2019

normatif ini dinilai tidak berhasil. dan pada angkatan kedua program ini diikuti oleh guru-guru mapel adaptif, misalnya fisika disertai penyempurnaan sejumlah komponen termasuk lamanya program. Namun demikian program ini dihentikan pada angkatan ke dua, karena kompetensi GMP yang dihasilkan tidak memadai.

Upaya ke dua adalah perekrutan calon GMP yang berasal dari lulusan program S1 murni. Upaya ini bertolak dari keluhan kekurangan kompetensi kejuruan (maksudnya bukan kompetensi pedagogis) lulusan LPTK yang dikeluhkan, terlepas dari kenyataan sangat beragamnya kualitas LPTK negeri dan swasta yang jumlahnya ribuan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa lulusan program S1 murni, yang menurut KKNi berada pada Level 6, pasti menguasai semua kompetensi lulusan SMK, yang hanya berada pada Level 2. Perencana program perekrutan tersebut nampaknya tidak menyadari bahwa lulusan dengan kompetensi Level 6 memang dirancang untuk tidak memiliki setumpuk kompetensi sebagai operator, yakni Level 2. Hal yang terjadi adalah bahwa sebagian besar dari lulusan program S1 murni yang direkrut tersebut tidak mampu mengajarkan keterampilan sebagai operator karena memang mereka tidak belajar untuk menjadi operator. Dari sumber-sumber yang layak dipercaya para guru yang telah berstatus calon-ASN hasil perekrutan tersebut dikirim ke P4TK untuk belajar mengoperasikan peralatan dan mesin kerja agar mereka mampu mengajarkan pengoperasian mesin dan peralatan kerja kepada siswa SMK yang harus diajarnya.

Tidak berhasil dilahirkannya GMP yang berkompeten ini mungkin juga terjadi pada pengadaan tahun-tahun sebelumnya yang merekrut lulusan dari berbagai LPTK dan perguruan tinggi umum, negeri dan swasta. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi ini cenderung menyiapkan lulusannya dengan koordinasi minimal dengan pembina sektor dan pelaku sektor pariwisata (kalaupun ada koordinasinya) pada kondisi LPTK yang kurang optimal dalam membekali kompetensi kejuruan bagi calon GMP yang diandalkan untuk menyiapkan lulusan SMK yang memiliki level kompetensi operator menurut KKNi. Kekurangoptimalan ini dipengaruhi oleh 3 hal, yakni kekurangan dosen berpengalaman industri pariwisata, kalaupun ada, kekurangan bahan dan peralatan praktik, dan juga biaya operasional penyelenggaraan praktik bagi calon guru SMK secara sendirian.

4) **Indikasi tingkat kompetensi GMP yang ada**

Guru mapel produktif (GMP), atau dapat disebut juga instruktur, memiliki tugas utama melaksanakan pembimbingan praktik kepada siswa agar memiliki kompetensi khas tertentu, baik untuk mencari pekerjaan maupun menciptakan pekerjaan baru. GMP diharuskan menguasai ketiga aspek penanaman kompetensi siswa yang meliputi setidaknya tiga aspek, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Khusus untuk menyiapkan siswa agar mampu menyiapkan lapangan kerjanya sendiri, melalui Mapel PKK, diperlukan kemauan siswa untuk melaksanakan proses kreatif dalam menentukan produk apa yang akan dibuat, baik produk barang maupun produk jasa. Namun kenyataannya belum semua GMP memiliki kompetensi yang diperlukan. Hal ini diindikasikan oleh contoh-contoh kasus berikut.

Pada kasus GMP Laundry pada KK Perhotelan di sebuah SMK Pariwisata ditemukan bahwa guru tidak memberikan keterampilan mencuci menggunakan mesin cuci yang disediakan di hotel sekolah (edotel) dengan menggunakan deterjen khusus. Alasan yang digunakan adalah deterjen tersebut harganya mahal, padahal ketika dicek siswa di toserba, harga deterjen tersebut hanya puluhan ribu rupiah saja. Walhasil, siswa tidak melaksanakan praktik mencuci dengan menggunakan mesin cuci standar industri tersebut.

Pada kasus GMP Pengolahan dan Penyajian Makanan (PPM) di sebuah SMK di suatu provinsi ditemukan bahwa GMP tidak melakukan penanaman sikap yang seharusnya dilakukannya. Salah satu temuan dari ke-5 lokasi verval yang kadang dianggap sederhana, namun tidak mencerminkan penanaman karakter kerja, adalah sebagai berikut. Pertama, pada waktu praktik PPM, siswa hilir mudik bergantian belanja bahan praktik yang terlupa belum disiapkan. (Pada jam praktik siswa bergantian di suruh pergi ke luar sekolah untuk membeli bahan praktik: ada yang disuruh ke pasar beli terigu, ada yang disuruh ke gerai “xxMart” untuk membeli gula pasir yang belum terbeli, siswa lain disuruh membeli telur ke warung dekat sekolah. Ke dua, GMP memakai sandal jepit ketika membimbing praktik siswa di dapur sekolah, sementara standar prosedur operasional SOP praktik di dapur mengharuskan siswa dan guru memakai safety shoes.

Kedua temuan tersebut mengindikasikan bahwa GMP/instruktur kurang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam menyiapkan lulusannya agar memiliki keterampilan dan sikap kerja sebagai

calon pekerja. Kasus pertama mengindikasikan bahwa GMP meremehkan pentingnya memberikan keterampilan dasar di sekolah yang nantinya ditingkatkan dengan pelatihan lanjutan melalui prakerin atau PKL di industri. Apabila tingkat penguasaan keterampilan dasar tidak memadai maka keterampilan yang dikuasai siswa lebih rendah dibanding dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai siswa untuk mengikuti pelatihan lanjutan di industri. Akibatnya adalah bahwa siswa tidak menguasai keterampilan yang diharapkan oleh dunia kerja untuk dikuasai oleh pencari kerja atau pencipta lapangan kerja baru.

Kasus ke dua mengindikasikan bahwa penanaman sikap kerja tidak dilaksanakan dengan baik. Nampaknya GMP menganggap “ringan” atau menyepelekan pembiasaan sikap yang salah ketika seharusnya ia melakukan pembentukan sikap kerja yang benar melalui pembiasaan-pembiasaan. Ia tidak menyadari bahwa pembentukan sikap tidak dapat dilakukan hanya dengan memberitahukan saja, sementara guru sendiri mencontohkan sikap yang salah. Melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dianggap kecil karena ia tidak mengetahui bahwa sikap kerja yang tepat merupakan keharusan di industri. Guru tidak menganggap pelanggaran ini serius karena ia sendiri tidak memiliki pengalaman kerja di industri atau setidaknya pengalaman secara memadai dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya di industri.

Selanjutnya, kekurangan kompetensi khusus dalam penyiapan siswa untuk menciptakan lapangan kerja melalui Mapel PKK⁵⁵. Penyiapan calon pencipta lapangan kerja ini berangkat dari kerangka berfikir bahwa agar dapat menciptakan pekerjaan, diperlukan kreatifitas siswa dalam menciptakan produk sehingga terciptalah produk kreatif yang dihasilkan dari proses kreatif siswa. Kelemahan ini juga ditemukan pada dua kasus SMK Pariwisata.

Kasus pertama adalah bahwa siswa KK Perhotelan ditugaskan oleh gurunya untuk membuat bunga pada mapel PKK. Siswa kebingungan mencari hubungan antara produk bunga yang dibuatnya dengan keterampilan kerja terkait perhotelan pada kelima mapel Kelompok C3. Pelajaran yang dipetik dari kasus ini adalah siswa tidak diberi kesempatan untuk melakukan proses

⁵⁵ PKK: Produk Kreatif dan Kewirausahaan

kreatif dalam menentukan produk yang dibuatnya, sehingga mereka bingung.

Kasus ke dua adalah siswa KK Perhotelan ditugaskan oleh gurunya untuk secara berkelompok menjual 5 jenis produk jasa terkait mata pelajaran Kelompok C3 yang diterimanya. Produk-produk jasa tersebut a.l. adalah pembersihan rumah, pembersihan sepatu, pembersihan helm yang mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui Mapel House Keeping dan Mapel Laundry.

Kedua kasus ini memiliki perbedaan dan kesamaan. Perbedaannya adalah bahwa pada kasus pertama, produk yang dibuat tidak ada hubungannya dengan keterampilan yang diperoleh melalui satu mapelpun. Sedangkan pada kasus ke dua, produk-produk jasa yang dijual mempunyai hubungan dengan mapel Kelompok C3 yang ada. Kesamaannya adalah bahwa keduanya tidak memberikan latihan atau kesempatan kepada siswa untuk melakukan proses kreatif dalam menentukan produk yang dibuatnya. Dalam hal ini gurulah yang kreatif dalam menemukan produk yang harus dibuat oleh muridnya.

Hal-hal sejalan dengan penilaian para pelaku industri yang pada umumnya menyatakan bahwa kompetensi lulusan SMK pariwisata dari berbagai bidang keahlian cenderung tidak memuaskan. Hal ini dinyatakan baik oleh pelaku industri penyedia kesempatan kerja maupun pelaku industri yang merupakan pelaku wirausaha. Mereka a.l. menyatakan bahwa lulusan “gamang”, tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan bahkan ada yang menyatakan bahwa dari sisi pengetahuan saja tidak memadai ketika harus melaksanakan tugas di industri yang dimasukinya sebagai pekerja baru. Pelaku industri pariwisata menyesalkan ketidakserius siswa menyerap ilmu kewirausahaan di tempat mereka melaksanakan prakerin atau PKL.

Alternatif pola pemenuhan kebutuhan GMP

Pemenuhan kebutuhan GMP berkompeten, termasuk pelaksanaan fungsi selaku instruktur, berpengalaman industri dapat ditinjau dari 2 sisi, jangka waktu dan status guru. Dari sisi jangka waktu, pemenuhan tersebut dapat dikelompokkan menjadi pemenuhan jangka panjang dan mendesak jangka pendek, sedangkan dari sisi status guru, pemenuhan dikelompokkan menjadi dua, ialah guru tetap dan guru tidak tetap. Pemenuhan kebutuhan jangka panjang dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan guru tetap dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek dilakukan melalui perekrutan guru tidak tetap dan retraining guru yang ada yang kurang termanfaatkan secara maksimal.

Pemenuhan guru tetap yang memerlukan waktu penyiapan panjang melalui pendidikan khusus calon GMP baru

Upaya penyiapan calon GMP baru ini hendaknya dilakukan dengan menggunakan demand driven supply, atau prinsip intervensi pasokan GMP baru (supply) yang memperhatikan kebutuhan aktual masing-masing SMK akan GMP (demand). Kebutuhan tersebut tidak hanya meliputi kebutuhan dari aspek kuantitatif, yakni jumlah guru yang diperlukan, namun juga lebih-lebih aspek kualitatif, yakni kompetensi masing-masing GMP yang dihasilkan, terutama dalam perannya sebagai instruktur praktik.

Pendidikan khusus calon GMP baru selama ini dilaksanakan dengan berbagai metode. Metode-metode tersebut a.l. program Diploma III berbeasiswa dan ikatan dinas yang dilaksanakan dengan kerjasama Kemdikbud dan Kemenpar, dengan koordinasi Kemenpan/BKN untuk pengangkatannya; Program Diploma III berbeasiswa dan ikatan dinas yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja di lingkungan Kemdikbud sendiri, Program S1 berbeasiswa tanpa ikatan dinas yang dilaksanakan oleh PT Pariwisata, dan program S1 yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara program pariwisata dan PT Pariwisata. Secara ringkas masing-masing disajikan sebagai berikut.

Penyiapan guru mapel produktif untuk pendidikan menengah pariwisata untuk pertama kalinya, yakni Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP, sekarang SMK Bidang Keahlian Pariwisata), dilaksanakan dengan melibatkan 3 pengelola sektor, yakni pendidikan (Kemdikbud), pariwisata (Kemenpar), dan kepegawaian negeri (Kemenpan dan BKN). Program yang dilaksanakan merupakan Program Diploma III berbeasiswa dan ikatan dinas, yakni lulusan program yang memenuhi untuk menjadi PNS (sekarang ASN) diangkat menjadi guru SMK berstatus PNS. Mahasiswa calon guru disaring dari 3 lulusan terbaik SMTK atau SMKK di masing-masing provinsi.

Program penyiapan guru kepariwisataan, yang dikenal dengan sebutan Program Diploma III Guru Pariwisata⁵⁶, ini dilaksanakan secara tandem oleh BPLP⁵⁷ (yang berevolusi menjadi STP dan saat ini menjadi Poltekpar) Nusadua Bali dan Bandung masing-masing dengan LPTK berkompeten, yakni masing-masing adalah FKIP Universitas Udayana (sekarang Undiksha) dan IKIP Bandung (sekarang UPI). Mahasiswa calon guru disaring dari 3 lulusan terbaik SMTK atau SMKK di masing-masing provinsi. Perbandingan materi keahlian kepariwisataan dan pedagogi adalah 70 dibanding 30, demikian juga perbandingan antara praktik dan teori. Pendidikan keahlian diserahkan pada Poltekpar, pendidikan pedagogi diserahkan pada LPTK. Para calon guru bidang pariwisata ini disiapkan kompetensi kepariwisataannya oleh pendidik ahli di bidang kepariwisataan dari STP yang memang berlatar belakang pekerjaan di industri pariwisata. Mahasiswa secara intensif mengikuti praktik di hotel dan biro perjalanan wisata, sesuai jurusannya. Penempatan mahasiswa untuk praktik di hotel dan biro perjalanan wisata terbaik dilakukan dengan mudah karena pengaruh pengelola sektor, yakni Kemenpar, disamping hubungan baik antara STP dan industri pariwisata.

Selain pendidikan keahlian kepariwisataan dan pendidikan pedagogi, program penyiapan calon guru ini memiliki dua karakteristik unggul lainnya. Pertama, untuk bekerja tidak hanya diperlukan pengetahuan dan keterampilan, namun juga karakter atau sikap kerja, dan ini semua harus diberikan oleh calon guru tersebut kepada siswanya nanti. Pekerjaan di bidang pariwisata, selain sikap atau karakter kerja pada umumnya, juga memerlukan karakter khusus yakni keramahtamahan (*hospitality*) yang tidak dapat ditafsirkan bekerja seenaknya karena justru *hospitality* menjunjung tinggi kedisiplinan. Penanaman karakter memang memerlukan waktu yang lama. Di Bali dan Bandung, yang merupakan daerah wisata, mereka dari ke hari hidup dalam suasana keramahtamahan, dan karakter kerja *hospitality* ini di bawa sampai mereka mengajar di sekolah masing-masing.

Karakter unggul lainnya adalah bahwa calon guru ini secara khusus memang disiapkan untuk menyiapkan siswa calon pekerja di industri pariwisata. Berdasarkan itu maka calon guru harus

⁵⁶ Supriadi, D., ed (2002). *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia: Membangun Manusia Produktif*. Jakarta: Depdiknas.

⁵⁷ Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata. SK Kemenhub no. 303/DL.005/PHB-81 tgl. 18 Desember 1981.

dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang kelak akan dilaksanakan siswanya setelah bekerja. Sebagai contoh, karena sebagian dari pekerjaan di hotel adalah sebagai pembersih kamar (*house-keeper*) yang lingkup kerjanya termasuk membersihkan kamar mandi, maka calon guru harus mampu juga melaksanakan pembersihan kamar mandi yang baik dan benar. Tidak cukup bagi calon guru untuk hanya diberi pengetahuan tentang bagaimana membersihkan kamar mandi, guru sendiri harus mampu melaksanakan pekerjaan pembersihan kamar mandi tersebut .

Dengan berbagai karakteristik tersebut, rekam jejak guru-guru mapel produktif pada program keahlian Perhotelan, UPW, dan Kuliner yang disiapkan dengan pola ini dinilai oleh rekan-rekan gurunya sangat memuaskan. Pola ini berlangsung selama 6 angkatan.

Untuk periode selanjutnya, GMP Bidang Keahlian Pariwisata diisi oleh lulusan S1 Pariwisata yang disiapkan oleh LPTK serta perguruan tinggi pariwisata umum atau PT umum yang membuka program pariwisata atau perhotelan (disingkat PT Pariwisata) yang diikuti oleh lulusan SMK maupun SMA pada umumnya, tanpa persyaratan “lulusan terbaik”. Namun demikian, PT Pariwisata cenderung membuka jurusan Manajemen Perhotelan atau Manajemen Pariwisata yang membekali lulusannya untuk menjadi manajer hotel atau manajer bidang pariwisata. Lulusan S1 Manajemen Perhotelan menguasai industri perhotelan, dan pengetahuan umum tentang masing-masing subbidang perhotelan, yakni *front-office*, *house keeping*, *laundry*, dan *food and beverage*. Berbagai pengetahuan umum ini tidak memadai untuk mengelola peningkatan pengetahuan, penanaman keterampilan, dan pembentukan sikap kerja pada masing-masing subbidang tersebut.

Selanjutnya, dari sisi kualifikasi menurut KKN⁵⁸ lulusan SMK berada pada Level 2 yakni operator. Operator-operator lulusan SMK mempunyai bidang yang beragam, menurut KK yang dimasukinya, yakni perhotelan, usaha perjalanan wisata, kuliner, busana, dan kecantikan. Di sisi lain, lulusan program S1 perguruan tinggi pada KKN berada pada Level 6 yakni teknisi atau analis. Kompetensi teknisi atau analis pada bidang pariwisata tidak merupakan penjumlahan kompetensi-kompetensi operator pada kelima bidang pariwisata tersebut.

⁵⁸ Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Keppres no. 8 th. 2012

Sehingga kompetensinya untuk membelajarkan siswa SMK menjadi operator ada masing-masing bidang tersebut tidak memadai, karena lulusan program S1 tersebut mengetahui secara umum, tetapi tidak memahami secara terinci.

Selanjutnya, agar dapat mendidik siswa memiliki keterampilan dan sikap kerja sebagai operator sesuai yang diperlukan di dunia kerja, diperlukan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan di dunia kerja senyatanya, sebagai operator, secara mencukupi. Dengan kepemilikan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sebagai operator ini, GMP mengetahui betul pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diharapkan di tempat bekerja.

- a) Pemenuhan GMP tetap yang memerlukan waktu singkat melalui *retraining* guru mapel bukanproduktif yang berlebihan jumlahnya

Sasaran *retraining* adalah guru mapel-mapel bukan-produktif melalui Program Keahlian Ganda (PK Ganda) dalam dua angkatan yang telah menghasilkan tambahan 22.380 GMP untuk 51 paket keahlian⁵⁹. Angkatan pertama dilakukan untuk memberi keahlian ke dua bagi para guru SMK kelompok mapel normatif, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia agar dapat membimbing siswa SMK melaksanakan praktik mengelas, misalnya. Pada angkatan kedua program ini mengalami perbaikan, yakni sarasannya adalah guru-guru mapel adaptif, misalnya Fisika, disertai penyempurnaan disain program termasuk lamanya program.

Program dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni pembekalan, program sertifikasi keahlian, dan program sertifikasi pendidik, dengan jumlah alokasi waktu total selama 11 bulan, di luar pembekalan dan uji sertifikasi pendidik ditambah jeda 1 bulan di antara kedua program sertifikasi⁶⁰. Pembekalan berlangsung selama 4 hari, program sertifikasi keahlian selama 26 minggu, dan sertifikasi pendidik selama 16 minggu. Pembekalan disebut juga in-service, berisi tinjauan ringkas materi PK Ganda dan penyiapan pelaksanaan langkah pertama program sertifikasi keahlian. Program

⁵⁹ Jumlah Guru Produktif di SMK Meningkat. Dalam <https://edukasi.kompas.com/read/2018/05/03/07000081/jumlah-guru-produktif-di-smk-meningkat>. Diunduh 1 Agustus 2019

⁶⁰ Ditto Ditjen GTK (2017b). *Penataan, Pemerataan, dan Pemenuhan Guru Pendidikan Menengah*. Paparan disusun oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah.

sertifikasi keahlian terdiri dari 2 langkah, yang disebut *on-service* dan *in-service*. Langkah pertama berupa pembelajaran mandiri di bawah bimbingan guru pendamping, sambil tetap melaksanakan tugas-tugas mengajar di sekolah masing-masing dan berlangsung selama 12 minggu. Langkah ke dua berisi 3 komponen, yakni pelatihan tatap muka di Sumber Belajar, yakni di SMK Pariwisata terpilih, praktik di industri selama 100 jam pelajaran, dan uji sertifikasi di LSP. Langkah ini dilaksanakan selama 14 minggu. Tahap ke tiga, program sertifikasi pendidik terdiri dari 4 langkah, yakni pendalaman materi, lokakarya, PPL, dan uji kompetensi guru.

Program ini dihentikan pada angkatan ke dua, karena kompetensi GMP yang dihasilkan dinilai tidak memadai. Sebagai contoh kasus, seorang guru pendamping -- yang merupakan guru senior dan ketua prodi (KK) di Pusat Belajar dan juga asesor LSP-P3 -- tempat peserta melaksanakan praktik mengajar Mapel House Keeping menilai bahwa kompetensi calon guru tersebut lebih rendah dibanding siswa Kelas XI.

Masalah pokoknya dapat dikelompokkan menjadi dua. Masalah pertama berasal dari rancangan program penyiapan keterampilan/keahlian kerja yang kurang memadai. Penyiapan yang terlalu singkat ini terdiri dari 3 komponen, yakni pelatihan tatap muka di Pusat Belajar (SMK) selama 410 jampel, praktik di industri selama 9,4 hari⁶¹, dan penguatan kompetensi keahlian dengan total waktu selama hanya 700 jampel atau 14 minggu langsung setelah belajar mandiri sambil tetap mengajar di sekolah masing-masing. Lebih banyak waktu yang digunakan untuk kompetensi pedagogi, yakni 16 minggu, untuk para guru yang sudah bersertifikat mengajar. Masalah ke dua berasal dari faktor peserta. Peserta sebagian besar adalah guru senior yang sebagian sudah sulit untuk merubah pola pikir (*mindset*)-nya. Selanjutnya, keikutsertaan bukan karena pilihan untuk menyesuaikan diri, tetapi lebih pada penunjukkan atasan.

⁶¹ Dihitung dari 100 jam pelajaran @ 45 menit dan sehari 8 jam @ 60 menit.

- b) Pemenuhan GMP tetap yang memerlukan waktu singkat melalui *jalur* perpindahan karier

Pola ke tiga adalah perekrutan tenaga ahli, level supervisor ke atas, dari industri pariwisata menjadi guru tetap atau guru honorer sewaktu. Perekrutan tenaga ahli dari industri sebagai instruktur honorer sewaktu ini sudah jamak dilaksanakan di SMK Kemaritiman, yang merekrut nakhoda atau sekelasnya ketika mereka sedang melaksanakan “cuti darat”. Cuti darat di kalangan pelaut ini adalah cuti dari bekerja di kapal, dapat berlangsung antara 6 bulan sampai 1 tahun. Para pelaut ini direkrut untuk menjadi instruktur honorer. Perekrutan ini didukung oleh peraturan baru tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)^{62,63,64, 65,66}.

Untuk sektor kepariwisataan, sistem cuti ini tidak ada. Pelibatan para pelaku industri pariwisata level supervisor ke atas kemungkinannya hanya dapat melaksanakan pekerjaan sebagai instruktur di SMK Pariwisata sambil melaksanakan pekerjaan di tempat kerja asalnya. Namun demikian pola ini nampaknya sulit dilaksanakan, mengingat guru PPPK disyaratkan untuk bekerja secara penuh waktu di sekolah.

Perekrutan pelaku industri pariwisata hanya dapat dilakukan apabila pelaku level supervisor ke atas ini ingin melakukan perpindahan karir pelaku industri pariwisata menjadi instruktur SMK Pariwisata. Guru tetap ini direkrut melalui pola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui pola ini pendidikan terakhir ditambah pengalaman kerja di industri pariwisata dari pelaku industri pariwisata dapat dikonversi menjadi jenjang pendidikan yang disyaratkan bagi pendidik SMK Pariwisata. Konversi tersebut dilakukan oleh Tim Khusus. Namun demikian, untuk melaksanakan perekrutan guru tetap SMK Pariwisata diperlukan keputusan Mendikbud terkait penggunaan pola RPL ini. Untuk instruktur politeknik kemaritiman telah diterbitkan

⁶² setkab.go.id/januari-pemerintah-mulai-rekrut-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja/

⁶³ UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁶⁴ PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

⁶⁵ PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

⁶⁶ Peraturan BKN no. 1 th. 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Kepmenristek Dikti tahun 2016⁶⁷ dan perekrutannya mulai dilaksanakan sejak tahun 2017⁶⁸.

Pindah karier dari industri pariwisata ke sekolah memungkinkan apabila penghasilan di SMK memadai. Untuk SMK Pariwisata negeri, tanpa kemungkinan menjadi ASN, nampaknya perpindahan jalur karier dari pelaku industri pariwisata aktif menjadi instruktur SMK sulit dilaksanakan. Untuk SMK Pariwisata swasta besar, pola RPL ini mungkin dilaksanakan apabila prospek penghasilannya memadai.

- c) Pemenuhan kebutuhan guru dengan pengangkatan guru tidak tetap yang dapat dilaksanakan dalam waktu singkat

Pengadaan guru tamu yang mengkombinasikan kebutuhan jangka panjang serta kemendesakan kebutuhan jangka pendek adalah guru tamu dari industri. Terdapat dua contoh program guru tamu yang sudah berjalan, yakni guru tamu dari asosiasi profesi IHGMA dan dari asosiasi profesi ICA. Guru tamu dari IHGMA adalah untuk memenuhi kebutuhan KK Perhotelan, sedangkan guru tamu dari ICA adalah untuk KK Kuliner dan KK Perhotelan. Untuk IHGMA, Guru Tamu merupakan program asosiasi bersama Kemenpar dalam program *One GM- One SMK*. Melalui program ini GM hotel diharapkan melakukan penyegaran wawasan dan pengetahuan siswa dan GMP melalui pengisian waktu pembelajaran. Program ini beragam dari 1 GM membantu 1 SMK, 1 GM membantu beberapa SMK, dan beberapa GM mendukung 1 atau beberapa SMK. Keterbatasan program ini meliputi, pertama belum meratanya keberadaan asosiasi ini di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, dan ke dua, kedatangan GM ke sekolah yang *transportnya* harus dibayar oleh sekolah. Contoh ke dua adalah guru tamu dari asosiasi *chef* ICA dalam program *ICA Goes to School*. Melalui program para *chef* melakukan dua jenis pengkinian, yakni kurikulum serta praktik yang tentu saja diperkaya dengan pengetahuan terkini. Dalam melaksanakan dukungannya terhadap SMK, guru tamu dari ICA ini tidak dibiayai kedatangannya oleh sekolah.

⁶⁷ Permenristek no. 26 th. 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau

⁶⁸ Surat Keputusan Dirjen Belmawa no. 23/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau

Kelas alumni (KA) sudah banyak dipraktikkan di banyak SMK Pariwisata, namun belum merata ke seluruh SMK. Mengingat keunggulan-keunggulan KA dibanding GT disarankan agar masing-masing KK melakukan inisiatif untuk mempererat komunikasi dengan alumni dan mengundangnya untuk menjadi penyaji dalam KA dengan masing-masing KK di SMK. Program-program GT dan KA perlu diagendakan dalam program tahunan atau program semester sekolah, sehingga dukungannya dalam pembelajaran dapat terwujud untuk masing-masing KD.

5) Peningkatan dan pengkinian kompetensi GMP yang ada

a) Perlunya pengkinian dan peningkatan kompetensi guru

Guru Mapel Produktif (GMP) adalah guru yang memiliki dua kompetensi, yakni mengajar teori dan membimbing praktik siswa (instruktur). Kekurangan kompetensi GMP dalam melaksanakan fungsi pembimbing instruktur praktik siswa inilah yang menjadi masalah umum pendidikan vokasi pada umumnya dan yang dibahas di sini adalah kekurangan kompetensi sebagai instruktur atau pembimbing praktik.

6) **Dari sudut pandang kompetensi** melaksanakan fungsi sebagai instruktur praktik, GMP dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sudah kompeten sejak lulus dan sejak menjadi guru, serta belum kompeten ketika lulus dan belum juga kompeten sampai saat ini. Peningkatan kompetensi GMP yang kurang kompeten yang telah dilaksanakan selama ini diasumsikan berhasil menjadikan mereka GMP yang kompetensinya sudah memadai. Namun demikian kesesuaian kompetensi tersebut tidak berlaku sepanjang masa.

7) **Industri pariwisata berkembang terus, termasuk penggunaan** teknologinya, sehingga pada suatu saat GMP yang kompetensinya sudah memadai dapat menjadi tidak memadai lagi. Pelapukan kompetensi ini juga berlaku untuk GMP yang ketika lulus dari PT-nya sudah kompeten. Pada suatu titik waktu GMP yang pada awalnya sudah kompeten akan menjadi tidak kompeten lagi karena berbagai perubahan di industri pariwisata tersebut.

Berkenaan dengan itu peningkatan dan pengkinian kompetensi GMP -- agar mampu menghasilkan lulusan

dengan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata, kompetensi – kapanpun lulusan itu dihasilkan, bukan kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan sekali selesai. Industri pariwisata selalu berubah, baik teknologi yang digunakan lingkungan industrinya. Akibat dari perubahan ini, maka persyaratan kompetensi minimal lulusan SMK yang akan bekerja selalu berubah. Apabila persyaratan kompetensi minimal lulusan SMK Pariwisata berubah, maka untuk menghasilkan GMP yang mampu menghasilkan lulusan semacam itu kompetensi GMP-nyalah yang harus dikinikan lebih dahulu. Dengan demikian, kompetensi GMP pariwisata harus selalu dikinikan sesuai dengan perkembangan industri pariwisata.

Nara sumber dari industri pariwisata di Sumut dan NTB menyatakan bahwa GMP pariwisata harus dikinikan setiap semester atau 2 kali dalam 1 tahun. Pernyataan ini dapat ditafsirkan bahwa GMP pada sejumlah mapel memiliki pengetahuan yang sudah kadaluwarsa, dan hal ini dapat berdampak pada ketidaksesuaian keterampilan dan sikap kerja yang dimilikinya terhadap pengetahuan/wawasan, keterampilan, dan sikap kerja di industri. Pengecekan yang dilakukan pada salah satu buku teks, edisi ke dua dari terbitan pertama tahun 2018, menunjukkan bahwa pengetahuan tentang praktik di perhotelan yang ditulis dalam buku teks tersebut, menurut penilaian Ketua Asosiasi SMK Pariwisata se Indonesia sudah kadaluwarsa k.l. 10 tahun.

Di sisi lain salah satu nara sumber GMP dari salah satu SMK apriwisat adi salah satu provinsi menyatakan bahwa pengkinian kompetensi dalam fungsi instruktur praktik yang terakhir diikutinya adalah 10 tahun y.l. Pengkinian tersebut tidak memperhitungkan pelatihan-pelatihan teoritis yang pernah diikutinya selama ini, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan pihak-pihak lain dengan biaya GMP itu sendiri.

Selain itu, GMP setidaknya perlu memiliki kompetensi dalam bahasa internasional secara aktif, setidaknya bahasa Inggris, ditambah dengan bahasa internasional ke dua. Bahasa Inggris diperlukan karena peristilahan dalam kepariwisataan umumnya menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, bahasa internasional ke dua diperlukan mengingat pengembangan sektor pariwisata dikaitkan

dengan pemerolehan devisa dari wisatawan mancanegara, maka dunia pariwisata erat juga hubungannya dengan bahasa internasional ke dua sesuai dengan mayoritas wisman yang datang ke provinsi yang bersangkutan.

b) Pelaksanaan peningkatan dan pengkinian kompetensi

(1) Peningkatan kompetensi GMP yang kompetensinya belum memadai

GMP yang belum berkompeten perlu meningkatkan kompetensinya sekaligus mengkinikannya. Berkenaan dengan ini maka GMP yang belum berkompeten harus melakukan kegiatan kerja di industri atau magang. Magang guru ini akan meningkatkan kompetensi guru yang semula belum berkompeten, karena setidaknya belum berpengalaman industri atau berpengalaman industri namun tidak mencukupi. Upaya ini dapat dianggap sebagai upaya inovatif⁶⁹ karena sebelumnya yang magang ke industri adalah siswa, yang dilaksanakan melalui prakerin.

(2) Pengkinian kompetensi GMP yang kompetensinya sudah memadai

GMP sudah memiliki kompetensi ketika lulus dan mulai bertugas juga perlu mengkinikan kompetensinya. Pengkinian ini perlu mengingat adanya perubahan teknologi yang diterapkan di industri pariwisata. Pengkinian tersebut dilakukan berupa magang di industri yang sesuai kompetensi yang dimilikinya.

Pengkinian tersebut hendakna perlu dilakukan secara berkala, tidak sekali mengkinikan cukup. Karena ada kasus seorang GMP senior lulusan PT Pariwisata ternama yang magang industrinya terakhir adalah 10 tahun y.l. Dikhawatirkan dalam waktu 10 tahun banyak perubahan yang terjadi sehingga ada kemungkinan, walau kesenjangannya tidak sebesar GMP yang kurang

⁶⁹ USep (2017) Pengelolalan Magang Guru Produktf SMK Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor berbasis Kemitraan dalam Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. XXIV, no. 1 April 2017. Hal. 173-181.

kompeten, namun kesenjangan tersebut dapat saja terjadi.

- (3) Masalah yang dihadapi dalam peningkatan dan pengkinian kompetensi melalui magang GMP

Dalam konteks ini perlu difikirkan adanya kemungkinan kesenjangan yang sangat besar antara pengetahuan dan wawasan, keterampilan menggunakan peralatan dan mesin, dan sikap kerja antara apa yang ada pada GMP dan yang nyatanya terjadi di industri di masa kini. Apabila kesenjangan tersebut memang sangat besar dapat terjadi dua hal negatif berikut.

Pertama, industri pariwisata tempat magang merasa terbebani karena kesenjangan terlalu besar sehingga terlalu banyak waktu yang digunakan untuk memberikan penjelasan awal kepada guru. Hal ini dapat dianggap mengganggu jadwal kerja industri. Ke dua, GMP yang mengikuti magang merasa ciut nyalnya dan ini dapat menjadikan ia bersikap negatif, sehingga tujuan magang dalam meningkatkan kompetensi guru tidak tercapai.

- (4) Aspek-aspek pengkinian kompetensi guru mapel produktif

- (a) Pengkinian kompetensi GMP secara berkelanjutan sebagai **upaya penjaminan mutu pendidikan SMK**

Peningkatan dan pengkinian kompetensi GMP yang tujuannya adalah memastikan bahwa kompetensi GMP Pariwisata selalu sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di industri pariwisata jelas merupakan upaya **penjaminan mutu (*quality assurance, QA*)**. Peningkatan kompetensi dan pengkinian kompetensi agar selalu sesuai dengan kemajuan industri pariwisata bukan sekedar kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan sepotong-sepotong.

QA adalah kegiatan-kegiatan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan pada sebuah sistem kualitas sehingga persyaratan kualitas untuk sebuah

layanan terpenuhi^{70,71}. Dengan kata lain QA adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa suatu organisasi menghasilkan layanan terbaik yang mungkin dihasilkan⁷². Apabila diterapkan ke SMK Pariwisata maka QA adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa SMK Pariwisata dapat menghasilkan lulusan yang berkompoten sesuai dengan tuntutan industri pariwisata.

Secara teoritis komponen QA untuk pendidikan meliputi: program pendidikan yang berkualitas bagus, guru berkompoten, dan proses pembelajaran berbasis kebutuhan siswa⁷³. Secara nyata QA untuk pendidikan vokasi pariwisata, yang sesuai dengan bahasan ini adalah instruktur yang kompetensinya selalu sesuai dengan perubahan teknologi dan lingkungan industri pariwisata.

Dari sudut penjaminan mutu maka **kegiatan pengkinian kompetensi** guru mapel produktif **menjadi lingkup wilayah kerja lembaga penjaminan mutu yang ada**, yakni Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). LPMP bertugas “ ... melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. ...”⁷⁴.

- (b) **Pengkinian kompetensi GMP secara berkelanjutan sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan guru**

Peningkatan dan pengkinian kompetensi GMP agar selalu sesuai dengan kemajuan industri pariwisata dapat dipandang sebagai merupakan **lingkup wilayah kerja lembaga pengembangan dan**

⁷⁰ What is Quality Assurance. <http://www.Project-management-skills.com> mengutip definisi dari American Society for Quality (ASQ).

⁷¹ Quality control, Quality assurance, systems and application. <https://www.academia.edu>

⁷² What is Quality Assurance? Process, Methods, Examples. <http://www.guru99.com>

⁷³ Components and principles of quality assurance. <https://ismuni.lt/en/activities/quality-assurance>

⁷⁴ Permendikbud no. 14 th. 2015 ps. 2.

pemberdayaan guru yang ada, yakni Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). P4TK bertugas “.... melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya.”⁷⁵. Fungsi P4TK adalah “ ... (i) mengelola data dan informasi serta memfasilitasi dan melaksanakan peningkatan kompetensi, (ii) melaksanakan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan, serta (iii) mengevaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, ...” (Pasal 3 butir b, c, d, e).

P4TK untuk bidang kejuruan terdiri dari 7 buah yang bertugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) pada ke-9 bidang keahlian SMK. Ketujuh P4TK terdiri dari bidang-bidang bisnis dan pariwisata, pertanian, seni dan budaya, mesin dan teknologi industri, otomotif dan elektronika, bangunan dan listrik, serta kelautan, perikanan, dan TIK.

P4TK Bisnis dan Pariwisata melayani pengembangan dan pemberdayaan PTK pada 2 bidang keahlian, yakni Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen (BKBM) dan Bidang Keahlian Pariwisata (BKP). Pada BKBM terdapat 7 kompetensi keahlian (KK) dan 91 mata pelajaran. Pada BKP terdapat 9 kompetensi keahlian (KK) dan 110 jenis mata pelajaran, termasuk PPK yang berada di kelompok mapel C3, artinya berbeda antar-KK. Dengan demikian satu P4TK ini bertanggungjawab dalam mengembangkan dan memberdayakan GMP seluruh SMK Pariwisata dan SMK Bisnis Manajemen di Indonesia.

⁷⁵ Permendikbud no. 16 th. 2015, ps. 2

b. Pembiayaan operasional praktik

1) Biaya operasional non-personal yang diperlukan

Biaya operasional (BOP) terdiri dari dua macam, yakni BOp personal dan BOp non-personal^{76,77}. BOp personal adalah biaya untuk membayar gaji atau honorarium pendidik dan tenaga kependidikan dan tenaga lainnya misalnya penjaga sekolah non-ASN. BOp nonpersonal adalah biaya yang digunakan untuk operasionalisasi sekolah di luar membayar gaji atau honorarium pendidik dan tenaga kependidikan dan tenaga lainnya.

Biaya operasional SMK sangat tinggi, termasuk SMK Pariwisata, termasuk yang dikeluarkan untuk BOp. Terdapat dua komponen BOp sekolah yang membedakan SMK, termasuk SMK Pariwisata, dari SMA, yakni kebutuhan biaya pengadaan bahan dan alat habis pakai dan biaya langganan daya listrik, yang sangat tinggi. Bahan dan alat habis pakai adalah bahan dan alat yang habis dipakai pada pelajaran praktikum pembelajaran. Sebagai contoh pada KK Kuliner adalah bahan praktik membuat roti, yakni tepung, gula, telur, mentega yang hanya dapat dipakai untuk satu kali praktik dan tidak dapat digunakan untuk praktik membuat roti lagi, karena bahan tersebut sudah berubah menjadi roti. Dalam praktik membuat roti, alat habis pakai misalnya alat kertas perak dan tisu yang setelah satu kali digunakan untuk membuat roti kedua alat tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi dalam praktik berikutnya. Pada KK Perhotelan dan UPW bahan praktik habis pakainya, a.l. adalah deterjen pada praktik pencucian (*laundry*) seprai tempat tidur, cairan pembersih ruangan lantai, dll. Pada KK Tata Busana bahan habis pakainya terutama adalah kain dan benang. Sedangkan pada KK Tata Kecantikan bahan habis pakainya a.l. adalah bahan-bahan perawatan muka, kulit lainnya, dan rambut.

Penggunaan daya listrik yang memerlukan biaya besar di SMK terutama digunakan untuk menghidupkan alat-alat praktik, bukan untuk penerangan dan pendinginan ruangan. Untuk KK Kuliner, alat-alat praktiknya yang berstandar industri hampir semuanya menggunakan daya listrik yang besar, dari pengaduk campuran tepung (*mixer*) apalagi oven. Untuk KK Perhotelan dan

⁷⁶ Ghazali, A (2012). Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Kebutuhan Dana untuk Pendidikan Dasar Gratis. *Cakrawala Pendidikan*. Februari 2012, th. XXXI, no. 1.

⁷⁷ Fattah, N (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Rosda Karya.

Pariwisata, mesin cuci kelas industri yang dimilikinya memerlukan daya listrik yang sangat tinggi.

Pemerintah telah menetapkan Standar Biaya Operasi NonPersonal tahun 2019 melalui permendiknas, termasuk untuk SMK Pariwisata. Standar BOp nonpersonal untuk masing-masing-masing kompetensi keahlian yang ada pada saat itu adalah sebagai berikut. Standar biaya terendah untuk setiap siswa per tahun adalah KK UPW sebesar Rp 1.830. Untuk KK Patiseri dan Restoran, yang pada tahun 2018 dilebur menjadi KK Kuliner, masing-masing adalah Rp 1.880 dan Rp 1.890. Untuk KK Akomodasi Pehotelan adalah Rp 1.920, dan Tata Busana Rp 1.850. Sedangkan untuk KK-KK Kecantikan Kulit dan Kecantikan Rambut, yang kemudian menjadi Tata Kecantikan pada tahun 2018, masing-masing adalah Rp 2.050 dan Rp 2.140.

Menggunakan perhitungan kasar ⁷⁸ berbasis permendiknas tersebut, ditemukan bahwa rerata BOp Nonpersonal SMK Pariwisata adalah Rp 4.605 per siswa per tahun pada tahun 2019⁷⁹. Dengan BOS yang sebesar Rp 1.600/siswa pada tahun 2019 maka biaya operasional yang diterima SMK Pariwisata hanya mendekati 35 persen dari kebutuhan. Berkenaan dengan itu sekolah harus mengupayakan sendiri kekurangan biaya sebesar 65 persen sisanya, atau Rp 3.005/siswa. Apabila ini tidak terpenuhi, dengan satu dan lain cara, maka resikonya adalah kualitas pembelajaran praktik akan menurun dan ini berdampak pada rendahnya kompetensi lulusan.

2) Resiko kekurangan biaya operasional nonpersonal

Resiko akhir dari kekurangan besar-besaran biaya operasional nonpersonal ini adalah menjadikan rendahnya kompetensi lulusan, sebagaimana diungkapkan oleh para pelaku industri. Hubungan antara kekurangan biaya operasional nonpersonal untuk melaksanakan praktik dasar di sekolah ini dengan kompetensi lulusan adalah sebagai berikut. Rendahnya kualitas dan kuantitas praktik dasar tersebut menjadikan kompetensi praktik dasar siswa tidak mencapai kompetensi

⁷⁸ Besarnya biaya pada Permendiknas th. 2009 ini diasumsikan adalah hasil perhitungan untuk tahun 2009. BOp kasar untuk tahun 2019 dihitung menggunakan rerata tingkat inflasi 7%/tahun dan proporsi siswa per KK sama besar.

⁷⁹ Dihitung reratanya untuk membandingkan kenyataan pemberian BOS yang dihitung rerata per siswa, tidak tergantung KK tempat belajar para siswa tersebut.

minimal yang diperlukan untuk mengikuti praktik lanjutan di dunia kerja pada waktu siswa mengikuti PKL.

Menghadapi kenyataan tidak terpenuhinya kompetensi dasar siswa untuk mengikuti praktik lanjutan di dunia kerja ini, sikap pengusaha dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah pengusaha yang sangat peduli dan bertanggungjawab terhadap pembentukan kompetensi siswa. Pengusaha pada kelompok ini akan berkorban sumber daya, tidak hanya waktu tetapi juga tenaga dan dana, untuk memberikan pembelajaran teori dan pengalaman praktik dasar kepada siswa di perusahaan. Pengurus DPP Asosiasi Kecantikan Tiara Kusuma menyampaikan bahwa salon yang dioperasikannya melakukan proses pembelajaran kepada siswa PKL sampai 4 bulan pertama dari waktu PKL 6 bulan. Pembelajaran ini dilaksanakan di ruang belajar khusus di luar salon. Pembelajaran yang diberikan mulai dari teori-teori dasar penting yang seharusnya sudah dikuasai di sekolah sampai pengenalan dan praktik dasar menggunakan alat-alat salon, yang seharusnya juga sudah dikuasai di sekolah. Baru setelah itu siswa mengikuti peningkatan kompetensi lanjutan. Pada bulan ke 5 siswa PKL mulai masuk ke salon untuk mengamati cara karyawan dalam menggunakan alat dan memperlakukan pelanggan.

Walaupun siswa mengikuti praktik lanjutan di perusahaan dengan bekal kompetensi yang sudah sesuai dengan kriteria minimal untuk praktik lanjutan, namun hasil pelaksanaan praktik lanjutan yang hanya 2 bulan tentu saja lebih rendah dari praktik lanjutan selama 6 bulan, apabila siswa PKL sudah menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar.

Kelompok ke dua adalah pengusaha yang menyilakan siswa yang kompetensi dasarnya tidak memadai tersebut langsung mengikuti proses kerja di tempat usaha, sebisanya siswa. Hal ini diakukan mengingat bahwa perusahaan tidak mempunyai cukup kelonggaran sumberdaya, tidak hanya waktu tetapi juga SDM dan dana, untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar sesuai dengan kriteria minimum untuk mengikuti proses kerja di situ. Apabila ternyata kekurangan kompetensi dasar tersebut terlalu besar, siswa tidak akan banyak memperoleh peningkatan kompetensi. Hal inilah a.l. yang menyebabkan terjadinya siswa hanya diberi kesempatan untuk PKL di salah satu jenis pekerjaan saja, tidak di beberapa jenis pekerjaan sebagaimana diminta oleh sekolah ketika menyerahkan siswa PKL-nya. Hasilnya dapat

diduga, walaupun siswa telah mengikuti PKL, kompetensinya tidak banyak meningkat dari kompetensi dasar. Inilah salah satu faktor yang berkaitan dengan rendahnya kompetensi lulusan.

3) Pencarian dukungan pembiayaan dari pemda

Penyelenggaraan SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi, namun demikian, ada atau tidaknya dukungan pemprov terhadap pembiayaan pendidikan SMK, termasuk SMK Pariwisata, beragam. Keragaman ini dipengaruhi oleh kepemilikan kemampuan dan komitmen finansial dalam mendukung pembiayaan pendidikan SMK, termasuk SMK Pariwisata di daerahnya.

Untuk itu dilakukanlah analisis kemampuan dan komitmen pemprov-pemprov di seluruh Indonesia⁸⁰. Kemampuan finansial diindikasikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) per kapita. Pendapatan daerah (APBD) secara keseluruhan berasal dari dua sumber yakni dana kiriman dari Pemerintah (APBN) dan PAD. PAD inilah yang mencerminkan kemampuan asli daerah. Agar pembandingannya *fair*, maka digunakanlah PAD per kapita, untuk menghindari bias jumlah penduduk.

Komitmen finansial diindikasikan oleh proporsi anggaran pendidikan dari PAD. Indikator ini digunakan karena anggaran pendidikan yang nyatanya dikelola Pemprov pada umumnya proporsi terbesarnya justru berasal dari pusat, termasuk BOS serta gaji dan tunjangan guru. Sehingga proporsi anggaran pendidikan dari PAD-lah yang lebih menunjukkan komitmen pemprov.

Analisis dilaksanakan dengan menempatkan posisi masing-masing provinsi pada diagram sumbu X-Y yakni PAD per kapita pada sumbu X dan persentase anggaran pendidikan dari PAD pada sumbu Y. Posisi persilangan kedua sumbu tersebut mengindikasikan rerata nasional. Kuadran I adalah provinsi-provinsi yang baik PAD per kapita maupun persentase anggaran pendidikan dari PAD-nya lebih tinggi dibanding rerata nasional.

Analisis ini menghasilkan adanya 8 provinsi pada Kuadran I, yakni provinsi-provinsi yang baik pendapatan maupun komitmen

⁸⁰ Analisis ini diambil dari Purwadi, A (2019). *Pengembangan Model Kerjasama SMK dengan K/L, Pemda, serta Dunia Kerja dan Industri: Kasus SMK Bidang Keahlian Kemaritiman*. Jakarta: Puslitjakdikbud.

finansial terhadap pendidikannya frelaif tinggi, yakni lebih tinggi dari rerata nasional. Pada Kuadran II, terdapat 4 provinsi, yakni provinsi-provinsi yang pendapatannya relatif tinggi namun komitmen finansialnya terhadap pendidikan relatif rendah, sebagaimana diindikasikan oleh lebih tingginya posisi PAD/kapita namun lebih rendahnya proporsi anggaran pendidikan dari PAD dibanding rerata nasional. Pada Kuadran III terdapat 11 provinsi dengan pendapatan dan komitmen finansialnya terhadap pendidikan relatif rendah. Dan pada Kuadran IV terdapat 9 provinsi dengan pendapat relative rendah namun komitmen finansialnya terhadap pendidikan adalah relatif tinggi.

Analisis ini menemukan bahwa terdapat 8 dari ke-33 provinsi di luar DKI Jakarta yang memiliki kemampuan finansial dan komitmen tinggi terhadap pendidikan -- yakni di atas rerata nasional -- diluar DKI Jakarta⁸¹. Tiga dari ke-8 provinsi tersebut berada di pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah; 3 provinsi di Sumatera (Riau, Kep. Riau, dan Bangka Belitung), dan masing-masing 1 provinsi di Jawa (DI Yogyakarta), dan Sunda Kecil (Bali).

Pemprov-pemprov DIY, Bali, dan Kaltim merupakan sedikit contoh dari pemprov yang mendukung pembiayaan SMK. Pemprov DIY menyediakan dana pendukung pembiayaan operasional terhadap SMK yang justru jumlahnya jauh lebih besar dibanding BOS. Kontribusi Pemprov DIY adalah sebesar Rp 2,6 juta/siswa/tahun, sehingga pembiayaan operasional SMK di DIY, termasuk SMK Pariwisata, menggunakan dana sebesar Rp 4,2 juta/siswa/tahun pada tahun 2019. Sampai saat ini belum ditemukan pemprov lain yang mendukung pembiayaan BOS SMK sebesar itu. Pemprov Bali mendukung pembiayaan sekolah menengah, tidak hanya SMK namun juga SMA negeri dan swasta. Nampak di sini bahwa, meskipun Bali merupakan provinsi yang ekonominya tergantung pada sektor pariwisata, namun tidak memberikan dukungan finansial khusus terhadap penyiapan calon SDM Pariwisata melalui pembiayaan operasional SMK Pariwisata. Provinsi Kaltim, yang kesejahteraan daerahnya tergantung pada sektor pertambangan,

⁸¹ Dalam analisis ini DKI Jakarta tidak dimasukkan karena merupakan “liyan” (*outlier*). PAD per kapita DKI kurang lebih empat kali dibanding PAD per kapita Prov. Kaltim, yakni provinsi dengan PAD/kapita tertinggi dari ke-33 provinsi di luar DKI.

memberikan dukungan finansialnya kepada penyiapan SDM lewat SMK terkait sektor tersebut, termasuk penyiapan SDM bidang perkapalan yang akan membawa hasil bumi keluar provinsi dan SMK Pariwisata. Dukungan terhadap penyiapan SDM bidang perkapalan diwujudkan melalui penyelenggaraan SMK Negeri Pelayaran Kalimantan, yakni SMK khusus Program Keahlian Pelayaran Niaga yang diselenggarakan secara gratis, yang sudah meluluskan calon Perwira Nautika dan Perwira Mesin Pelayaran Niaga bersertifikat internasional dari *International Maritime Organization* (IMO). Selanjutnya, dukungan terhadap penyiapan SDM bidang pariwisata diwujudkan dengan menggunakan filosofi “memberi kail, bukan ikan”. Kemampuan dan komitmen dukungan finansial diberikan melalui pembangunan hotel pendidikan (edotel atau edutel) di SMK-SMK Pariwisata negeri agar sekolah terbiasa mencari biaya sendiri, tidak setiap tahun mengharapkan pemberian Pemprov.

4) Penggalangan dukungan pembiayaan pendidikan anak dari orangtua

Penggalangan dukungan dari masyarakat merupakan upaya sekolah yang syah menurut UU Sisdiknas⁸². UU ini mengatur bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah (pusat), pemda, dan masyarakat (Pasal 6, ayat 1). Selanjutnya ditetapkan bahwa masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan (Pasal 9). Namun demikian pengertian “masyarakat” dalam UU ini mengalami kerancuan. Pasal 1, butir 27 menyatakan bahwa “masyarakat” adalah kelompok, bukan perseorangan (AP), WNI nonpemerintah yang mempunyai peran dan perhatian di bidang pendidikan. Sementara itu penjelasan yang berbeda terkait pengertian tentang “masyarakat” pada Pasal 54, ayat 1 yang secara eksplisit dinyatakan bahwa bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran-peran dari perseorangan atau individu, dan bahkan keluarga, selanjutnya kelompok, pengusaha, serta organisasi-organisasi profesi dan kemasyarakatan. Peran-peran para pihak tersebut meliputi berbagai peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

⁸² Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Namun demikian kontroversi tersebut diatasi dengan tegas dan jelas oleh PP Pendanaan Pendidikan⁸³ yang merupakan turunan dari UU tersebut. Peraturan ini memperjelas mengenai pihak yang bertanggungjawab dalam pendanaan pendidikan (Pasal 2, ayat 1) dan ayat 2, butir b menjelaskan siapa saja yang dimaksud dengan masyarakat tersebut. Sebagaimana UU induknya, peraturan ini menyatakan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama ke tiga pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam UU, yakni Pemerintah, pemda, dan masyarakat. Selanjutnya yang dimaksud dengan masyarakat meliputi a.l. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.

Lebih lanjut dielaskan dalam PP tersebut tentang lingkup biaya pendidikan, yakni pada Pasal 3. ayat 1. Biaya pendidikan meliputi biaya satuan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi.

Namun demikian upaya ini di beberapa provinsi sering menghadapi kendala. Kendala pertama terjadi pada provinsi yang menetapkan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun atau pendidikan menengah negeri gratis padahal kemampuan daerahnya belum memadai untuk itu. Penetapan tersebut kadang dilakukan sekedar untuk memenuhi janji kampanye menjelang pemilihan gubernur dan dibuat tanpa perhitungan kebutuhan aktual dana pendidikan dan kemampuan daerah. Kemungkinan lain adalah bahwa penetapan tersebut karena mengetahui wacana populer di tingkat nasional tentang wajib belajar diperpanjang menjadi 12 tahun. Wacana ini memudar karena setelah dihitung oleh Bappenas, keuangan nasional belum mencukupi untuk menyelenggarakan wajib belajar tersebut. Akhirnya yang dikumandangkan adalah Pendidikan Menengah Universal, yang tidak menyebut-nyebut istilah wajib belajar, apalagi penggratisan.

Kendala ke dua adalah kekhawatiran kepala sekolah atas dugaan melakukan pungutan liar atas pelaporan orang tua kepada Tim Saber Pungli⁸⁴ atau Ombudsman⁸⁵. Tim ini dibentuk untuk memberantas pungutan liar pada sektor apapun juga, yang pada saat itu sudah merajalela dan bahkan disebut sebagai “ ... telah merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ...

⁸³ PP no. 48 th. 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

⁸⁴ Perpres no. 87 th. 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar.

⁸⁵ Undang-Undang no. 37 th. 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

“ (Pertimbangan penerbitan perpres). Dalam rangka melaksanakan tugas mulia tersebut, masyarakat memang diberi kesempatan untuk berperan serta melalui pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lainnya. Pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dll tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui media informasi (Pasal 12).

Ombudsman adalah Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari APBN dan/atau APBD (Pasal 1). Pemberian layanan pendidikan merupakan salah satu bentuk layanan yang dimaksud. Untuk itu lembaga ini bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan dan menindaklanjutinya termasuk investigasi. Untuk keperluan itu Ombudsman berwenang meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait (Pasal 8).

Di sisi lain, Mendikbud menyatakan bahwa Kemdikbud tidak mempermasalahkan sekolah melakukan pungutan kepada orang tua⁸⁶. Namun demikian pungutan dimaksud tersebut harus sesuai dengan Permendikbud tentang Komite Sekolah⁸⁷. Menteri juga meminta kepada semua pihak agar tidak menganggap semua pungutan sebagai pungutan liar. Bahkan dinyatakan juga bahwa Kemdikbud akan memberikan bantuan hukum kepada sekolah yang dianggap melakukan pungutan liar.

Namun demikian, kekhawatiran kepala sekolah tersebut cukup beralasan. Ada indikasi dari sejumlah daerah terkait dengan ketidakjujuran yang mengarah ke keculasan individu orang tua terhadap sesama orang tua. Mengikuti peraturan tentang Komite Sekolah, pemberian kesempatan kepada orang tua untuk berperan serta secara finansial dalam pendidikan anaknya sudah dilaksanakan melalui rapat Komite Sekolah yang mengundang kehadiran semua orang tua. Namun ketika ada orang tua yang tidak setuju, orang tua tersebut tidak menyampaikannya dalam rapat. Ia biasanya secara diam-diam mengadu ke wartawan agar kejadiannya di *blow-up* di media massa lokal, *atau* melapor ke ombudsman, atau ke DPR dan mengadukannya sebagai pungli oleh sekolah. Sebagai contoh, GMP pada salah satu SMK

⁸⁶ Mendikbud: Tidak Semua PUngran Sekolah disebut Pungli, Ada yang Resmi. <https://www.merdeka.com/peristiwa/mendikbud-tidak-semua-pungutan-sekolah-disebut-pungli-ada-yang-resmi.html> diunggah 22 Februari 2019 01:04 diunduh 22 Juli 2019

⁸⁷ Permendikbud no. 75 th. 2016 tentang Komite Sekolah

Pariwisata negeri di Jakarta bahkan tidak diperbolehkan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan praktik *table manner* di hotel walaupun tidak ada iuran untuk perjalanan dari sekolah ke hotel, bahkan sampai ketika siswa disilakan datang sendiri-sendiri naik angkot ke hotel dan mereka berkumpul di depan hotel. Alasannya adalah ketakutan akan tuduhan pungli yang beresiko hilangnya jabatan kepala sekolah. Hal ini juga terjadi pada SMK di provinsi-provinsi lain.

Penggalangan dukungan dari orang tua ini memang menghadapi berbagai kendala, dan ini terjadi di sejumlah provinsi, namun hal ini tidak cukup untuk dijadikan alasan bahwa penggalangan dana dari orang tua tidak mungkin dilakukan. Salah satu SMK Pariwisata negeri di Kalimantan Timur, berhasil meyakinkan orang tua untuk membantu penyelenggaraan praktik pada KK Kuliner. Ini semua dimulai ketika proses PPDB siswa baru Kelas X. Dengan secara terbuka dan terus terang, para kapro menginformasikan kondisi keuangan sekolah kepada para orang tua calon siswa baru Kelas X bahwa praktik kejuruan di sekolah tersebut memerlukan biaya besar. Biaya dari Pemerintah berupa BOS tidak mencukupi untuk keperluan itu, sedangkan pemprov juga tidak memberikan dukungan biaya, sehingga hanya orang tua yang dapat membantu sekolah mendukung pendidikan keterampilan anaknya.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan praktik pembuatan produk makanan atau minuman pada KK Kuliner, secara berkelompok siswa diminta membawa bahan mentahnya dari rumah, tidak diminta mengumpulkan uang untuk membelinya. Sebagai contoh, untuk melaksanakan praktik mengukir buah, secara berkelompok siswa diminta membawa semangka yang dibeli siswa secara patungan. Untuk melaksanakan praktik membuat salad, secara kelompok siswa berpatungan membawa sayuran mentah bahan pembuat salad sayuran dan *dressing*. Selanjutnya, hasil praktik siswa tersebut, yakni berupa produk makanan, walau sesedikit apapun, dibawa pulang oleh para siswa ke rumah masing-masing, (maaf) tidak disantap oleh para guru sebagai makan siang. Dengan ini maka para orangtua berbahagia melihat anaknya dapat membuat produk kuliner tersebut, yang mungkin orang tua tidak dapat membuatnya, bahkan ikut mencicipinya.

Sedangkan untuk praktik *table manner* pada KK Perhotelan dan Jasa Perjalanan Wisata, orang tua siswa SMK ini membayar biaya pelaksanaan praktik anaknya di hotel dalam Kota

Samarinda. Ketua dan wakil ketua kelas yang mengumpulkan uang tersebut dan menyerahkannya sendiri ke hotel tempat praktik didampingi oleh guru, dan hotel menyerahkan kuitansi tanda terima pembayaran langsung kepada ketua dan wakil ketua kelas. Dalam konteks ini uang pembayaran tidak melalui tangan guru atau pihak sekolah.

Hal serupa tidak terjadi pada SMK Pariwisata di provinsi lain. Orang tua siswa membayar uang langsung ke GMP untuk membiayai praktik *table manner* di sebuah hotel di Bali. Biaya tersebut meliputi biaya hotel dalam melaksanakan praktik, biaya penginapan di hotel, dan biaya perjalanan pp. Siswa mengkritisnya dengan menyatakan bahwa di kota tempat sekolah berada banyak hotel besar bintang 4 dan 5, mengapa harus ke Bali? Siswa lain menyatakan bahwa praktiknya hanya beberapa jam, tapi waktu 2-3 hari lainnya dihabiskan untuk perjalanan.

5) Sekolah mencari penghasilan dengan membentuk usaha

a) Pendirian hotel pendidikan

SMK Pariwisata mengusahakan penggalian sumber pembiayaan praktik melalui pemanfaatan fasilitas praktik KK Perhotelan dalam bentuk “hotel-pendidikan” (*education hotel, edutel* atau *edotel*). Konsep edutel adalah memberi kesempatan KK Perhotelan mengadakan simulasi praktik dengan tiruan hotel yang didirikan di sekolah dan benar-benar menerima tamu dan diselenggarakan layaknya hotel dan menerima uang atas jasa menginap yang diberikan dan menggunakan dana yang diterima untuk menambah anggaran pembiayaan operasional sekolah untuk mengadakan bahan dan alat praktik habis pakai.

Melalui edutel ini siswa dapat melaksanakan praktik harian menerima pemesanan kamar, menerima tamu yang sebenarnya yang akan menginap dan menerima pembayaran biaya menginapnya, menyiapkan kamar yang akan dihuni oleh tamu yang sebenarnya dan membersihkan kamar tersebut, dan mengurus prosedur *check out* setelah tamu selesai menginap.

Namun demikian, penerimaan dana oleh sekolah dalam penyelenggaraan edutel ini oleh pemda dianggap sebagai sumber pemasukan yang harus dimasukkan sebagai

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan dananya harus disetorkan ke Kas Negara, yang artinya sekolah tidak dapat memperoleh tambahan biaya operasional. Bahkan ketika dana yang dianggap oleh sekolah sebagai penghasilan menutup kekurangan biaya operasional tersebut digunakannya, pemda menganggapnya sebagai PNPB maka sekolah dituduh tidak menyetor PNPB. Pada kasus salah satu SMK Pariwisata di Prov. Kepri, SMK tersebut sudah menutup edutelnya karena kepala sekolah berulang kali dilaporkan dan dipanggil ke Kejati Provinsi karena tuduhan menggelapkan PNPB. Pelaporan pemda ini terjadi setiap pergantian walikota sehingga kepala sekolah tidak hanya lelah mental, tetapi juga karena kehilangan berkas yang selalu dikembalikan tidak lengkap lagi ketika perkara ditutup setelah Kejati menemukan bahwa di SMK tersebut tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Pada SMK-SMK Pariwisata yang belum menutup edutelnya, sekolah diharuskan menyerahkan laporan harian dan dana yang diperoleh setiap minggu ke pemprov. Dengan cara ini maka sekolah tidak dapat mendapatkan tambahan biaya operasional yang diperlukannya.

Masalah edutel ini nampaknya dimulai pada tahap pengembangan konsep. Konsep penerimaan uang dari pemberian layanan jasa penginapan di SMK Pariwisata yang membuka KK Perhotelan pada saat itu tidak dibahas oleh Kemdikbud, dalam hal ini Direktorat PSMK, dengan Kementerian Keuangan. Sehingga ketika SMK negeri – yang biaya modal dan biaya operasionalnya dibayar oleh pemerintah (pusat dan/atau daerah) – menjadi wajar apabila ada pemasukan maka dananya harus disetor ke pemerintah, pusat dan/atau daerah.

Penyetoran penerimaan dari hasil pembuatan produk barang atau jasa di SMK ini adalah masalah lama. Pada tahun 1984 sudah diketahui adanya sikap tidak rela dari sebuah Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) negeri untuk menyetorkan hasil penjualan mebel ukir hasil praktik siswa kepada Pemerintah⁸⁸. Sekolah membiarkan mebel hasil

⁸⁸ Purwadi, A (1985). *Vocational and Technical Education Planning in Central Java Province: the Case of Art and Craft School*. Thesis program master pada Social Engineering Dept., Tokyo Institute Technology.

praktik menumpuk di gudang sekolah daripada kalau dijual dananya harus disetor ke Pemerintah.

- b) Pengubahan status SMK menjadi badan layanan usaha daerah

Dalam upaya memperoleh tambahan biaya operasional sekolah yang memang tidak mencukupi, disediakan pilihan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menggunakan pola BLUD, sebagai badan layanan umum, sekolah dapat mengelola sendiri penerimaan dananya untuk keperluan sekolah. Dengan catatan bahwa setelah masa transisi (masa tenggang, *grace period*) dari pola reguler ke pola BLUD selama 3 tahun terlampaui, sekolah harus memenuhi keperluan pembiayaannya dari penghasilan sendiri.

Provinsi Jawa Timur tengah menguji coba penggunaan pola BLUD ini di 20 SMK⁸⁹, tidak hanya SMK Pariwisata. Perkembangan ujicoba ini diamati betul apakah SMK mampu membiayai kebutuhannya sendiri dengan mengoptimalkan kemampuannya membuat produk barang dan/atau jasa dan menerima hasil penjualannya. Ada informasi bahwa di SMK-SMK tersebut yang di-BLUD-kan hanya unit-unit usahanya, bukan sekolahnya. Namun demikian dalam SK Gubernur tegas-tegas dinyatakan bahwa sekolah-lah yang di-BLUD-kan.

6) Donatur

Sumber lain yang dapat diharapkan adalah dari para filantroph pendidikan, baik atas nama individu maupun perusahaan. Contoh filantroph untuk SMK yang sudah diketahui, selain untuk SMK Pariwisata, juga SMK Kemaritiman dan SMK Pertanian, dan jenjang pendidikan lainnya ini membuktikan sumbangan dari donatur kepada SMK Pariwisata merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Sebagai contoh adalah *Panorama Group*, Yayasan Soechi, *Jarum Foundation*, Yayasan Pendidikan Astra – Michael D Ruslim (YPA-MDR) dan Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA), dan *Tanoto Foundation*.

⁸⁹ Peraturan Gubernur Jawa Timur no. 98 th. 2018 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Donatur yang memberikan dukungan kepada SMK Pariwisata dicontohkan oleh Panorama Group, yang didalamnya terdapat Biro Perjalanan Wisata *Panorama Tours*, memberikan dukungan berupa pendirian SMK Pariwisata yang dikelola Sekolah Kesatuan Bogor pada 14 Juli 2017. SMK ini menyelenggarakan Kompetensi Keahlian Perhotelan dan Perjalanan Wisata^{90 91}.

Donatur yang memberikan dukungan kepada SMK di luar Bidang Keahlian Pariwisata dicontohkan oleh *Soechi Lines*, *Jarum Foundation*, dan YPA-MDR. *Soechi Lines*, perusahaan kapal niaga besar, melalui Yayasan Dharma Mulia membiayai pendidikan gratis untuk sebuah SMK Kemaritiman di Jakarta Utara. *Jarum Foundation* menyumbang sebuah SMK Kemaritiman di Kudus dengan satu set simulator kapal kelas A (kelas tertinggi di dunia) bersama dengan *Mitshubishi Bank*. YPA-MDR bergerak dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah prasejahtera melalui pembentukan sekolah-sekolah unggul. Yayasan ini membangun gedung baru BLUD Plus khusus untuk KK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 2 Donorojo, Pacitan, yang diresmikan pada 18 Juni 2019 dan mengembangkan SMKN Gedangsari, Gunung Kidul, yang unggul di bidang ICT⁹².

Donatur yang memberikan dukungan terhadap pelatihan kerja dicontohkan oleh YDBA yang a.l. mengadakan pelatihan keterampilan bagi pemuda putus sekolah dan berbagai dukungan terhadap layanan pendidikan lainnya termasuk pendidikan tinggi, seperti IPB. Donatur yang memberikan dukungan terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan dicontohkan oleh *Tanoto Foundation*. Yayasan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto menyumbang pada bidang perluasan akses dan mutu pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi⁹³.

⁹⁰ <http://www.panorama-sentraxis.com/panorama-group>

⁹¹ m.ayobogor.com/read/2017/07/14/5480

⁹² <http://www.ypamdr-astr.com/m>

⁹³ <http://www.tanotofoundation.org/id/tentang-kami/sejarah-dan-tonggak-capaian.html>

c. Keterlaksanaan praktik dasar di sekolah dan praktik lanjut di dunia industri

Pengalaman menggunakan peralatan dan mesin sebagaimana yang digunakan di industri merupakan modal yang sangat berharga karena lulusan menurut KKNI dirancang untuk memiliki kompetensi pada Level 2, yakni operator. Keterampilan ini merupakan akumulasi dari praktik dasar atau harian di sekolah dan praktik kerja lapang atau praktik kerja industri (PKL atau prakerin) selama 3 atau 6 bulan⁹⁴. Praktik harian di sekolah dirancang untuk memberikan keterampilan dasar dan PKL prakerin untuk memberikan keterampilan lanjutan, sehingga di akhir prakerin siswa sudah memiliki keterampilan yang memadai, sehingga dari sisi keterampilan sudah memiliki keterampilan yang diharapkan sebagai pekerja baru. Akumulasi akan optimal apabila sebelum mengikuti prakerin siswa sudah memiliki keterampilan dasar dengan memadai sehingga tinggal melanjutkan dengan berlatih untuk menguasai keterampilan lanjutan di industri.

Apabila terjadi optimalisasi pada kedua pelatihan tersebut, maka keterampilan (juga mungkin pengetahuan dan sikap kerja) yang dimiliki setelah selesai prakerin, mencerminkan keterampilan setelah lulus nanti. Sebaliknya, dapat juga terjadi akumulasi yang tidak optimal, yaitu adanya kesenjangan kompetensi yang dikuasai siswa sebelum prakerin lebih rendah dibanding dengan kompetensi minimal untuk mengikuti pelatihan lanjutan di industri pada waktu prakerin.

Praktik lanjutan melalui PKL diperlukan agar siswa memiliki wawasan mutakhir, keterampilan kerja yang diperlukan oleh industri, dan sikap kerja yang sebenarnya. Pada aspek wawasan, sebagai contoh untuk KK UPW, siswa mengetahui menipisnya kesempatan kerja usaha pemesanan tiket dan pemesanan hotel melalui Biro Perjalanan Wisata (BPW). Ini merupakan salah satu dampak nyata dari masuknya Revolusi Industri 4.0 pada sektor pariwisata di Indonesia, yakni konvergensi teknologi informasi -- termasuk internet -- ke berbagai bidang. Kecenderungan baru yang terjadi adalah banyaknya pelanggan yang meninggalkan peran BPW dalam layanan jasa *ticketing* dan *booking* karena peran itu tergantikan oleh trio ponsel--kartu kredit--situs internet dan bagi pelanggan yang tidak memiliki kartu kredit jasa itu ditangkap dengan baik oleh toko serba

⁹⁴ Pada saat data untuk kajian ini dikumpulkan, pelaksanaan PKL atau prakerin sedang dalam masa transisi dari peraturan lama PKL/prakerin 3 bulan menjadi 6 bulan menurut peraturan baru.

ada mini – semacam IndoMaret – yang masuk ke pemukiman dan membentuk duo IndoMart–situs perjalanan di internet.

Perubahan ke dua dari subsektor perhotelan. Banyak pengusaha hotel, yang tidak lagi mengurus pencucian seprai dan handuk sendiri karena dinilai tidak efisien. Hotel-hotel bintang 4 dan 5 dan bahkan sejumlah hotel bintang 3 ke bawah di kota-kota besar menyerahkan urusan ini ke pihak ke-3, yakni perusahaan pencucian. Perubahan bisnis ini mengusik kelanggengan mapel *Laundry* pada KK Perhotelan, yang dari awal dikonsepsikan untuk menyiapkan siswa untuk bekerja di hotel dengan menguasai kompetensi pencucian seprai dan handuk.

Pada aspek keterampilan kerja, melalui PKL siswa memperoleh pengalaman menggunakan peralatan kerja yang digunakan di industri yang sebenarnya dan menggunakannya pada proses produksi yang sebenarnya. Pada aspek sikap, siswa dikembangkan sikap kerjanya, termasuk disiplin, ketahanan fisik (misalnya berdiri selama melaksanakan pekerjaan dan bekerja dalam suhu dapur yang tinggi bagi siswa KK Tata Boga atau siswa KK Perhotelan & Jasa Wisata ketika sedang praktik Produksi F & B di dapur hotel), dan menggunakan peralatan kerja dan melakukan proses kerja dengan benar, karena apabila salah prosedur maka akan menghasilkan produk gagal. Tanggungjawab untuk dapat menghasilkan produk yang benar inilah yang merupakan karakter kerja yang berkembang.

Satu aspek yang dinyatakan sulit dikembangkan di dunia kerja adalah penanaman sikap atau karakter kerja. Penanaman sikap ini memerlukan waktu yang lama, dan sulit untuk diubah melalui PKL selama 6 bulan. Pengusaha menyatakan bahwa PKL hanya mampu melaksanakan *finishing touch* saja dalam hal karakter kerja siswa.

1) Pelaksanaan praktik dasar di sekolah

a) Kualitas pelaksanaan praktik atau pelatihan dasar

Faktor pelaksanaan pelatihan di sekolah setidaknya terdiri dari: kemampuan GMP menjadi instruktur pembimbing praktik harian siswa, serta keterlaksanaan praktik menggunakan peralatan dan mesin yang sesuai dengan peralatan dan mesin yang digunakan di industri.

Pelaksanaan praktik harian di sekolah adalah antara ada dan tiada, kalau ada pun di beberapa sekolah kecenderungannya

dilaksanakan secara kurang memadai. Alasan kurang memadainya praktik ini adalah kurang tersedianya biaya pengadaan bahan praktik siswa dari dana BOS. Sangat kurangnya biaya pengadaan bahan praktik dari dana BOS ini dikeluarkan di semua SMK Pariwisata yang menjadi peserta FGD dalam langkah verbal.

- (1) Kompetensi-kompetensi keahlian yang tidak menyelenggarakan praktik harian

Beberapa KK di sejumlah SMK di provinsi yang berbeda tidak atau menyelenggarakan praktik harian dengan frekuensi yang sangat kurang. Lulusan KK Tata Boga di salah satu sekolah di Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa selama ia bersekolah di sana sekolah itu tidak pernah menyelenggarakan praktik Tata Boga. Hal serupa dinyatakan oleh siswa KK Perhotelan di Provinsi NTB. Siswa menyatakan tidak ada pelajaran praktik di sekolah itu. Satu-satunya acara yang dinilai sebagai praktik adalah praktik *Table Manner* di sebuah hotel di pulau tetangganya, yaitu Bali, dengan biaya Rp 1 juta dari orang tua siswa. Menurut siswa, praktik dilaksanakan selama 3 jam saja (dan praktik tersebut memang hanya memerlukan waktu selama itu) sisanya jalan-jalan. Praktik *table manner* memang perlu dilaksanakan di hotel, namun satu hal yang menjadi pertanyaan adalah penentuan lokasi praktik yang harus di Bali, karena di kota lokasi SMK ini terdapat banyak hotel, termasuk bintang 4 dan bintang 5, baik yang bersifat *international chain* maupun lokal.

- (2) Kompetensi-kompetensi keahlian menyelenggarakan praktik harian namun dengan kuantitas dan kualitas yang kurang memadai

Beberapa KK lain di SMK lain di provinsi yang berbeda menyatakan bahwa mereka menyelenggarakan praktik harian namun dalam kualitas dan kuantitas yang kurang memadai. Untuk KK UPW di salah satu SMK di Provinsi Sulawesi Utara GMP-nya menyatakan mengadakan praktik harian dengan frekuensi dan kualitas yang kurang memadai karena tidak memiliki sarana praktik berupa perangkat lunak reservasi hotel dan tiket sebagaimana digunakan di BPW dan hotel modern. Namun demikian, kaprodi di beberapa sekolah

lain menyatakan bahwa kepemilikan alat canggih di sekolah tidak mutlak, sepanjang terdapat peralatan manual, karena dua sebab: (i) keterampilan yang ditanamkan adalah sama, yang berbeda hanyalah secara manual dan menggunakan TIK, dan (ii) keterampilan menggunakan peralatan canggih ini dapat diperoleh sewaktu prakerin. Apalagi Ketua DPD ASITA di provinsi tersebut menyilakan KK UPW menggunakan peralatan reservasi canggih pada BPW yang dimiliki oleh Ketua DPP ASITA untuk praktik harian siswa KK UPW. Dari informasi ini dapat ditafsirkan bahwa kekurangan fasilitas praktik berupa sarana TIK yang menjadikan frekuensi praktiknya tidak memadai hanyalah alasan saja.

Siswa-siswa salah satu SMKN di Provinsi NTB yang mengikuti FGD siswa menyatakan bahwa praktik harian di sekolah sangat kurang, terlalu banyak teori. Pelaksanaan praktik harian hanya antara 3 sampai 4 kali pada Kelas XI. Sementara itu guru mengamini pendapat siswa tersebut dengan cara menyatakan bahwa anggaran pembelian bahan praktik dari dana BOS yang sangat kurangnya penyebabnya.

- (3) Kompetensi-kompetensi keahlian yang menyelenggaraan praktik harian secara memadai

Semua KK di salah satu SMK di Provinsi Kalimantan Timur ternyata menyelenggarakan praktik harian dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. KK Perhotelan mengadakan praktik harian dengan dana pembelian bahan praktik dari BOS. KK Tata Boga, KK Tata Busana, dan KK Tata Kecantikan mengadakan praktik harian dengan dukungan biaya pengadaan bahan praktik dari 2 sumber, yaitu BOS dan orang tua. Demikian juga semua KK dari SMK Pariwisata di Provinsi DI Yogyakarta.

Selain itu sebenarnya terdapat kendala lain, yakni daya listrik yang tidak memadai untuk praktik karena peralatan praktik yang mengonsumsi daya listrik sangat tinggi. Masalah ini dinyatakan oleh SMK di beberapa provinsi, termasuk Kalimantan Timur. Bahkan di SMK tersebut terdapat fasilitas pembelajaran yang tidak digunakan karena konsumsi listriknya terlalu tinggi.

b) Aspek jadwal

Pembelajaran di SMK Pariwisata yang seharusnya dilaksanakan selama 3 tahun atau 6 semester, dari Kelas X s.d. Kelas XII, kenyataannya hanya dilaksanakan dalam 3 ½ semester. Pengurangan waktu pembelajaran tersebut terjadi karena jadwal-jadwal kegiatan besar sekolah, yakni PKL/prakerin serta ujian-ujian akhir (UN atau asesmen penggantinya, US, dan UKK) dan persiapannya. PKL/prakerin untuk KK Perhotelan misalnya, dilaksanakan selama 6 bulan dan kegiatan ini dilaksanakan pada 3 bulan terakhir Semester 4 (April s.d. Juni) dilanjutkan 3 bulan pertama Semester 5 (Juli s.d. September). Sedangkan UN, US, dan UKK pada tahun 2019 dilaksanakan mulai bulan Maret, atau bulan ke tiga Semester 6.

Kecenderungan yang ada selama ini, dalam rangka menghadapi ujian-ujian tersebut sekolah menyiapkan waktu khusus, sehingga praktis setelah kembali dari PKL/prakerin, mulai bulan Oktober s.d. Februari, selama 5 bulan siswa langsung masuk ke pembelajaran penyiapan ujian-ujian.

Karena dari 3 bulan terakhir Semester 5 s.d. 2 bulan pertama Semester 6 kegiatan pembelajaran difokuskan pada persiapan dan pelaksanaan ujian-ujian akhir, maka penggunaan waktu secara khusus ini berdampak pada pelaksanaan pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan pada kurun waktu tersebut. Pembelajaran selama itu harus digeser ke semester-semester sebelumnya.

Di sisi lain PKL/prakerin yang merupakan kesempatan siswa mengikuti praktik atau tersebut memerlukan persiapan khusus. Persiapan khusus ini harus selesai pada bulan ke-3 Semester 4. Praktik atau pelatihan lanjutan ini memerlukan persiapan agar keterampilan dasar (berupa praktik harian di sekolah) serta pengetahuan dan sikapnya memenuhi persyaratan minimal keterampilan serta pengetahuan dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa agar dapat menangkap esensi pelatihan lanjutan.

Tabel 6. Penggeseran waktu pembelajaran mapel produktif akibat adanya pakerin dan 3 ujian akhir

Sem 1 Jul-Des	Sem 2 Jan-Jun	Sem 3 Jul-Des	Sem 4 Jan-Jun	Sem 5 Jul-Des	Sem 6 Jan-Jun
			MK yang digeser karena 3 ujian akhir + Prakerin: Sm5: 6 bl @ 33 jpm Kalau 1 minggu 46 jpm → waktu 5 bl		MK Sm6: 5 bl @ 33 jpm Diubah jadi ~ 6 bulan → tambah jampel/mg → 46 jpm
	MK digeser agar menguasai kompetensi dasar utk. ikut prakerin: Sem 3+4: 6 bl @ 31 jpm=62 jpm Klo dilakukan 9 bl → 42 jpm			Prakerin + belajar mandiri MNK* Sm5: 3 bl @ ~ 33 jpm Sm4: 3 bl @ ~ 31 jpm	
	42 jpm		46 jpm		46 jpm

* Mapel MK: Muatan Kejuruan (mapel Kelompok C)

** Mapel MNK: Muatan Nasional dan Kewilayahan (mapel Kelompok A & B)

*** jpm: jampel/minggu

Pembelajaran mapel-mapel kejuruan (Kelompok C) yang dijadwalkan dalam Struktur Kurikulum 2013 pada Semester 6, karena adanya 3 ujian akhir mulai bulan Maret pada Semester 6, maka pelaksanaan pembelajarannya digeser menjadi 3 bulan terakhir Semester 5 (Oktober) sampai 2 bulan pertama Semester 6 (Februari). Beban mengajar guru mapel produktif adalah 33 jampel/minggu selama 6 bulan. Karena waktu yang tersedia hanya 5 bulan, maka beban guru mapel produktif menjadi 46 jampel/minggu (Tabel 6). Apabila hanya tersedia 1 guru mapel produktif, maka beban

mengajarnya menjadi 192 persen dari beban mengajar tatap muka 24 jampel/minggu. Apabila tersedia 2 guru maka rerata beban mengajarnya hanyalah 23 jampel/minggu untuk kelas XII. Dari sisi siswa, apabila sekolah masuk selama 5 hari maka rerata beban belajar siswa untuk **belajar mapel produktif saja** adalah 8 jampel/hari pada Senin s.d. Kamis dan sebanyak 6 jampel pada hari Jumat.

Penggeseran mapel kejuruan akibat adanya ujian-ujian akhir (Semester 6) dan Prakerin (mulai 3 bulan terakhir Sem 4 dan 3 bulan awal Sem 5), menjadikan penggeseran ke depan sejak Semester 2. Sejak bulan Juni Semester 2 s.d. Oktober Semester 3 siswa mapel produktif diberikan pembelajaran selama 42 jampel/minggu. Selanjutnya mulai bulan November Semester 3 s.d. Maret Semester 4 dialokasikan pembelajaran mapel produktif selama 46 jam pelajaran per minggu.

2) Pelaksanaan pelatihan lanjutan di industri

Pelaksanaan pelatihan lanjutan ketika siswa melaksanakan praktik di industri setidaknya menemukan dua kendala berikut. Kendala pertama adalah keterampilan dasar siswa tidak memadai untuk melaksanakan praktik di industri. Ini dicontohkan oleh KK Kecantikan dari SMK Pariwisata negeri di salah satu kota di sudut barat daya Jateng yang melaksanakan prakerin di salon milik pengurus DPP asosiasi profesi di Jakarta. Akibatnya 4 dari 6 bulan waktu prakerin digunakan untuk pembekalan ulang, teori maupun praktik, atas biaya, waktu, dan tenaga dari salon.

Kendala kedua, anggapan salah yang mengasumsikan siswa adalah manusia super: sambil secara sungguh belajar bekerja di industri yang harus menghasilkan produk siap jual dia belajar teori melalui modul atau bentuk tugas lain dari sekolah. Akibatnya pada rentang waktu kerja di industri, siswa meninggalkan praktik lanjutan menggunakan peralatan dan mesin dan membentuk sikap kerja untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah.

3) Keberadaan industri yang sesuai teknologi untuk pelaksanaan PKL

Kendala ke tiga adalah tidak adanya industri yang sesuai dengan kebutuhan siswa untuk prakerin di lokasi yang sama. Kasus ini dicontohkan oleh KK Tata Busana di sebuah SMK di Kalimantan Timur. Siswa KK ini tidak memperoleh tempat prakerin yang sesuai karena ketiadaan industri pakaian besar di kota yang sama atau kota tetangga. Industri pakaian yang ada di kota ini hanyalah usaha penjahitan individu dan industri pembuatan sarung yang hanya memerlukan keterampilan menjahit lurus. Satu-satunya industri garmen skala besar di provinsi ini hanyalah CV Trisula Citra Perdana di Balikpapan yang berjarak 100 km. dari Samarinda. Perusahaan ini hanya dapat menampung siswa prakerin dari SMK-SMK Pariwisata di Kota Balikpapan.

Kondisi ini berbeda dengan kasus KK Tata Kecantikan di sudut barat Jateng. KK Tata Kecantikan di Purworejo ini memang sengaja memilih salon di ibukota negara dan mendapatkan tempat prakerin, selama 6 bulan, di Jakarta, lokasi yang berbeda provinsi. Jarak sekolah ke lokasi prakerin k.l. 560 km, namun tersedia 2 moda transportasi darat yang lancar, dengan jumlah frekuensi 24 kali sehari, yakni kereta api 4 kali dan bis malam 20 keberangkatan per hari. KK ini sebenarnya dapat mencari salon-salon besar yang banyak terdapat di Kota Yogyakarta, ibukota Provinsi DIY (50 km), Kota Surakarta, kota kedua terbesar se Provinsi Jawa Tengah (110 km), dan Kota Semarang, ibukota provinsi Jawa Tengah (123 km).

C. KERJASAMA SMK PARIWISATA DENGAN PELAKU INDUSTRI PARIWISATA YANG TENGAH BERLANGSUNG

Kerjasama SMK dengan para pemangku kepentingannya adalah dalam rangka penyiapan SDM pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan industri. Penyiapan SDM pariwisata melalui SMK tidak dapat dilaksanakan oleh sekolah sendiri, a.l. karena sekolah tidak mampu menyediakan sumberdaya utamanya: GMP berpengalaman industri, fasilitas praktik untuk memberi kesempatan siswa praktik menggunakan fasilitas kerja sesuai dengan yang digunakan industri agar siswa mampu menggunakan peralatan dan mesin yang ada di industri ketika mereka mulai bekerja, dan biaya operasional praktik yang utamanya digunakan untuk mengadakan bahan praktik atau bahan habis pakai.

Tafsiran sekolah tentang kerjasama berbeda dengan yang dikaji dalam kegiatan ini. Sekolah menafsirkan kerjasama dengan industri pariwisata adalah sekedar pemerolehan tempat PKL atau prakerin bagi siswanya. Sedangkan kebutuhan

GMP berpengalaman industri tidak masuk dalam konsep sekolah, terutama SMK negeri. Apabila kekurangan guru sekolah negeri cukup mengajukan kebutuhannya berupa guru ASN kepada Pemerintah dan kalau belum diperoleh, mengangkat guru honorer. Demikian juga peralatan dan mesin praktik dan biaya operasionalnya.

Setidaknya terdapat tiga pemangku kepentingan utama SMK pariwisata, di luar pemerintah, yakni industri pariwisata, asosiasi profesi pariwisata, dan orang tua. Kedua pemangku kepentingan yang pertama ini dalam kegiatan perekayasaan ini diwakili oleh asosiasi industri dan asosiasi profesi. Kerjasama sekolah dengan kedua pemangku kepentingan ini tidak ditemukan pada kelima provinsi, kecuali dengan IHGMA dan ICA di beberapa provinsi.

1. Kerjasama menurut kompetensi keahlian

a. KK yang telah memiliki kerjasama dengan asosiasi

KK yang telah memiliki kerjasama dicontohkan oleh KK Perhotelan dan KK Boga. Kerjasama pada **KK Perhotelan** bersifat pengkinian pengetahuan dan wawasan serta praktik-praktik di hotel. Kerjasama ini dikembangkan oleh Kemenpar bersama IHGMA yang dikemas dalam Program *One GM - One SMK*. Melalui program ini diharapkan setiap SMK Pariwisata yang memiliki program keahlian perhotelan dapat memiliki kerjasama dengan pihak hotel dengan keragaman satu hotel dapat bekerja sama dengan sejumlah SMK dan satu SMK dapat juga kerjasama dengan sejumlah hotel, atau satu SMK bekerjasama dengan satu hotel dan sebaliknya. Melalui program ini kerjasama tersebut pada praktiknya adalah pengkinian (*updating*) pengetahuan dan wawasan siswa dan sekolah terhadap kemajuan-kemajuan yang ada di industri perhotelan melalui pengiriman manager atau kepala divisi hotel ke sekolah. Program ini berkesesuaian dengan Program Guru Tamu (PGT) yang dikembangkan oleh Direktorat PSMK, dengan perbedaan adalah bahwa dalam PGT yang aktif adalah sekolah, sementara program ini diprakarsai oleh asosiasi GM dan Kemenpar.

Dalam konteks ini wakil dari asosiasi yang ditugaskan ke sekolah dapat beragam tergantung kesesuaian menurut latar belakang pendidikan dengan subkompetensi di bidang perhotelan yang diperlukan sekolah, yakni *front office*, *house-keeping*, serta *F&B*. Apabila sekolah memerlukan ahli di bidang *house keeping* sementara GM-nya berlatar belakang keahlian *F&B*, maka dapat dikirim manager atau *division head* bidang *house keeping*, bukan GM yang berlatar belakang *F&B*.

Dalam pelaksanaan kerjasama ini masih terdapat perbedaan persepsi antara sekolah dan hotel. SMK berfikir bahwa kedatangan wakil pihak hotel ke sekolah dalam Program *One GM - One SMK* ini sepenuhnya merupakan bantuan dunia perhotelan bersifat gratis sepenuhnya. Sementara itu dari pihak IHGMA menyatakan bahwa pemutakhiran pengetahuan dan wawasan serta praktik-praktik di perhotelan ini diberikan secara gratis, tanpa *professional fee*, namun jangan sampai mengharuskan perwakilan hotel datang ke sekolah menggunakan biaya *transport* sendiri. Sekolah, yang sumber dana utamanya adalah BOS, kesulitan dalam memberikan biaya transportasi karena tidak tersedia pos anggarannya dalam BOS.

Contoh ke dua adalah kerjasama pada **KK Tata Boga**, yang berupa pengkinian kurikulum serta pengkinian teori dan pembimbingan praktik siswa dengan metode terbaru tata boga di hotel. Kerjasama dilaksanakan oleh ICA berupa pengiriman *chef* sebagai instruktur praktik. Pengiriman *chef* disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Sebagai contoh, apabila sekolah memerlukan pemutakhiran di bidang pastry maka dikirim *Chef Pastry*. Kemanfaatan kedatangan *chef* ini berkesuaian dengan Program Guru Tamu yang dikembangkan oleh Direktorat PSMK, dengan perbedaan bahwa ICA-lah yang menawarkan dukungan terhadap sekolah.

Perbedaan dukungan IHGMA dan ICA adalah pada pembiayaan transport. ICA menawarkan program ini secara gratis, termasuk gratis biaya transport. Bahkan pada kasus ICA Provinsi Kalimantan Timur, *chef* anggota ICA bekerja pada hotel yang berlokasi di Bontang, datang mengajar ke Samarinda dengan harus mengemudi mobil sendiri selama k.l. 2,5 jam. ICA hanya mensyatakan bahwa dalam pelatihan praktik untuk siswa, bahan dan alat praktiknya disediakan oleh sekolah.

Kerjasama ini terbatas pada provinsi-provinsi dan kota-kota yang IHGMA-nya atau ICA-nya telah terbentuk. Masalah yang ditemui oleh IHGMA, a.l. sebagaimana dialami oleh IHGMA DI Yogyakarta, adalah ketiadaan daftar SMK Pariwisata yang memiliki KK Perhotelan. Sementara itu masalah pada ICA adalah keraguan sekolah untuk menerima uluran tangan ICA.

- b. KK yang belum memiliki kerjasama dengan asosiasi

KK yang belum memiliki kerjasama dengan asosiasi adalah KK Tata Kecantikan dan KK Tata Busana. Belum ditemukan kerjasama kedua KK ini dengan asosiasi profesi yang ada. Pada kasus yang ekstrim, Ibu Ketua BPD Tiara Kusuma di Provinsi NTB yang sekaligus juga pemilik salon, juga sebagai asesor maupun dirinya secara pribadi, menyatakan bahwa asosiasi ataupun dirinya selaku pribadi belum pernah dihubungi sama sekali oleh SMK Pariwisata yang ada di NTB dan Bidang PSMK pada Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Di sisi lain kerjasama KK Tata Busana di Kaltim belum dilakukan karena industri pakaianya hanya satu, sedangkan usaha penjahitan massal lainnya adalah penjahitan sarung yang hanya melaksanakan pekerjaan menjahit lurus.

2. Kerjasama menurut provinsi

- a. Provinsi yang telah memiliki kerjasama

Menurut lokasinya, provinsi yang telah memiliki kerjasama dengan asosiasi profesi adalah Kaltim dan Yogyakarta. Kerjasama tersebut dilaksanakan dengan IHGMA dan ICA.

Kerjasama yang terjadi dilaksanakan atas inisiatif kedua asosiasi tersebut langsung dengan sekolah. Kerjasama IHGMA dilaksanakan atas dasar Program Kemenpar-IHGMA yang bernama *One GM One SMK*. Kerjasama ICA dilaksanakan atas dasar Program ICA yang bernama *ICA Goes to School*. Masing-masing asosiasi ini mengadakan pendekatan langsung ke individu SMK Pariwisata di kotanya atau kota tetangga.

- b. Provinsi yang belum memiliki kerjasama

Provinsi-provinsi Sulut dan NTB belum memiliki kerjasama. Pada saat FGD Sesi Eksekutif dalam rangka verval kegiatan ini, dilaporkan oleh Kepala SMK Pariwisata tempat penyelenggaraan FGD di NTB, bahwa kerjasama tersebut telah direncanakan. Namun demikian laporan tersebut merupakan tanggapan dari pertemuan informal katim kegiatan ini dengan kepala SMK itu sehari sebelumnya untuk membahas persiapan FGD. Atas dasar laporan tersebut Kabid SMK menyatakan bahwa Bidang PSMK sedang merencanakan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi yang berkaitan. Namun nampak jelas bahwa wacana itu baru dikemukakan saat FGD, karena sampai dengan laporan ini dikonsep pertemuan perencanaan belum berlangsung,

apalagi kerjasamanya. Informasinya dari kepala sekolah adalah bahwa pihak sekolah menunggu undangan Bidang PSMK.

Untuk Sulut, sebenarnya sudah ada tawaran kerjasama dari BPD ASITA. Kerjasama yang ditawarkan adalah pemanfaatan alat-alat kerja di salah satu BPW anggota ASITA Sulut untuk digunakan pada praktik harian mata pelajaran Jasa Perjalanan Wisata pada KK Perhotelan dan Jasa Pariwisata. BPW dimaksud dimiliki oleh Kabid Kelembagaan BPD ASITA Sulut, yakni *Emerall Tour*, untuk digunakan pada praktik harian mata pelajaran Jasa Perjalanan Wisata. Namun demikian sampai dengan konsep laporan ini ditulis, pihak SMK Pariwisata tetap belum menghubungi ASITA. Nampaknya SMK lebih mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat daripada bekerjasama dengan asosiasi setempat.

- c. Provinsi yang sudah pernah memiliki MoU tetapi tidak dilaksanakan
Keadaan yang berbeda terjadi di Sumatera Utara. Beberapa tahun yang lalu telah ditandatangani di hadapan Gubernur Sumut MOU antara Kadisdik Sumut dengan pimpinan asosiasi-asosiasi kepariwisataan. Namun demikian, MOU tersebut tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Kerjasama SMK Pariwisata dengan asosiasi-asosiasi kepariwisataan belum menjadi kenyataan.

Keraguan akan manfaat yang diterima oleh industri pariwisata terhadap dukungan yang mereka berikan dengan melakukan kerjasama dengan sekolah baru terjawab secara konseptual oleh peraturan perundangan yang baru yang menjanjikan penghitungan sebesar dua kali lipat dari pengeluaran untuk mendukung diklat, termasuk di SMK Pariwisata, sebagai nilai pengurang bagi pendapatan bruto kena pajak. Tidak seorangpun wakil asosiasi industri pariwisata yang mengetahui peraturan Menteri Keuangan tersebut.

BAB III

KOMPETENSI LULUSAN DAN FAKTOR-FAKTOR TERKAIT DENGANNYA, SERTA DUKUNGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PEMBELAJARAN

A. KOMPETENSI LULUSAN SMK PARIWISATA

SMK mempunyai dua misi utama, yakni menyiapkan lulusan sebagai calon pekerja dan sebagai calon pelaku wirausaha. **Tingkat kompetensi lulusan sebagai calon pekerja** diindikasikan dari aspek *outcome*, yakni penilaian pemberi kerja, karena besar atau kecilnya tingkat pengangguran dipengaruhi oleh pemberi kerja. Penilaian dari dunia kerja merupakan justifikasi terpenting terhadap tingkat kompetensi lulusan sebagai calon pekerja.

Hasil analisis dari sisi *outcome* menunjukkan bahwa para pelaku industri pariwisata menilai lulusan SMK Pariwisata cenderung memiliki kompetensi yang beragam menurut kompetensi keahlian (KK)-nya, dari memadai sampai kurang memadai. Indikasi umum yang digunakan terkait dengan kekurangan-memadainya kompetensi adalah mulai dari kekurangan pengetahuan lulusan, kegamangan kerja karena tidak menguasai keterampilan yang diperlukan untuk berperan serta dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja, sampai ke perilaku atau karakter kerja yang kurang tepat. Kekurangan kompetensi ini dinyatakan oleh asosiasi-asosiasi terkait dengan masing-masing KK tersebut pada kelima lokasi verval⁹⁵. Para pelaku industri pariwisata tersebut diwakili oleh baik asosiasi industri maupun asosiasi profesi, seperti misalnya PHRI, ASITA, IGHMA, IHGM, IHKA, HPI untuk Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata, ICA dan PCPI untuk Kuliner, Tiara Kusuma dan ASTI untuk Tata Kecantikan, dan IPBI untuk Tata Busana.

Tingkat capaian kompetensi yang kurang memadai tersebut cenderung mencakup seluruh kompetensi keahlian, dengan pengecualian pada kompetensi keahlian perhotelan di salah satu provinsi. Di provinsi ini semua lulusan KK tersebut dinilai cenderung menguasai kompetensi yang diperlukan, terutama untuk bekerja pada bidang-bidang *house keeping* (tata kamar), *F & B service* (layanan makanan dan minuman), dan *laundry* (pencucian), yang

⁹⁵ Lokasi verval adalah Sumatera Utara, NTB, dan DI Yogyakarta (super-prioritas pengembangan pariwisata), Sulawesi Utara (unggulan pertama), dan Kaltim (mewakili daerah bukan super-prioritas dan bukan unggulan, calon ibukota negara yang baru). DI Yogyakarta dipilih karena yang dimasukkan dalam daftar prioritas pengembangan adalah Borobudur, dan wisman ke Borobudur sebagian besar adalah wisman dari DI Yogyakarta, bukan dari Jateng.

termasuk pada kelompok pekerjaan *back offices* (kantor belakang). Namun demikian tidak semua lulusan memiliki kompetensi khusus untuk bekerja di kantor depan hotel (*front office*).

Terdapat empat kompetensi khusus yang diperlukan untuk bekerja di *front-office* tersebut, selain penguasaan keterampilan menggunakan perangkat kerja yang dinilai dikuasai oleh semua lulusan. Keempat kompetensi khusus tersebut adalah, pertama, cerdas, mampu menjadi pemecah masalah ketika terjadi kebuntuan dan tidak mudah panik (*problem solver*). Ke dua, *gesture*, yakni aksi tubuh yang terlihat menyampaikan pesan-pesan tertentu atau juga secara verbal seperti kelepasan bicara yang terulang-ulang. Ke tiga, *grooming* yakni tampilan fisik, seperti tidak bertato atau bertindik telinga, rambut rapi, pakaian rapi, dan termasuk *good looking*. Ke empat adalah sikap keramah-tamahan (*hospitality*) dalam kondisi sulit sekalipun. **Indikasi tingkat kompetensi lulusan sebagai calon pelaku wirausaha.** Tingkat kompetensi lulusan sebagai calon pelaku wirausaha diindikasikan dari aspek *output* untuk KK Kuliner dan aspek proses untuk KK Perhotelan. Indikasi dari dunia kerja kuliner diberikan oleh sejumlah pengusaha muda bidang kuliner yang menjadi binaan Kemenpar terhadap tingkat kompetensi siswa yang melakukan PKL di perusahaannya. Tingkat kompetensi siswa PKL ini dianggap sebagai indikasi yang cukup jujur dan fair karena sekembali siswa dari PKL tidak terdapat kesempatan yang luas lagi bagi meningkatnya kompetensi, karena siswa sudah akan disibukkan dengan persiapan dan pelaksanaan tiga ujian akhir, yakni UN (pada waktu itu masih ada, atau asesmen penggantinya nanti), ujian sekolah, dan ujian kompetensi keahlian. Tingkat kompetensi lulusan KK Kuliner, sebagaimana diindikasikan oleh tingkat kompetensi siswa PKL, adalah tidak memadai. Siswa PKL dinilai sangat kurang memiliki kemauan untuk aktif menggali kiat-kiat membuka usaha baru, sehingga lemah dalam visi berusaha, juga lemah dalam kompetensi inter-personal khususnya dalam komunikasi.

Indikasi dari aspek proses disampaikan oleh para siswa KK Perhotelan. Indikasi tingkat kompetensi lulusan ternyata beragam antarsekolah, dari tidak berhasil sampai cukup berhasil. Sekolah yang tidak berhasil memberikan pembekalan kewirausahaan kepada siswa perhotelan diindikasikan oleh tidak diketahuinya manfaat pembelajaran PKK justru oleh subyek pembelajaran itu sendiri. Bahkan sejumlah siswa menyatakan bahwa Mapel PKK itu tidak ada gunanya dan siswa-siswa yang lain menyatakan bahwa jumlah jam pelajaran Mapel PKK harus dikurangi. Pada sekolah yang kurang berhasil, siswa pada umumnya merasa bangga memperoleh materi dan melaksanakan praktik kewirausahaan pada mapel PKK. Namun, sekolah ini belum sampai pada tingkat mengembangkan siswa menemukan produk kreatifnya sendiri, karena produk yang diusahakan itu adalah buah pikiran guru. Pada sekolah yang cukup berhasil, siswa merasa bahwa mereka ternyata dapat menemukan peluang usaha sendiri dan melaksanakan praktik pembukaan usaha atas pilihan

sendiri dan berhasil. Para siswa diberi ruang dan peluang untuk kreatif, baik dalam menentukan kelompok siswa dan jenis usaha atau bisnis yang akan dibuka oleh kelompok tersebut.

B. FAKTOR-FAKTOR TERKAIT DENGAN KETERCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN

Terdapat sejumlah faktor utama terkait dengan capaian kompetensi lulusan sebagai calon pekerja, dengan catatan bahwa kenyataan yang terjadi di sekolah dan guru sangat beragam. Faktor-faktor tersebut a.l. adalah kurikulum yang kadaluwarsa dan kurang layak untuk dilaksanakan, kekurangan sumberdaya, yang berdampak pada kurang-optimalan proses pembelajaran, serta sikap sekolah yang seakan berada pada menara yang kokoh terpisah dengan dunia kerja yang sekolah siapkan tenaga kerjanya.

Untuk memahami faktor-faktor terkait dengan kompetensi lulusan sebagai calon pelaku wirausaha, perlu digaris bawahi bahwa pelaku wirausaha juga memerlukan keterampilan membuat produk barang atau jasa, walaupun ia tidak terikat untuk mengusahakan produknya sendiri. Dengan demikian faktor-faktor terkait dengan kompetensi lulusan dalam membuat produk barang dan jasa, juga merupakan faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi lulusan sebagai calon pelaku wirausaha. Dengan catatan faktor-faktor tersebut tidak merupakan faktor utama apabila usaha yang dibuka adalah pemasaran dan penjualan produk saja, sementara produknya dipesan ke pihak lain, yaitu pembuat produk.

Faktor-faktor terkait dengan kompetensi lulusan sebagai calon pelaku wirausaha dipengaruhi oleh kompetensi GMP pengampu dalam dua hal, yakni kompetensi membuka dan mengelola usaha dan pemberian peluang dan ruang kepada siswa untuk mengembangkan dan menyalurkan kreatifitasnya. Penetapan pengampu mapel PKK dan pengampu tersebut menggunakan strategi yang tepat, dipengaruhi oleh pola pikir (*mind set*) manajemen di tingkat sekolah dan program studi tentang fungsi mapel PKK yakni menyiapkan satu dari dua tujuan pendidikan SMK, yakni penyiapan siswa untuk menjadi calon pelaku wirausaha.

1. Kurikulum

Terdapat tiga masalah dengan kurikulum SMK yang berlaku. Pertama, terlalu padatnya materi pembelajaran yang disembunyikan di balik struktur kurikulum yang berisi materi pembelajaran pada keseluruhan 6 semester pendidikan SMK 3 tahun, padahal pada kenyataannya ada PKL selama 6 bulan yang harus diikuti siswa, dan 3 ujian akhir di semester 6 ketika pembelajaran direncanakan sampai 33 jampel/minggu. Adanya dua kegiatan penting yang tersembunyi ini menjadikan pembelajaran harus digeser ke semester 1 s.d. 4 yang sudah ada jadwal pembelajarannya sendiri, sehingga penyampaian materi selama masa pendidikan 3 tahun tidak optimal.

Kedua, materi pembelajaran praktik yang kadaluwarsa. Ini disampaikan oleh siswa yang sudah melaksanakan PKL, alumni, dan pelaku industri. Siswa yang sudah melaksanakan PKL menyatakan bahwa prosedur kerja yang diajarkan di sekolah berbeda dengan yang mereka temukan di industri. Di sisi lain, alumni yang sudah bekerja secara “mapan” di industri yang secara berkala diundang untuk mengisi materi pembelajaran di sekolah dalam program Kelas Alumni, juga menyatakan kadaluwarsanya materi pembelajaran praktik. Pernyataan ini tidak hanya diberikan oleh alumni di beberapa provinsi sampel, tetapi juga di Jakarta ketika diadakan kegiatan pendahuluan. Sementara itu, dalam nada yang sama, pelaku industri pariwisata menyatakan bahwa materi pembelajaran praktik di sekolah tidak sesuai dengan kenyataan di dunia kerja.

Ke tiga, alokasi waktu pembelajaran praktik tidak dicantumkan dalam struktur kurikulum ataupun pedoman-pedoman operasional lainnya, dan secara implisit diserahkan kepada GMP. Ini berbeda dengan yang terjadi pada pendidikan menengah vokasi yang dikelola oleh KKP maupun Kemenhub. Prinsip bahwa banyaknya waktu materi pembelajaran praktik yang diserahkan kepada guru menjadikan sangat beragamnya pengalaman praktik siswa, sebagaimana disimpulkan dari pernyataan alumni dan siswa. Alumni memberikan kesaksian bahwa selama bersekolah tidak ada praktik sama sekali. Hal senada dalam kadar yang lebih ringan, dinyatakan oleh siswa bahwa praktik hanya dilaksanakan 3 sampai 4 kali dalam satu tahun, dan siswa kompetensi keahlian lain menyatakan bahwa praktik hanya 1 kali dalam satu tahun, yaitu praktik *table manner* di salah satu hotel di kota lain. Siswa sekolah yang sama juga menyatakan bahwa praktik mengenakan peralatan tertentu yang sudah tersedia di sekolah tidak semuanya dilaksanakan oleh guru mapel produktif dengan alasan bahwa bahan yang digunakan harganya sangat mahal, bukannya tidak dapat disediakan oleh sekolah.

2. Beban kerja dan kompetensi GMP yang ada serta upaya pemenuhannya

a. Kekurangan, beban kerja, kompetensi GMP yang ada beserta risikonya

Kekurangan akut jumlah GMP. Bidang Keahlian Pariwisata mengalami kekurangan akut jumlah GMP, yakni 38 persen dari jumlah yang seharusnya ada. Kekurangan paling parah terjadi pada Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Wisata yang mencapai 51 persen dari jumlah yang seharusnya ada. Kekurangan jumlah GMP tersebut terjadi karena (i) pembukaan bidang atau program keahlian baru tidak dibarengi dengan pengadaan GMP-nya secara memadai, dan (ii) guru pensiun yang tidak tergantikan.

Beban kerja GMP. Kekurangan akut jumlah GMP tersebut, menjadikan beban kerja GMP luar biasa berat, dan beratnya beban kerja ini dipengaruhi oleh 5 faktor. Pertama, hanya dari kekurangan jumlah saja, beban kerja mereka sudah mencapai 2 kali lipat dari beban kerja guru secara normal, yakni untuk PK Perhotelan dan Jasa Wisata, yang kekurangannya mencapai 51 persen dari kebutuhan yang ada, sementara Bidang Keahlian Pariwisata secara keseluruhan kekurangannya mencapai 38 persen.

Ke dua, beban kerja terselubung yang tidak dimunculkan di Struktur Kurikulum (SK), yakni prakerin/PKL 6 bulan, dan pelaksanaan 3 ujian akhir ketika pada saat yang sama di SK terdapat beban pembelajaran @ 31 jp/minggu dan @ 33 jp/minggu. Akibatnya terjadi pemajuan pembelajaran dari Semester 3 dan 5 ke Semester 1 dan 3, dari dari Semester 6 dan 4 ke semester 2 dan 4 sehingga menumpuk di semester ganjil menjadi 53 jp/minggu (setara 39,75 jam @ 60 menit per minggu tatap muka saja), dan di semester genap menjadi 55 jp/minggu (setara 41,25 jam @ 60 menit per minggu).

Ke tiga, dalam situasi kekurangan GMP, sekolah cenderung memaksimalkan jumlah siswa per rombel, mendekati atau mencapai 36 siswa, untuk meminimalkan jumlah rombel paralel. Jumlah siswa per rombel sangat besar ini menyulitkan GMP sendirian membimbing praktik dengan memberi perhatian dan kesempatan sama per siswa dan bebas kecelakaan.

Ke empat, tugas-tugas tambahan berupa “proyek” (*block grant*) dari Dit. PSMK. Tugas-tugas tambahan ini a.l. adalah sebagai pimpro, sekretaris, bendahara, dan anggota tim. Dalam pelaksanaannya tugas-

tugas tambahan tersebut cenderung dibebankan kepada GMP sebagai. Guru-guru mapel non-produktif biasanya menganggap bahwa itu bukan bagian dari tanggung jawab mereka. Niat baik Dit. PSMK meningkatkan kualitas pembelajaran di atas pengorbanan GMP dengan beban kerja administratif yang seharusnya bukan beban guru.

Ke lima, kekurangan GMP yang akut cenderung menjadikan tugas-tugas melekat – yakni dari PPDB sampai ujian akhir -- tidak dihitung sebagai jam kerja, dan ini memperberat beban kerja GMP. Tugas-tugas ini misalnya wali kelas dan kaprodi (beban kerja selama 6 semester), serta panitia/penguji untuk ke-3 ujian akhir, dan panitia PPDB (beban kerja di Semester 6, PPDB pada masa liburan sekolah sebelum tahun ajaran baru).

Tidak semua GMP yang ada berkompeten. Dari aspek kualitatif, tidak semua GMP yang ada memiliki kompetensi sebagai instruktur pembimbing praktik siswa. Kurangnya kompetensi pada aspek-aspek pembimbingan praktik dasar, serta pembentukan karakter kerja baik karakter kerja sebagai calon pekerja, apalagi sebagai calon pembuka lapangan kerja. Tingkat kompetensi yang belum memadai pada penyiapan siswa sebagai calon pekerja ini terjadi pada kedua aspek penting penyiapan kerja, yakni pembentukan keterampilan atau keahlian kerja dan penanaman sikap kerja. Bahkan diindikasikan bahwa tingkat penguasaan sikap kerja sebagian GMP-pun kurang memadai.

Sedangkan pada penyiapan siswa sebagai calon pencipta lapangan kerja, kekurangkompetensian sebagian GMP ini diindikasikan oleh tidak dikembangkannya proses kreatif siswa dalam menentukan produk yang akan dibuatnya, baik produk barang maupun jasa. Pihak yang justru kreatif dalam menentukan produk yang akan dibuat ternyata adalah para guru pengampunya sendiri, bukan pada siswa. Siswa hanya menurut saja ditugaskan untuk melaksanakan praktik penjualan produk jasa, yang jenis produknya ditentukan oleh guru pengampunya.

Kualitas praktik dasar dalam rangka penyiapan calon pencipta lapangan kerja terkelompok menjadi 3, yakni tidak optimal, kurang optimal, dan cukup optimal. Tingkat keoptimalan ini dipengaruhi oleh kepemilikan wawasan GMP pengampu mapel PKK tentang pentingnya pemberian peluang dan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Hal ini dipengaruhi oleh sinergi level manajemen sekolah terbawah yang dikoordinasikan oleh kepala

program keahlian dalam menentukan strategi pembinaan kewirausahaan siswa melalui mapel PKK. Selanjutnya, pemilihan GMP yang tepat untuk mengampu mapel PKK dipengaruhi oleh kerangka pikir (*mindset*) manajemen sekolah tertinggi terkait dengan mapel PKK sebagai wahana pencapaian tujuan ke dua SMK, yaitu membentuk calon pelaku wirausaha pencipta lapangan kerja

Resiko dari situasi GMP saat ini. Resiko langsung langsung dari kekurangan jumlah GMP yang akut adalah penumpukan beban kerja kepada GMP yang ada. Beban kerja GMP yang sangat berlebihan, sebagai contoh untuk PK Perhotelan dan Jasa Wisata sampai 2 kali lipat beban kerja normal, menjadikan efektifitas pembelajaran praktik rendah. Sementara itu beban kerja GMP juga diakibatkan oleh ukuran kelas yang besar, penumpukan beban mengajar karena tersembunyinya kegiatan PKL dan masih adanya pembelajaran pada Semester 6 ketika terdapat penyelenggaraan ujian-ujian akhir, dan 2 jenis beban administratif sekolah. Ke-5 beban tersebut menjadikan beban kerja GMP menjadi sangat besar, lebih dari 2 kali beban kerja normal, ditambah tidak semua GMP berkompeten, maka resiko akhirnya adalah pelaksanaan pembekalan praktik dasar yang sangat tidak optimal dan ini menjadikan kompetensi lulusan yang tidak memadai.

b. Upaya pemenuhan kebutuhan yang dilaksanakan akhir-akhir ini

Upaya pemenuhan kebutuhan GMP akhir-akhir ini. Pengadaan guru baru sejak tahun 2017 s.d. 2019 nampaknya tidak menghasilkan GMP yang berkompeten. Program Keahlian Ganda (PK Ganda) tidak menghasilkan GMP yang berkompeten, karenanya dihentikan pada Angkatan ke-2. Pengangkatan guru berpendidikan S1 non-LPTK juga cenderung kurang kompeten sebagai GMP dalam posisi sebagai instruktur praktik. Kompetensi lulusan S1 non-LPTK (Level 6 SKKNI) bukan merupakan tumpukan dari berbagai kompetensi sebagai operator (Level 2). Lulusan S1 dengan KKNi Level 6 SKKNI tidak disiapkan untuk memiliki kompetensi sebagai operator, sehingga mereka mengalami kesulitan ketika harus mengajar calon-calon operator. Bagaimana mereka mampu mendidik calon operator apabila mereka sendiri tidak memiliki kompetensi sebagai operator?

Tidak berhasil dilahirkannya GMP yang berkompeten ini mungkin juga terjadi pada pengadaan tahun-tahun sebelumnya yang merekrut lulusan dari berbagai LPTK dan perguruan tinggi umum, negeri dan swasta. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi ini cenderung menyipakan lulusannya dengan koordinasi minimal dengan pengelola

dan pelaku sektor pariwisata (kalaupun ada koordinasinya) pada kondisi LPTK yang kurang optimal dalam membekali kompetensi kejuruan bagi calon GMP yang diandalkan untuk menyiapkan lulusan SMK yang memiliki level kompetensi operator menurut KKNI. Kekurang optimalan ini dipengaruhi oleh 3 hal, yakni kekurangan dosen berpengalaman industri pariwisata, kalaupun ada, kekurangan bahan dan peralatan praktik, dan juga biaya operasional penyelenggaraan praktik bagi calon guru SMK secara sendirian.

c. **Praktik baik pemenuhan kebutuhan GMP**

Pemenuhan kebutuhan GMP baru dikelompokkan menurut 2 sudut pandang, yakni status guru dan lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pemenuhan. Menurut status, kebutuhan GMP dapat dipenuhi dengan mengangkat guru berstatus guru tetap atau tidak tetap. Menurut lamanya waktu untuk proses pemenuhan dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni panjang, sedang, dan pendek. Pemenuhan kebutuhan GMP dengan status guru tetap, dilakukan melalui 4 pola, yakni pendidikan khusus calon GMP baru di perguruan tinggi yang memerlukan waktu mencapai 5 tahun, *retraining* kelebihan guru mapel adaptif yang memerlukan waktu kurang dari 1 tahun, dan pola pindah karir dari industri pariwisata menjadi instruktur SMK, baik melalui pola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) maupun Pola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memerlukan waktu pemrosesan saja. Pemenuhan kebutuhan GMP dengan status guru tidak tetap dapat dilakukan melalui 2 pola, yakni pola Guru Tamu dan Kelas Alumni yang dapat dilaksanakan secara hampir instan.

1) **Pemenuhan kebutuhan GMP dengan proses cepat melalui pengadaan guru tidak tetap melalui pola Guru Tamu (GT) dan Kelas Alumni (KA).**

Guru tamu (GT) adalah praktisi industri pariwisata yang datang ke sekolah, yang secara sederhananya adalah, untuk mewartakan kenyataan mutakhir tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di dunia kerja. GT ini dicontohkan oleh asosiasi profesi IHGMA (untuk KK Perhotelan) serta ICA dan PCPI (untuk KK Kuliner dan Mapel *F & B Service* dari KK Perhotelan).

KA memiliki kesamaan dengan GT dalam hal kedatangan praktisi dari industri. Namun, KA berbeda dari GT dalam empat hal, yakni: (i) diisi oleh praktisi yang merupakan alumni sekolah yang didatangi, (ii) cenderung diisi oleh pelaku industri yang

berusia muda, menempatkan diri sebagai kakak, serta berbahasa tubuh dan berbicara layaknya teman ketika menyampaikan informasi kepada siswa, (iii) dukungan ke sekolah cenderung berbasis hubungan pribadi, bukan hubungan organisasional seperti GT IHGMA atau semi pribadi-semi organisasional GT ICA, dan (iv) program GT dibatasi oleh bidang pekerjaan (pada contoh diatas adalah KK perhotelan dan KK Kuliner), sementara KA dapat meliputi seluruh KK SMK Pariwisata. Selain itu KA sudah dipraktikkan di banyak SMK Pariwisata, walaupun belum merata ke seluruh daerah.

Kegiatan guru tamu IHGMA merupakan kerjasama asosiasi bersama Kemenpar dalam program *One GM - One SMK*. GM hotel diharapkan melakukan penyegaran wawasan dan pengetahuan siswa dan juga GMP melalui pengisian waktu pembelajaran. Program ini beragam dari 1 GM membantu 1 SMK, 1 GM membantu beberapa SMK, dan beberapa GM mendukung 1 atau beberapa SMK. Keterbatasan program ini adalah belum meratanya keberadaan dan keaktifan asosiasi ini di berbagai daerah, dan pembebanan biaya transport personel IHGMA kepada sekolah dalam kondisi butir pembiayaan tersebut tidak tercantum sebagai butir pengeluaran yang dapat dibiayai menggunakan dana BOS.

Kegiatan GT dari asosiasi *chefICA* dikemas dalam Program *ICA Goes to School*. Melalui program ini para *chef* melakukan dua jenis pengkinian, yakni kurikulum serta praktik yang tentu saja diperkaya dengan pengetahuan terkini. Dalam melaksanakan dukungannya terhadap SMK, guru tamu dari ICA ini tidak dibiayai kedatangannya oleh sekolah. Program *ICA Goes to School* juga mengalami kendala yang sama yaitu keberadaan dan keaktifan organisasi di daerah.

2) Pemenuhan guru tetap dengan proses yang cukup makan waktu melalui pendidikan khusus calon GMP baru

Pendidikan khusus ini memiliki 2 karakteristik, yakni jumlah mahasiswa yang didik dan LPTK penyelenggaranya. Pertama, pemenuhan kebutuhan GMP ini semestinya dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *demand driven*, yakni pengadaan guru yang jumlah dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan nyata masing-masing SMK, sehingga jumlah mahasiswa baru dibatasi hanya untuk sejumlah GMP yang diperlukan oleh sekolah. Ke dua, LPTK penyelenggara dibatasi hanya LPTK berkompeten

bekerjasama dengan kementerian pembina sektor serta berbagai asosiasi industri dan asosiasi profesi pariwisata.

Karakteristik pola ini adalah sebagai berikut. Dari sisi program, pendidikan khusus ini merupakan program Diploma IV berbeasiswa dan ikatan dinas. Calon mahasiswanya dibatasi pada lulusan SMK Bidang Keahlian Pariwisata (SMK Pariwisata) sesuai KK yang diikuti agar pembentukan karakter kerjanya optimal. Materi pendidikannya terdiri dari kompetensi pariwisata setara 3 tahun, kompetensi pedagogi setara 1 tahun, termasuk praktik di industri selama 1 tahun, dan praktik pedagogi. Praktik industri selama 1 tahun tersebut terdiri dari praktik sebagai pekerja dan sebagai penyelia. Praktik pedagogi utamanya adalah praktik mengampu mapel produktif di SMK Pariwisata bermutu, sehingga calon guru mengetahui pendidikan vokasi yang baik itu seperti apa. Materi-materi tersebut terdiri dari 30 persen teori dan 70 persen praktik.

Dari sisi penyelenggaraan, untuk menyiapkan GMP yang mampu menyiapkan lulusan SMK yang kompetensinya selalu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja diperlukan sinergi penyiapan calon GMP SMK Pariwisata dengan pelaku pendidikan SDM pariwisata yang bermutu dan pelaku industri pariwisata. Contoh praktik baik yang telah dilakukan adalah penyiapan calon GMP seluruh SMIP di bawah Kemdikbud yang pada waktu itu akan dibuka (sekarang SMK Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Wisata). Penyiapan calon GMP Bidang Keahlian Perhotelan dan Jasa Wisata (pada waktu itu SMIP) tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan kedua sekolah tinggi (sekarang politeknik) pariwisata di bawah Kemenpar bersama LPTK berkompeten terdekat. Penyiapan tersebut dilakukan oleh STP Bali (sekarang Poltekpar Nusa Dua) bersama Fakultas Pendidikan Univ. Udayana (sekarang Undiksha) serta STP Bandung bersama IKIP Bandung (sekarang UPI). Kedua upaya penyiapan ini berlangsung selama 6 angkatan yang terbukti berhasil menyiapkan generasi-generasi awal GMP di bidang perhotelan dan jasa wisata untuk seluruh SMIP di bawah Kemdikbud yang baru dibuka (sekarang SMK Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Wisata).

Kerjasama atau sinergi dengan pelaku industri pariwisata meliputi kerjasama dengan asosiasi-asosiasi industri dan asosiasi-asosiasi profesi. Kerjasama tersebut ditujukan juga untuk memenuhi dua masalah dalam pembiayaan Guru Tamu IHGMA dan magang

guru. Terkait dengan pembiayaan kedatangan GT dari IHGMA, kerjasama dengan asosiasi industri perhotelan, misalnya PHRI, diharapkan agar, pertama, biaya transport kedatangan GT IHGMA yang merupakan manager atau kepala divisi suatu hotel, dapat dimasukkan sebagai biaya pelaksanaan diklat yang dapat dihargai sampai potongan pajak perusahaan sebesar 200 persen dari pos-pos pendapatan hotel kena pajak sebagaimana diatur melalui Kepmenkeu. Ke dua, membolehkan guru muslimah yang berjilbab untuk melaksanakan magang industri pada seluruh bidang pekerjaan di seluruh hotel bintang empat dan lima, baik yang merupakan jaringan hotel internasional maupun lokal. Ke tiga, terkait dengan magang guru tersebut, semua guru perhotelan yang melaksanakan magang dapat bekerja pada ketiga *shift* pekerja dengan biaya pelaksanaan magang di hotel ditanggung oleh hotel pelaksananya.

Perkiraan mulai bertugas tahun **2026**, apabila memulai kuliah pada bulan Juli 2021 dan akan berada di profesinya s.d. tahun 2060-an. Asumsinya adalah bahwa calon guru mulai bertugas pada umur 23 tahun dan pensiun umur 60 tahun. Dengan ini secara bertahap kebutuhan guru akibat kekurangan guru yang tidak terpenuhi selama ini dan kebutuhan pengganti guru yang pensiun setiap tahunnya akan terpenuhi juga.

3) Pemenuhan guru tetap dengan proses yang perlu waktu sedang melalui *retraining* guru kelompok Mata Pelajaran Adaptif (Kelompok B) yang sudah berlebihan jumlahnya.

Retraining dilaksanakan melalui Program Keahlian Ganda yang sudah disempurnakan, agar peserta program benar-benar menguasai kompetensi sebagai instruktur untuk membimbing siswa praktik dasar di sekolah selama 3 tahun (Program selama 2 angkatan pertama dihentikan karena gagal menyiapkan kompetensi sebagai instruktur praktik dasar yang berkompeten). Penyempurnaan dilaksanakan secara komprehensif, dari penentuan peserta sampai penyelenggaranaannya. **Dari sisi peserta**, program diikuti oleh guru besertifikat pendidik yang masih memungkinkan untuk menerima kompetensi baru yang jauh berbeda, yakni dari sisi usia tidak lebih dari 45 tahun, menandatangani perjanjian akan mengajar mapel produktif, dan prekrutan atau keikutsertaan disertai dengan kesadaran untuk menghemat pengeluaran negara, tidak atas tunjukan tanpa penyadaran. **Dari sisi program**, kegiatan ini memiliki dua karakteristik. Pertama, penyiapan (termasuk penyusunan materi

dan seleksi calon peserta), pelaksanaan, serta evaluasi program dan tindak lanjut evaluasi dilaksanakan melalui **sinergi dengan para pihak terkait**, yakni kementerian dan KL pembina sektor, misalnya Kemenpar dan Bekraf, serta asosiasi industri dan asosiasi profesi kepariwisataan yang sesuai, tidak sendirian oleh Kemdikbud apalagi hanya oleh satu P4TK. Misalnya, program untuk GMP KK Perhotelan bersama PHRI, IHGMA, IHGM, dan IHKA; program untuk KK UPW bersama ASITA, HPI, dll; program untuk KK Tata Boga bersama ICA, IPA, PCPI, PHRI; program untuk KK Tata Kecantikan bersama Tiara Kusuma; dan program untuk KK Tata Busana bersama IPB Kartini, IPMI dll. Ke dua, PK Ganda ini ditujukan **khusus untuk pembentukan kompetensi keahlian instruktur praktik dasar**. Pengakuan kompetensi dari isi pedagogi diharapkan sudah terwakili oleh kepemilikan sertifikat guru. **Waktu penyelenggaraan** selama 3 tahun, yang 80 persen diantaranya untuk praktik, termasuk praktik di industri. Untuk KK Perhotelan, praktik dilaksanakan meliputi ke-3 shift kerja di hotel, karena ada jenis pekerjaan yang hanya dilakukan pada *shift* tertentu.

Apabila program dimulai pada Januari 2021 dan peserta berusia maksimal 45 tahun maka GMP yang dihasilkan akan bertugas minimal selama 14 tahun, yakni s.d. tahun 2036. Program ini berjalan berkesinambungan sampai kelebihan guru mapel adaptif tidak ada lagi.

4) **Pemenuhan guru tetap dengan proses cepat melalui perpindahan karier dari pelaku industri pariwisata menjadi pendidik**

Perpindahan karier dari pelaku industri menjadi pendidik dilakukan melalui pola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Melalui pola RPL ini pendidikan terakhir ditambah pengalaman kerja di industri pariwisata dari pelaku industri pariwisata dapat dikonversi menjadi jenjang pendidikan yang disyaratkan bagi pendidik SMK Pariwisata. Konversi tersebut dilakukan oleh Tim Khusus. Untuk melaksanakan pola ini diperlukan payung hukum yang berupa keputusan Mendikbud dan pedoman operasionalnya oleh Dirjen GTK. Pola ini mengacu pada praktik perekrutan instruktur politeknik maritim dari pelaku industri maritim, level supervisor ke atas, misalnya nahoda kapal yang telah dilaksanakan. Pola ini disahkan melalui Permenristek dan Dikti no. 26 th. 2016 yang ditindaklanjuti oleh

SK Dirjen Belmawa no. 123-B-SK-2017 th. 2017 dan dilaksanakan mulai tahun 2017 itu juga.

Di sisi lain program PPPK menyediakan peluang proses khusus pengangkatan sebagai ASN yang diatur melalui UU no. 5 th. 2014 dan ditindaklanjuti dengan PP no. 49 th. th. 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pelaku industri pariwisata berumur s.d. 59 tahun, yakni 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar, berpeluang mengikuti pola ini (ps. 6 butir a, PP tersebut). GMP dalam status ini memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, dan perlindungan.

Sisi positif dari pemenuhan guru tetap melalui perpindahan karier ini adalah kepemilikan kompetensi sebagai GMP sudah teruji karena mereka melakukannya sehari-hari. Satu keterbatasan yang mungkin ditemui, sehingga berpotensi mengurangi minat pelaku industri pariwisata adalah tidak diterimanya jaminan pensiun.

d. Peningkatan dan pengkinian kompetensi GMP

Arti penting peningkatan kompetensi. Pengelolaan GMP cukup pelik, karena tingkat kompetensi GMP beragam, sementara itu di sisi lain industri pariwisata selalu berubah, baik teknologi yang digunakan dan lingkungan industrinya. Akibatnya persyaratan kompetensi minimal lulusan SMK yang akan bekerja selalu berubah, oleh sebab itu untuk menghasilkan GMP yang mampu menghasilkan lulusan semacam itu kompetensi GMP-nyalah yang harus dikedepankan lebih dahulu. Bagi GMP yang berkompeten saja, setiap kali harus dikedepankan atau ditingkatkan kompetensinya agar selalu sesuai dengan kemajuan industri pariwisata, lalu bagaimana dengan GMP yang kompetensinya belum memadai? Saat ini ditingkatkan setahap, esok lusa sudah ketinggalan lagi.

Strategi peningkatan kompetensi. Terdapat dua strategi untuk meningkatkan kompetensi dan mengkinikan kompetensi guru. Strategi pertama adalah pelatihan. Aspek positif pelatihan adalah dapat menggapai sasaran dalam jumlah besar. Aspek negatifnya adalah perlu dilakukannya pengkinian kompetensi terhadap pelatih terlebih dahulu, baru pelatihnya mengkinikan kompetensi GMP peserta pelatihan. Konsekuensinya adalah bahwa peserta

pelatihan tidak pernah terkinikan, hanya meningkat kompetensi, tetapi selalu ketinggalan.

Strategi ke dua adalah magang di industri pariwisata. Aspek positifnya adalah GMP langsung terkinikan kompetensinya ketika ia ikut melaksanakan pekerjaan di industri. Aspek negatifnya adalah, pertama, terbatasnya kesempatan magang di industri pariwisata. Ke dua, magang mensyaratkan pesertanya adalah GMP yang sudah kompeten. Magang tidak dapat diikuti oleh GMP yang belum kompeten.

Strategi pelaksanaan peningkatan kompetensi. Pengkinian kompetensi GMP Pariwisata merupakan upaya berkelanjutan karena industri pariwisata berubah terus menerus. Pengkinian kompetensi secara berkelanjutan ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah upaya pengembangan dan pemberdayaan guru. Dari sudut pandang ini, karena sektor pariwisata berubah secara dinamis, maka lulusan SMK Pariwisata juga harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berubah secara dinamis. Untuk itu GMP harus dikembangkan kompetensinya sehingga berdaya menghadapi tantangan perubahan persyaratan pasar kerja yang harus dipenuhi oleh lulusan SMK. Dari sudut pandang ini, peningkatan dan pengkinian kompetensi GMP SMK Pariwisata masuk ke dalam lingkup tugas dan fungsi P4TK Bispar.

Sudut pandang ke dua, peningkatan dan pengkinian kompetensi merupakan upaya untuk penjaminan mutu (*quality assurance, QA*) GMP. GMP harus dipastikan kualitasnya atau kompetensinya agar ia selalu mampu untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi persyaratan pasar kerja yang terus menerus berubah. Selanjutnya, mengingat bahwa SMK berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi, maka upaya QA terhadap GMP SMK merupakan lingkup tugas dan fungsi LPMP provinsi.

Mengingat adanya dua sudut pandang terhadap pelaksanaan peningkatan dan pengkinian kompetensi GMP, maka kedua lembaga tersebut perlu bersinergi. Selain dari alasan adanya tumpang-tindih tugas dan fungsi, sinergi tersebut juga diperlukan karena keduanya memiliki keterbatasan untuk melaksanakan peningkatan dan pengkinian kompetensi GMP secara sendiri-sendiri. P4TK Bispar memiliki keterbatasan karena lembaga ini bertanggungjawab terhadap pengembangan guru-guru pengampu dari 110 jenis mata pelajaran pada SMK penyelenggara BK

Bisnis dan Manajemen serta SMK penyelenggara BK Pariwisata. Sebuah tugas berlingkup luas yang sulit dilaksanakan sendiri. Di sisi lain, LPMP juga tidak mampu melaksanakan tugas peningkatan kompetensi ini, karena penjaminan mutu GMP BK Pariwisata bukan satu-satunya BK yang diurusnya. LPMP melaksanakan penjaminan mutu bagi pendidik seluruh mapel yang ada mulai dari PAUD sampai sekolah menengah di wilayah provinsinya.

3. Kekurangan biaya operasional untuk melaksanakan pembelajaran praktik dasar di sekolah beserta resikonya dan praktik baik pencarian dukungan pelaksanaannya

a. Kekurangan pembiayaan praktik dasar dan resikonya

Kekurangan biaya operasional untuk melaksanakan pembelajaran praktik dasar di sekolah ini diindikasikan oleh dua hal, yakni perbandingan terhadap biaya standar dan keluhan sekolah. Biaya operasional SMK Pariwisata, sebagaimana disalurkan melalui BOS Reguler, sangat tidak memadai, yakni berupa jauh lebih rendahnya biaya operasional yang disediakan oleh Pemerintah dibanding dengan Standar Biaya Operasional Nonpersonal yang disusun oleh Pemerintah sendiri. Perbandingan berikut mengabaikan kenyataan bahwa BOS itu ternyata peruntukannya tidak dibatasi pada pembiayaan pengeluaran operasional nonpersonal, tetapi juga dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional personal, misalnya honor bagi guru honorer. Perekrutan guru honorer ini pada umumnya merupakan dampak dari kekurangan GMP.

Besarnya BOS, yakni Rp 1,6 juta per siswa per tahun, tersebut hanya bernilai mendekati 35 persen dari standar biaya operasional nonpersonal SMK Pariwisata, yang seharusnya sebesar Rp 4.605 per siswa per tahun pada tahun 2019. Apabila pemanfaatan BOS untuk pembiayaan operasional personal dikeluarkan dari perhitungan, maka dalam kenyataannya persentase kecukupan BOS untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan operasional nonpersonal SMK Parwisata menjadi lebih rendah lagi.

Dari sisi lain, individu sekolah, yang mungkin tidak menyadari standar biaya tersebut atau walaupun tahu juga tidak menghitungnya secara teliti, merasakan sendiri betapa ketidakcukupan biaya operasional tersebut. Berkenaan dengan itu para kepala sekolah mempertanyakan selisih BOS SMK terhadap BOS SMA yang hanya sebesar Rp 200/siswa/tahun atau sekitar hanya 12,5 persen dari BOS

SMK. Padahal manajemen sekolah dan para guru SMK mengetahui bahwa jenis praktik SMA sangat sedikit dan tidak memerlukan bahan praktik yang mahal apalagi mesin yang berdaya listrik sangat besar.

Resiko dari kekurangan besar-besaran biaya operasional nonpersonal ini dirasakan sampai ke kompetensi lulusan, yaitu **kompetensi lulusan yang rendah, sebagaimana diungkapkan oleh para pelaku industri**. Biaya yang tidak mencukupi menjadikan rendahnya kualitas dan kuantitas praktik dasar di sekolah sehingga ketika PKL, siswa kompetensi siswa berada di bawah batas minimal kompetensi dasar yang diperlukan untuk meningkatkan diri ke kompetensi lanjutan

Walaupun ada perusahaan yang berkomitmen tinggi terhadap pembentukan SDM berkualitas, sampai bersedia mengulang pemberian pengetahuan dan praktik dasar selama 67 persen dari waktu PKL 6 bulan, namun hasil akhirnya, yaitu praktik lanjutan yang hanya 2 bulan, tetap kurang memuaskan apabila dibandingkan dengan praktik lanjutan yang dilaksanakan 6 bulan secara utuh.

Apalagi kalau perusahaan tempat para siswa melaksanakan PKL membiarkan saja mereka langsung mengikuti proses kerja di perusahaan. Apabila kekurangan kompetensi dasar tersebut terlalu besar, siswa tidak akan banyak memperoleh pengalaman melaksanakan praktik lanjutan karena pengetahuan dan keterampilan dasarnya tidak memadai. Hasilnya dapat diduga, walaupun siswa telah mengikuti PKL, kompetensinya tidak banyak meningkat dari kompetensi seadanya yang diperoleh di sekolah. Inilah salah satu faktor yang berkaitan dengan rendahnya kompetensi lulusan.

b. Praktik baik pencarian dukungan penyelenggaraan praktik dasar yang telah dan dapat diadopsi atau adaptasi

Upaya-upaya sekolah untuk memperoleh tambahan sumberdaya untuk melaksanakan pembelajaran praktik dasar dapat dikelompokkan menjadi dua. Keduanya adalah menggalang dana dari pemprov dan orang tua serta membuat usaha sendiri.

Penggalangan dukungan dari pemprov dan orangtua. Penggalangan dukungan dari pemprov terkendala oleh kenyataan bahwa tidak semua pemprov memiliki kemampuan dan kemauan mendukung SMK Pariwisata yang sama tingginya, sehingga **dukungan hanya dapat diharapkan dari sejumlah kecil provinsi** saja. Kontribusi pemprov dalam mendukung pembiayaan SMK ternyata dipengaruhi oleh 3 faktor. Ketiganya adalah kemampuan dan

komitmen finansial pemprov yang sebenarnya dalam mendukung pemberian layanan pendidikan bagi warga provinsinya, serta visi pemprov tentang pariwisata dan pentingnya penyiapan SDM pariwisata melalui SMK Pariwisata. Hanya terdapat 8 provinsi di luar DKI yang memiliki kemampuan dan komitmen finansial pemprov yang sebenarnya dalam mendukung pemberian layanan pendidikan bagi warga provinsinya. Di antara ke-8 pemprov tersebut, hanya DIY yang merupakan provinsi yang kesejahteraan daerahnya tergantung dari sektor pariwisata dan memberi dukungan pembiayaan operasional besar-besaran kepada SMK, hingga mencapai 186 persen lebih besar dari BOS. Kaltim, yang kesejahteraan daerahnya tergantung pada sektor pertambangan, mendukung SMK Pariwisata dengan filsafat “beri kail, jangan ikannya” dalam bentuk pembangunan hotel pendidikan (*edotel*) bagi SMK Pariwisata, agar dengan itu dapat mencari tambahan dana sendiri.

Penggalangan dukungan dari orangtua terkendala di sejumlah provinsi tertentu, namun tidak berarti bahwa tidak ada yang berhasil melakukannya sama sekali. Salah satu SMK Pariwisata negeri di Kalimantan Timur, sebagai contoh, berhasil meyakinkan orang tua untuk membantu penyelenggaraan praktik pada KK Kuliner tanpa kegaduhan sosial sama sekali. Terdapat empat strategi yang digunakan oleh para kapro di sekolah tersebut, yakni: pertama, secara terbuka dan terus terang menginformasikan pada waktu PPDB kepada para orang tua siswa pendaftar bahwa praktik kejuruan di sekolah tersebut memerlukan biaya besar, BOS tidak mencukupi untuk keperluan itu, dan pemprov tidak memberikan dukungan biaya, sehingga hanya orangtua yang dapat membantu sekolah mendukung pendidikan keterampilan anaknya di SMK. Ke dua, sejauh mungkin menghindari dukungan berupa uang kontan agar tidak ada kecurigaan penyimpangan dan fitnah. Misalnya, pada praktik pembuatan produk makanan di KK Kuliner siswa membawa bahan mentah sendiri-sendiri untuk praktik secara berkelompok. Ke tiga, hasil praktik siswa, yakni berupa produk makanan, dibawa pulang ke rumah masing-masing, walau sesedikit apapun, (maaf) tidak disantap oleh para guru. Dengan ini maka para orangtua berbahagia melihat anaknya dapat membuat produk kuliner tersebut, bahkan ikut mencicipinya. Ke empat, ketika diperlukan praktik di luar sekolah, misalnya praktik *table manner* (etika makan secara formal) pada KK Perhotelan, yang harus dilakukan di hotel setempat, biaya pengganti harga makanan dan minuman yang disajikan oleh hotel dan disantap oleh para siswa ini, dikumpulkan oleh siswa, diserahkan kepada bagian keuangan hotel juga oleh siswa, dan kuitansi juga disampaikan oleh hotel langsung kepada siswa. GMP

hanya mendampinginya, tanpa menyentuh uang pembayaran dan/ataupun menyimpan kuitansinya.

Pembentukan usaha oleh sekolah dilakukan dalam 2 pola, mula-mula sekolah mencari tambahan biaya dengan membangun usaha sendiri melalui pendirian hotel pendidikan (*education hotel*, *edotel*, atau *edutel*), kemudian berkembang dengan menjadikan sekolah sebagai badan usaha dengan menjadikan SMK berstatus badan layanan usaha daerah (BLUD).

Dalam upaya menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang lebih memadai, sekolah diharapkan mengupayakan sendiri dengan membentuk usaha, baik sebagai unit usaha atau unit produksi sekolah maupun sekolah yang menjadi unit usaha atau unit produksi. Pembentukan usaha ini, yang lazim dilakukan adalah melalui pendirian hotel pendidikan (*education hotel*, *edotel*, atau *edutel*) dan menjadikan sekolah sebagai badan usaha dengan status Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

Konsep **edutel** adalah sekolah, d.h.i. KK Perhotelan mengadakan simulasi praktik dengan tiruan hotel yang didirikan di sekolah dan benar-benar menerima tamu dan diselenggarakan layaknya hotel dan menerima pembayaran atas jasa menginap yang diberikan tamu, dan kemudian sekolah secara keseluruhan menggunakan dana yang diterima untuk menambah pengadaaan bahan dan alat praktik habis pakai. Hal terpenting yang tidak dapat mereka pelajari ketika PKL di hotel adalah penghitungan *cash flow* termasuk penyusunan *balans sheet* pemasukan-pengeluaran.

Pembukaan *edutel* ini menemui masalah sejak tahap pengembangan konsep. Konsep penerimaan uang dari pemberian layanan jasa penginapan di SMK Pariwisata yang membuka KK Perhotelan pada saat itu nampaknya tidak dibahas oleh Kemdikbud, dalam hal ini Direktorat PSMK, dengan Kementerian Keuangan. Sehingga ketika *edutel* dioperasikan terjadi perbedaan cara pandang antara ke-2 kementerian tersebut. **Pandangan Kemdikbud dalam hal ini Dit. PSMK** nampaknya adalah bahwa mengingat bahwa biaya operasional yang mampu disediakan oleh Pemerintah tidak memadai dan dukungan dari pemda belum tentu ada, maka dalam rangka membentuk lulusan yang berkompeten diperlukan tambahan biaya operasional untuk praktik. Oleh sebab itu daripada SMK merengek terus minta tambahan biaya praktik dan toh tidak akan dapat juga, perlu dicarikan solusi mandiri, yakni dengan membuat semacam unit produksi, yang untuk SMK Pariwisata adalah *edotel*, yang merupakan gabungan tempat praktik yang “hampir serupa” dengan dunia kerja

sebenarnya, dan sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap kekurangan biaya praktik. **Pandangan Kementerian Keuangan** adalah bahwa SMK negeri – yang biaya modal dan biaya operasionalnya semua dibayar oleh pemerintah – harus menyerahkan penghasilan kepada Pemerintah atau pemprov. Logikanya adalah kalau penghasilan yang diperoleh atas penggunaan SDM, lahan dan bangunan beserta fasilitas praktik, dan biaya operasional termasuk daya dan jasa yang dibayar oleh Pemerintah dan/atau pemprov, maka sudah seharusnya penghasilan itu diserahkan kepada Pemerintah atau Pemda.

Masalah ini memang sudah puluhan tahun terjadi dan Kemenkeu sudah menyediakan solusi yang cukup fair. Kalau SMK negeri ingin mencari penghasilan untuk digunakan sekolah sendiri, disediakan **pola Badan Layanan Umum Daerah**. Sebagai badan layanan umum, SMK dapat mengelola sendiri penerimaan dananya untuk keperluan sekolah. Dengan catatan bahwa setelah masa transisi (masa tenggang, *grace period*) dari pola reguler ke pola BLUD selama tiga tahun terlampaui, sekolah harus memenuhi keperluan pembiayaannya dari penghasilan sendiri. Semua aset Pemerintah, termasuk ASN, diserahkan dan menjadi tanggungjawab badan tersebut. Kaji tindak pola BLUD bagi SMK tengah dilaksanakan oleh Pemprov Jatim.

C. STATUS KERJASAMA SMK PARIWISATA DENGAN PELAKU INDUSTRI PARIWISATA

Kerjasama antar-organisasi, sebagaimana sekolah dengan pelaku industri, diteorikan sebagai mensyaratkan penerimaan manfaat oleh para pihak yang bekerjasama. Manfaat yang diasumsikan diterima oleh pelaku industri adalah lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pelaku industri. Ketika berbagai asosiasi profesi terkait dengan keempat KK pada SMK pariwisata menyatakan bahwa lulusan belum kompeten, maka manfaat dari kerjasama industri-SMK yang didengungkan selama ini baru merupakan asumsi yang cenderung tidak terbukti.

Ketika kenyataan bahwa hubungan antara sekolah dengan pelaku industri belum memberikan manfaat bagi industri, maka penggunaan istilah kerjasama, secara teori, tidak tepat. Istilah yang lebih tepat digunakan disini adalah dukungan atau pemberian bantuan.

Dukungan pelaku industri kepada SMK Pariwisata yang terjadi selama ini sudah hampir menyeluruh, walau beragam dari jenis dukungan dan

intensitasnya antar-sekolah dan daerah. Dukungan tersebut meliputi berbagai bentuk sejak perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, sampai penilaian luaran pendidikan. Satu bentuk dukungan yang belum banyak dilaksanakan oleh industri adalah penempatan kerja lulusan sekolah.

1. Dukungan menurut tahapan pembelajaran

Dukungan pada tahap **perencanaan pembelajaran** adalah penyesuaian kurikulum tahunan sebelum awal pembelajaran. Penyesuaian kurikulum menjelang tahun ajaran ini dilaksanakan oleh kebanyakan sekolah, tidak semua sekolah mengemukakan adanya dukungan penting ini.

Dukungan pada **pelaksanaan pembelajaran** diwakili oleh sebatas kehadiran guru tamu dan pelaksanaan prakerin. Kehadiran guru tamu di sekolah meliputi guru tamu yang merupakan individu alumni sekolah yang telah sukses dalam bekerja pada bidang yang sesuai dengan pendidikannya dan guru tamu dari asosiasi profesi.

Dukungan individu alumni ini kecenderungannya adalah pada perbaikan materi dan proses pembelajaran, yakni praktik kejuruan dan teori pendukungnya. Dukungan perbaikan materi, yang berasal dari kurikulum diberikan oleh alumni dengan memeriksa kurikulum yang relevan dengan proses pembelajaran praktik yang dilaksanakan pada hari itu.

Dukungan individu alumni ini a.l. didasarkan pada keinginan untuk membalas jasa kepada alma maternya. Dalam konteks ini, tidak hanya sekolah yang mendapat manfaat, namun alumninya juga. Manfaat yang diperoleh alumni adalah sudah merasa membalas jasa yang diberikan oleh sekolah. Dengan demikian, hubungan alumni-almamater ini dapat disebut kerjasama. Namun demikian, dukungan alumni ini tidak disampaikan oleh banyak sekolah.

Dukungan asosiasi profesi diwakili oleh ICA untuk berbagai mapel terkait tata boga dan IHGMA untuk berbagai mapel terkait perhotelan. Kehadiran guru tamu dari asosiasi diwakili oleh anggota asosiasi-asosiasi profesi ICA dan IHGMA, namun belum ditemukan dukungan dari asosiasi-asosiasi lain yang telah dan masih operasional, walaupun pernyataan dukungan dari perwakilan asosiasi-asosiasi yang lain sudah ada.

Kehadiran guru tamu anggota kedua asosiasi profesi tersebut memiliki dua perbedaan besar. Guru tamu ICA, yang cenderung menjadi *chef* di hotel besar, memberikan materi ke sekolah pada level praktik harian. Mereka langsung memberikan pembekalan materi pendukung dan langsung

membimbing praktik siswa pada materi pembelajaran sesuai dengan jadwal penyajian materi di sekolah. Di sisi lain, guru tamu dari IHGMA, ada yang berprofesi sebagai GM atau yang diwakili oleh manager divisi, cenderung menyampaikan materi yang bersifat wawasan sesuai program studi pada waktu mereka kuliah, misalnya GM yang pendidikan asalnya adalah Tata Boga menyajikan wawasan pekerjaan pada bidang pemberian layanan tata noga (*F&B services*), tidak memberikan materi pendukung praktik tata boga apalagi membimbing praktik. Walau tidak dapat dipungkiri, ada kasus di salah satu SMK negeri di salah satu provinsi, siswanya menyatakan bahwa guru tamu yang datang hanya mengenalkan hotel yang dikelolanya dan materi-materi yang dinilai siswa bersifat promosi hotel tempat kerjanya.

Perbedaan ke dua adalah sekolah tidak perlu memberi transport atau dana apapun kepada guru tamu dari ICA. Sekolah hanya diminta menyiapkan tempat dan bahan praktik sesuai materi pembelajaran. Guru tamu ICA yang datang dari kota lainpun membiayai perjalanannya sendiri, contoh guru tamu ICA dari Bontang membiayai sendiri perjalanan 2 jamnya ke SMK di Samarinda. Di sisi lain, IHGMA secara organisatoris menyaratkan sekolah memberikan biaya perjalanan bagi guru tamu, walaupun hotel dan sekolah berlokasi di kota yang sama dan memerlukan perjalanan dalam kota yang hanya memerlukan waktu sependek k.l. 20 menit. Bahkan guru tamu dari IHKA berhenti menjadi guru tamu karena honorarium mengajar yang diberikan oleh SMK dinilai terlalu rendah (karena sekolah menggunakan standar pemerintah) dan juga dinilai tidak menghargai profesionalitasnya.

Dalam konteks dukungan ICA kepada sekolah, dapat dikelompokkan sebagai kerjasama. Dalam konteks ini ICA secara organisasi mendapat nama baik. Hal serupa juga terjadi pada IHGMA. Hubungan sekolah-IHGMA dapat dikatakan sebagai kerjasama, karena tujuan IHGMA mendapat nama baik, karena menjadi guru tamu sekolah tanpa meminta bayaran, namun hanya sekedar uang transport.

Dukungan pada **tahap pelaksanaan pembelajaran** berupa pelaksanaan prakerin atau PKL merupakan dukungan pelaku industri yang didapat oleh semua sekolah, kecualibebrpa aKK saja, misalnya KK Tata Busana di dua provinsi. Prakerin ini memiliki dua perbedaan terkait dengan hubungan sekolah dengan pelaku industri yang sekolah siapkan SDMnya. Perbedaan pertama, prakerin, bersama dengan pembahasan kurikulum menjelang tahun ajaran baru nampaknya dilaksanakan karena memang diwajibkan oleh Dit. Dikmenjur kepada sekolah dan kedua kegiatan tersebut memang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh sekolah. Apapun kualitas PKL atau prakerin pasti dilaksanakan. PKL/prakerin yang

berkualitas mensyaratkan siswa peserta prakerin menguasai kompetensi minimal tertentu, sehingga ketika mulai belajar melaksanakan pekerjaan, instruktur tidak perlu memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada level dasar. Perwakilan asosiasi profesi menyatakan rendahnya kepemilikan kompetensi siswa, dan ini berdampak pada rendahnya kompetensi akhir siswa karena sebagian dari waktu siswa digunakan untuk belajar materi-materi dasar di tempat kerja. Ini dicontohkan ketika siswa-siswa KK Tata Kecantikan melakukan prakerin di salah satu salon di selatan Jakarta milik pengurus DPP Tiara Kusuma. Dari 6 bulan masa prakerin, 4 bulan digunakan untuk mempelajari materi-materi dasar secara gratis di perusahaan, 1 bulan menjadi asisten pekerja, dan baru 1 bulan terakhir melakukan pekerjaan sebenarnya, walaupun dalam tingkatan yang lebih sederhana, dengan pengawasan.

Perbedaan ke dua, melalui praktik harian di sekolah yang berkualitas dan prakerin pada industri di bidang pekerjaan yang serupa dan tingkat teknologi yang tepat, kerjasama saling menerima dan memberi manfaat dapat terwujud. Siswa dapat meningkatkan kompetensinya dengan belajar melaksanakan proses pekerjaan yang sebenarnya, dan industri dapat memperoleh manfaat dari produktifitas siswa. Adalah benar bahwa perusahaan harus mengorbankan produktifitas instruktur prakerin (karena sebagian waktu dan perhatiannya digunakan untuk membimbing dan mengawasi siswa), namun pengorbanan tersebut diimbangi dengan jumlah produktifitas kerja beberapa siswa yang dibimbing meskipun dengan produktifitas yang rendah. Tingkat produktivitas siswa pada prakerin berbanding lurus dengan kualitas kompetensi yang diperoleh dari praktik kejuruan harian di sekolah. Diharapkan oleh industri tempat prakerin bahwa tingkat kompetensi siswa mencapai batas minimal untuk magang bekerja dan membantu proses produksi, sehingga industri tidak harus memberi materi yang seharusnya diberikan di sekolah.

Pada contoh siswa Tata Kecantikan di depan, industri hanya menerima manfaat berupa produktifitas siswa selama 1 bulan dalam pengawasan instruktur (lebih rendah dari produktivitas karyawan dan masih mengorbankan produktivitas instruktur yang harus mengawasinya), namun harus melakukan pemberian materi atas biaya industri secara gratis bagi seluruh siswa selama 4 bulan. Sehingga dalam jumlah total, manfaat yang diterima lebih rendah dibanding dukungan yang diberikan. Selain itu, mengingat jarak sekolah ke industri yang ratusan kilometer, perusahaan tidak dapat mengharapkan memperoleh manfaat dari siswa prakerin yang bekerja di salon tersebut dan kenyataannya memang tidak ada.

Selain itu terdapat manfaat sampingan dari industri memberi kesempatan siswa belajar di perusahaan melalui PKL/prakerin, walaupun manfaat ini hanya berlaku pada industri dengan bidang pekerjaan tertentu, misalnya perhotelan. Mengingat bisnis yang berfluktuasi, hotel tidak mengangkat semua karyawannya sebagai pekerja tetap, namun ada pekerja tidak tetap dan ada juga pekerja harian (*daily worker*, DW). DW direkrut ketika di hotel sedang dilaksanakan acara pernikahan atau acara serupa lainnya yang bersifat sesekali dan tidak pasti kapan adanya dan mengundang banyak peserta tidak menginap. Hotel menawarkan kesempatan ini kepada SMK Pariwisata yang pernah mengirim siswa KK Perhotelan-nya prakerin di situ dan siswanya dinilai berkarakter kerja baik. Mereka dipekerjakan sebagai *waiter* (pelayan) dengan status DW. Siswa KK tersebut dipilih karena 1 dari 4 materi pokok KK tersebut adalah pemberian layanan makanan dan minuman (*F & B services*). Perekrutan siswa untuk menjadi DW hotel ini termasuk sebagai bentuk kerjasama antar-organisasi, yakni industri menerima manfaat berupa ketersediaan tenaga kerja berbiaya murah dan tanpa ikatan, sedangkan sekolah mendapat manfaat berupa kesempatan melakukan *finishing touch* untuk kompetensi siswa dalam bidang khusus, selain anggota organisasinya (yaitu siswa) mendapatkan penghasilan.

Dukungan pada **tahap penilaian pembelajaran** berupa hadirnya perwakilan individu pelaku industri – bukan sebagai perwakilan dari asosiasi industri atau asosiasi profesi -- sebagai asesor pada LSP-P1 atau LSP-P2 ketika sekolah melaksanakan Uji Kompetensi Keahlian (UKK). Pelaku industri ini adalah individu-individu institusi industri yang menjadi pasangan (institusi pasangan - IP) sekolah dalam pembelajaran siswa, sehingga ketika mereka bersedia menjadi IP sekolah, sudah termasuk memenuhi permintaan bantuan dari sekolah. Semua sekolah sudah melaksanakan prakerin, karena diwajibkan, dan juga sudah melaksanakan UKK dengan bantuan individu industri yang menjadi IP-nya. Dukungan dalam bentuk ini adalah murni dukungan, mengingat manfaat berupa lulusan yang kompeten belum nampak.

2. Inisiator dukungan dan posisi pelaku industri terkait pemberian dukungan

Dukungan-dukkungan yang diberikan oleh pelaku industri terhadap sekolah beragam menurut pihak yang memiliki ide awal pemberian dukungan. Ada dukungan yang berangkat dari ide sekolah dan ada juga dukungan yang ditawarkan oleh pelaku industry pariwisata, baik selaku pemilik usaha maupun pelaku profesi pariwisata.

Dukungan pelaku industri yang diawali oleh adanya permintaan bantuan oleh sekolah adalah penyesuaian kurikulum, pelaksanaan prakerin, dan pelaksanaan uji kompetensi lulusan. Dengan demikian dukungan industri sudah terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar. Ketiga jenis langkah pembelajaran ini memang tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan industri. Dukungan industri pada ketiga langkah ini memang diwajibkan oleh Direktorat PSMK kepada sekolah, sehingga inisiator awalnya bukannya sekolah, melainkan pengelola SMK di tingkat nasional. Dalam konteks ini sekolah tinggal melakukan ide pihak lain.

Dukungan pelaku industri yang merupakan inisiatif pelaku industri adalah kehadiran guru tamu di sekolah yang dilakukan oleh alumni sekolah tersebut dan oleh Asosiasi Profesi ICA sebagai salah satu asosiasi chef dan IHGMA sebagai salah satu asosiasi General Manager hotel, masing-masing melalui program ICA Goes to School dan One GM One SMK. Kedatangan guru tamu baru terjadi KK Perhotelan dan KK Kuliner, yakni yang bekerja sebagai chef, dan dari IHGMA terjadi di KK Perhotelan yakni yang bekerja sebagai GM hotel.

Guru tamu yang merupakan alumni dan anggota ICA tersebut tidak hanya menawarkan pengkinian wawasan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan praktik terkini di industri, tetapi juga memberi masukan terhadap kurikulum sekolah agar pengetahuan, wawasan, dan sikap yang diberikan di sekolah sesuai dengan perubahan yang terjadi di industri. Pengkinian langsung diberikan kepada siswa pada jam praktik kejuruan, di depan GMP yang mengampu mapel tersebut. Pemberian masukan, secara etis, diberikan hanya kepada GMP yang mengampu mapel.

Terdapat dua perbedaan pemberian masukan perbaikan kurikulum oleh guru tamu terhadap pengkinian kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah sebelum tahun ajaran baru. Perbedaan pertama, masukan perbaikan kurikulum oleh guru tamu dilaksanakan ketika tahap proses pembelajaran, sedangkan pengkinian kurikulum dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Namun demikian, masukan dari guru tamu ketika pembelajaran baru berjalan beberapa bulan dinilai oleh GMP masih memberikan nilai-nilai kebaruan dari praktik di industri. Perbedaan ke dua, guru tamu berasal dari individu alumni dan anggota asosiasi profesi, jadi merupakan individu-individu di luar IP sekolah.

Guru tamu dari IHGMA dapat berupa GM suatu hotel atau pejabat di jenjang bawahnya, misalnya manajer atau kepala divisi tertentu. Apabila GM yang datang, ia cenderung menyampaikan wawasan mutakhir tentang manajemen industri perhotelan yang digelutinya sehari-hari. Informasi ini

akan bermanfaat ketika siswa nantinya dapat meniti karir sampai ke jenjang manajemen (kualifikasi Level 6), sementara siswa sendiri disiapkan untuk bekerja pada jenjang operator (kualifikasi Level 2).

Kedatangan guru tamu dari IHGMA tergantung kepada keaktifan BPD masing-masing daerah. Keaktifan terkait program guru tamu tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, BPD aktif menawarkan dukungan dan guru tamunya sudah datang ke sekolah. Ke dua, BPD pasif, dalam arti menunggu permintaan sekolah akan guru tamu, dan memang belum ada permintaan dari sekolah. Di antara kedua situasi tersebut terdapat kasus BPD yang menyatakan belum menerima daftar SMK Pariwisata yang ada di provinsinya, sehingga belum bergerak. BPD semacam ini berpotensi untuk dimasukkan dalam klasifikasi BPD yang pasif, karena rasanya sangat mudah menemukan identitas SMK Pariwisata dan data lainnya, baik mencari di internet maupun berkoordinasi dengan Kabid yang menangani SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi. Ketika Tim Puslit menawarkan untuk memberikan data, perwakilan IHGMA menyatakan tidak perlu. Secara implisit dapat ditafsirkan bahwa sebenarnya ada indikasi ketiadaan motivasi untuk membantu sekolah melalui Program One GM – One SMK yang dicanangkan oleh DPP IHGMA, Kemenpar, dan disambut dengan hangat oleh DPP Asosiasi SMK Pariwisata se Indonesia.

Posisi asosiasi yang bersedia mendukung pembelajaran SMK namun menunggu undangan sekolah tersebut juga dipilih oleh beberapa asosiasi pelaku industri yang lain. Pelaku industri pada umumnya memiliki kekhawatiran apabila mereka dianggap menyampur-tangani urusan sekolah. Asosiasi-asosiasi yang siap bekerjasama namun menunggu keaktifan sekolah dicontohkan oleh PHRI pusat dan beberapa BPD Tiara Kusuma. Kesungguhan ini ditunjukkan a.l. oleh pernyataan Ketua BPD Tiara Kusuma NTB dan DPP PHRI yang siap membantu SMK secara gratis.

3. Kendala dan peluang dalam pelaksanaan kerjasama

Melalui kerjasama antar-organisasi, yakni sekolah dan pelaku industri, diharapkan semua lulusan SMK Pariwisata terserap oleh pasar kerja kepariwisataan. Keterserapan ini terjadi karena lulusan memiliki kompetensi sesuai harapan pasar kerja dan kerjasama sejak perencanaan pembelajaran sampai penempatan lulusan. Setidaknya terdapat dua faktor utama yang berpengaruh, yakni kurikulum, dan sumberdaya pembelajaran praktik kejuruan. Kerjasama antara sekolah dan pelaku industri akan membantu menyesuaikan kurikulum, mengatasi kesenjangan kompetensi peserta prakerin terhadap persyaratan minimalnya, menghasilkan lulusan

dengan kompetensi yang sesuai harapan pasar kerja, dan penempatan lulusan.

a. Kendala penyelenggaraan kerjasama

Terdapat sejumlah kendala dalam melaksanakan kerjasama secara terstruktur dengan pelaku industri agar sekolah dapat memperoleh ketiga jenis sumberdaya yang sangat diperlukan. Kecenderungan yang nampak adalah **sekolah enggan untuk membuat kerjasama** dengan pelaku industri atau pihak lain, termasuk orang tua.

Kecenderungan ini nampak dari tiga fakta berikut. Pertama, ada kecenderungan **sekolah merasa cukup** dengan dukungan industri pada tahap penyesuaian kurikulum, pelaksanaan prakerin, dan uji kompetensi lulusan. Ini diindikasikan oleh jawaban bahwa mereka sudah bekerjasama dengan industri

Ke dua, dalam konteks pemenuhan terhadap kebutuhan sumberdaya – yakni instruktur praktik berpengalaman industri, fasilitas praktik yang sesuai dengan yang digunakan industri, dan penggalangan biaya praktik -- **sekolah nampak pasif**. Tidak ditemukan sekolah yang berinisiatif untuk mencari dukungan tersebut. Pihak yang aktif bekerjasama dengan sekolah justru adalah asosiasi profesi dan ini tidak hanya terjadi pada satu KK, tetapi juga pada KK lainnya. Pengecualian hanya terjadi di satu KK pada salah satu provinsi yang atas kemauan kreatifitasnya yang *out of the box* GMP berhasil menggalang dukungan orang tua dalam pengadaan bahan praktik anaknya, tanpa orang tua merasa terbebani apalagi mengadukannya sebagai pungutan.

Di salah satu provinsi, kepala sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan FGD untuk kegiatan ini, menyatakan bahwa kerjasama sedang direncanakan oleh Bidang PSMK pada Dinas Pendidikan Provinsi. Namun demikian nampaknya apa yang disampaikan itu merupakan informasi pertama yang diterima oleh Kabid PSMK. Artinya bukan bidang tersebut yang merencanakan. Walaupun kabid setelah itu juga menyatakan bahwa persiapan sudah direncanakan, **namun sampai enam bulan setelah pernyataan itu diucapkan, tidak ada tindak lanjut dari rencana** tersebut, yaitu rapat Bidang dengan SMK-SMK Pariwisata yang dijanjikan sebagai langkah pertama.

Keengganan tersebut cenderung disebabkan oleh empat faktor berikut. Pertama, **kerangka fikir (*mindset*)** manajemen sekolah dan

kebanyakan GMP yang kurang tepat yaitu sangat tergantung kepada pemberian pusat. Kekurangan sumberdaya selama ini tinggal *complain* ke pusat atau menyatakan bahwa penyebabnya adalah kebijakan pusat. Contohnya adalah apabila terjadi kekurangan fasilitas praktik tinggal minta ke pusat (Dit. Dikmenjur) dan kekurangan biaya praktik tinggal menyalahkan BOS yang jumlahnya tidak memadai. Hal ini diperkuat dengan alibi kekhawatiran diadukan kepada Tim Buser Pungli atas tuduhan mengadakan pungutan liar atau pada kasus provinsi kaya tertentu adalah tuduhan melanggar peraturan gubernur terkait program provinsi Pendidikan Menengah Gratis.

Ke dua, kenyataan tingkat pengangguran lulusan yang tinggi yang tidak dirasakan sebagai tudingan kepada sekolah sebagai salah satu penyebabnya menjadikan **sekolah terlena dan masuk ke zona nyaman**. Ditambah dengan *mindset* manajemen sekolah sampai GMP yang selalu menggantungkan kebutuhannya terhadap pemerintah pusat menjadikan kreatifitas dan inovasi pengadaan sumber daya melemah.

Ke tiga, **jarak dan kendala psikologis** yang cenderung membentang lebar di antara kepala sekolah dan asosiasi pelaku industri pariwisata, di luar individu institusi pasangannya. Kebanyakan kepala SMK Pariwisata tidak mengenal pimpinan atau pengurus asosiasi tersebut dan bahkan baru mengetahui pertama kalinya pada FGD untuk kegiatan ini.

Ke empat, ketidaktersediaan dana sekolah untuk membiayai kedatangan guru tamu dari asosiasi profesi, yang sebetulnya tidak berlaku untuk semua asosiasi profesi. Asosiasi profesi yang memerlukan biaya bagi guru tamu hanya ditemukan 2 dari 11 BPD asosiasi yang menghadiri FGD untuk kegiatan ini, sedangkan 9 asosiasi lainnya, seperti PHRI, Tiara Kusuma, ICA, dan PCPI, misalnya, bersedia mendukung tanpa permintaan apapun.

Dari sudut pandang lain terdapat **keengganan Dit. PSMK** untuk mengadakan kerjasama dengan asosiasi pelaku industri. Keengganan ini dinyatakan dalam seminar hasil pengembangan Model SMK Kemaritiman tahun 2018 di Bogor. Padahal, menganalisis pengalaman dukungan penyesuaian kurikulum, prakerin, dan UKK, instruksi Dit. PSMK sangat diperlukan oleh sekolah. Sebenarnya saran BPD asosiasi industri dan asosiasi profesi untuk melakukan perjanjian kerjasama payung antara DPP dan kemnterian sangat logis. Terbayangkan betapa sulitnya kalau tanpa kerjasama di tingkat pusat harus diadakan pendekatan di masing-masing dari 34 provinsi.

b. Peluang terselenggaranya kerjasama

Terdapat dua peluang untuk dilaksanakannya kerjasama. Peluang pertama adalah **kesiapan BPD asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata** baik asosiasi industri maupun asosiasi profesinya untuk bekerjasama. Ini dicontohkan oleh BPD ASITA Sulut yang menyediakan kantornya sebagai tempat praktik bagi siswa SMK KK Perjalanan Wisata. Mengingat ASITA adalah asosiasi pelaku industri, maka kantor ASITA merupakan tempat usaha yang berisi beraneka peralatan dan mesin kerja. Demikian juga BPD Tiara Kusuma NTB yang menyediakan salon milik Ketua BPD sebagai tempat praktik, selain dukungan guru tamu, pemutakiran kurikulum, dll.

Peluang ke dua, Pemerintah telah menyatakan akan **mendiskon pajak perusahaan** sebesar dua kali lipat dari biaya yang diberikan untuk mendukung sekolah melaksanakan pendidikan dan pelatihan SDM. Walaupun peluang pembiayaan kerjasama sudah dibuka, namun nampaknya masih ditemui setidaknya dua kendala. Kendala pertama, peraturan Menkeu tahun 2019 tersebut belum diketahui secara meluas, bahkan semua peserta FGD di lima provinsi menyatakan baru mengetahuinya pada FGD. Ke dua, adanya kekhawatiran pelaku industri akan menemui kesulitan dalam mengurusnya, termasuk prosedur yang berbelit-belit.

BAB IV

OPSI-OPSI KEBIJAKAN PENINGKATAN KOMPETENSI LULUSAN SMK PARIWISATA

A. INDIKASI TINGKAT KOMPETENSI LULUSAN DAN FAKTOR-FAKTOR TERKAIT DENGAN CAPAIAN TINGKAT KOMPETENSI TERSEBUT

SMK mempunyai dua misi utama, yakni menyiapkan lulusan sebagai calon pekerja dan sebagai calon pelaku wirausaha. Dalam rangka menyiapkan lulusan sebagai **calon pekerja**, hasil analisis dari sisi *outcome*, menunjukkan para pelaku industri pariwisata menilai bahwa lulusan SMK Pariwisata cenderung memiliki kompetensi yang beragam menurut KK-nya, dari cukup sampai kurang memadai. Indikasi umum yang digunakan adalah mulai dari kekurangan pengetahuan lulusan, kegamangan kerja karena tidak menguasai keterampilan yang diperlukan untuk berperan serta dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja, sampai ke perilaku atau karakter kerja yang kurang tepat. Kekurangan yang teramati di tingkat individu perusahaan ini bahkan sampai dibahas di tingkat asosiasi pelaku industri dan asosiasi profesi.

Tingkat capaian kompetensi yang kurang memadai tersebut cenderung mencakup seluruh kompetensi keahlian, dengan pengecualian pada kompetensi keahlian perhotelan di salah satu provinsi. Namun di provinsi inipun juga masih ada kendala yakni tidak semua lulusan memiliki kompetensi khusus untuk bekerja di kantor depan hotel (*front office*). Kompetensi khusus yang diperlukan untuk bekerja di bagian ini adalah cerdas (menjadi pemecah masalah, *problem slover*), *gesture*, *grooming* (tampilan fisik, termasuk *good looking*), dan sikap.

Dalam rangka menyiapkan lulusan sebagai **calon pelaku wirausaha**, tingkat kompetensi lulusan diindikasikan dari aspek *outcome* awal untuk KK Kuliner dan aspek proses untuk KK Perhotelan. Indikasi kompetensi untuk KK Kuliner, yang merupakan indikasi *outcome* awal dari dunia kerja kuliner, adalah kinerja siswa ketika mengikuti PKL. Indikasi ini dapat dianggap sebagai bentuk penilaian yang fair karena sekembali siswa dari PKL, pada sekitar pertengahan semester 5, tidak terdapat kesempatan yang luas lagi bagi meningkatnya kompetensi karena siswa sudah akan disibukkan oleh persiapan dan pelaksanaan tiga ujian akhir. Hasil analisis *outcome* awal mengindikasikan bahwa kompetensi lulusan KK Kuliner cenderung kurang memadai. Siswa PKL dinilai sangat kurang memiliki kemauan untuk aktif menggali kiat-kiat membuka usaha baru, sehingga akan lemah dalam visi

berusaha, juga lemah dalam kompetensi inter-personal khususnya dalam komunikasi.

Indikasi untuk KK Perhotelan, yang merupakan indikasi dari aspek proses, yakni analisis terhadap karakteristik proses penyiapan siswa untuk berlatih membuka usaha baru. Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa belum semua sekolah berhasil melaksanakan proses penyiapan pembukaan usaha baru bagi siswanya secara tepat, masih ada sekolah yang tidak dan kurang berhasil.

Utamanya, terdapat **tiga faktor terkait capaian kompetensi** lulusan sebagai calon pekerja, yang juga berlaku bagi penyiapan calon pelaku wirausaha, disamping adanya tiga faktor lain. Ketiga faktor pertama tersebut adalah (i) beban kerja GMP yang sangat berlebihan, (ii) biaya operasional praktik dasar di sekolah yang sangat jauh dari mencukupi, dan (iii) kurikulum yang tingkat kelayakan pemanfaatannya perlu ditingkatkan. Mengingat bahwa beban kerja GMP dan biaya operasional praktik berpengaruh langsung terhadap kompetensi lulusan -- melalui kualitas dan kuantitas pelaksanaan praktik dasar di sekolah -- maka diusulkan untuk memberikan prioritas terhadap upaya-upaya guna mengatasinya terlebih dahulu.

B. OPSI KEBIJAKAN

Situasi kedua jenis sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan praktik dasar yang efektif tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, dari segi **biaya**, besarnya dana BOS SMK tahun 2019 hanya setara dengan 35 persen dari rerata kebutuhan pembiayaan operasional bukanpersonal untuk seluruh program keahlian di SMK Pariwisata sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah melalui Standar Biaya.

Ke dua, dari sisi GMP pengampu praktik dasar di sekolah, kekurangan jumlah GMP untuk level Bidang Keahlian (BK), yakni BK Pariwisata sedemikian besar, yakni sebesar 38 persen, dan bahkan pada Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata mencapai 51 persen pada awal 2017. Dalam kondisi ini, beban kerja GMP yang ada mencapai 2 kali lipat dari beban kerja GMP apabila tidak terjadi kekurangan guru. Beban kerja sebesar ini baru dari 1 faktor saja, yakni faktor kekurangan jumlah guru, belum dari dampak faktor-faktor penyebab tingginya beban kerja GMP lainnya, yang akan diuraikan sebagai berikut.

Apabila ditambah dengan pemajuan proses pembelajaran untuk menyiapkan siswa mengikuti praktik lanjut selama PKL dan pemajuan pembelajaran akibat masih dijadwalkannya pembelajaran pada Semester 6, yakni beban pembelajaran sebanyak 33 jp/minggu, ketika siswa mengikuti 3 ujian akhir,

maka beban kerja GMP dari pembelajaran tatap muka pada semester gasal setara dengan 39,75 jam @ 60 menit per minggu dan pada semester genap mencapai 41,25 jam @ 60 menit per minggu.

Kedua beban kerja tersebut di luar beban kerja dari 5 kegiatan lainnya, yakni (i) persiapan, evaluasi hasil belajar siswa, dan evaluasi proses pembelajaran (iii) tugas-tugas administrasi lain termasuk wakasek, kapro, kaprodi (kepala kompetensi keahlian), wali kelas, dll., serta (iv) pelaksanaan PPDB dan 3 ujian akhir. Memang itu semua adalah tugas GMP, tetapi **apapun sebutannya itu adalah beban kerja.**

Beban kerja ke lima dari GMP, yang cenderung tidak disadari oleh banyak pihak termasuk pembuat keputusan di pusat dan di provinsi, adalah beban kerja administrasi ketika sekolah mendapat *block-grant* dari Dit. PSMK, yakni beban kerja GMP sebagai pimpro, bendaharawan, dan panitia lainnya. Memang *block grant* ini bertujuan baik, yakni meningkatkan kualitas SMK itu sendiri, namun **beban kerja adalah tetap beban kerja dan beban kerja administratif semacam ini bukan merupakan beban kerja dalam melaksanakan tugas utama guru, yakni mendidik.**

Beban kerja yang sangat berlebihan ini jelas-jelas mengganggu kinerja guru, dalam membimbing praktik siswa yang jumlahnya terlalu banyak, dan mengurangi porsi siswa akan perhatian gurunya. Untuk menghindari pemborosan sumber daya nasional dan mengurangi tingkat pengangguran lulusan SMK, yang selama beberapa tahun sudah memegang rekor tertinggi di antara semua jenis dan jenjang pendidikan lainnya, dampak negatif dari kekurangan akut GMP tersebut perlu diatasi. Berbagai opsi kebijakan yang diusulkan adalah sebagai berikut.

- 1. Menghadapi kekurangan akut jumlah GMP dan biaya praktik dasar di sekolah sebagai upaya meningkatkan kompetensi lulusan dalam rangka menekan tingkat pengangguran lulusan SMK dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan nasional yang terbatas**

Opsi kebijakan #1.1. Membiayai praktik dasar yang bermutu sesuai dana BOS yang mampu disediakan oleh Pemerintah secara nasional

Apabila hanya memperhitungkan ketersediaan dana BOS saja untuk menyiapkan SDM pariwisata yang kompeten, maka diperlukan pengurangan pemberian kesempatan SMK Pariwisata secara nasional sebesar 65 persen, sehingga tinggal 35 persen dari enrolmen nasional tahun 2019. Untuk itu (i) pemberian kesempatan pendidikan SMK Pariwisata perlu difokuskan pada ke-9 daerah super-prioritas dan

unggulan pengembangan sektor pariwisata, dan (ii) di luar ke-9 daerah tersebut, bagi daerah-daerah yang hanya mengandalkan dana BOS diadakan pengurangan enrolmen secara bertahap, dengan penutupan sementara penerimaan siswa baru kelas X. Dengan ini diharapkan **kebutuhan biaya operasional pada masing-masing SMK Pariwisata yang ada tercukupi sesuai Standar Biaya** yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pengurangan enrolmen untuk masing-masing KK secara nasional dilakukan berdasarkan atas tingkat kecukupan alokasi BOS/siswa terhadap besarnya biaya standar masing-masing KK. Semakin kecil tingkat kecukupan, semakin besar tingkat pengurangan enrolmennya. Pengurangan dilakukan dengan mengatur PPDB tahun ajaran 2021/2022, sehingga diharapkan dalam 3 tahun jumlah enrolmen nasional mencapai titik keseimbangan yakni besarnya dana BOS/siswa untuk masing-masing KK sebesar Biaya Standar. Implisit di sini diterapkan cara penghitungan baru, yakni besarnya dana BOS/siswa tidak sama untuk masing-masing KK, yang kebutuhannya memang berbeda.

Pada lokasi-lokasi yang enrollmennya dikurangi, pemberian kesempatan pendidikan menengah dilakukan melalui penambahan enrolmen SMA. Strategi ini mempunyai 2 nilai lebih, yakni sebagai berikut.

- Memberikan kesempatan pendidikan berbiaya lebih rendah, sehingga dengan anggaran yang sama dapat dilayani lebih banyak warga masyarakat lulusan SMK & sederajat.
- Terkait dengan masuknya Revolusi Industri 4.0 yang menjadikan besarnya ketidakpastian bentuk dan jenis pekerjaan di masa depan. Pekerjaan yang ada sekarang mungkin akan hilang 5 sampai 10 tahun ke depan, namun jenis pekerjaan yang akan ada tidak dapat diramalkan dari sekarang. Berkenaan dengan itu kompetensi yang perlu dikembangkan kepada siswa saat ini dapat dikelompokkan menjadi 5, yakni (i) kreativitas & inovasi, (ii) berfikir kritis & pemecahan masalah, (iii) kolaborasi, (iv) komunikasi, termasuk bahasa internasional, bahasa program, bahasa data, serta (v) karakter dan pergaulan antar-bangsa. Kompetensi-kompetensi ini lebih tepat diberikan melalui SMA.

Opsi kebijakan #1.2. Melaksanakan praktik dasar dengan bimbingan yang optimal sesuai jumlah GMP yang ada secara nasional

Agar pelaksanaan praktik dasar dapat dilaksanakan dengan lebih baik, maka beban kerja GMP perlu dikurangi, dengan cara yang sama seperti Opsi #1.1.

Apabila hanya memperhitungkan ketersediaan GMP saja untuk menyiapkan SDM pariwisata yang kompeten, maka diperlukan pengurangan pemberian kesempatan SMK Pariwisata secara keseluruhan pada tingkat nasional sebesar 38 persen, sehingga tinggal 62 persen dari enrolmen nasional tahun 2019. Pengurangan enrolmen ini dilakukan secara tidak seragam antar kompetensi keahlian. Sebagai contoh, pengurangan terbesar terjadi untuk Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Wisata yang layanannya menjadi tinggal 49 persen dari jumlah enrolmen tahun 2019.

Untuk itu (i) pemberian kesempatan pendidikan SMK Pariwisata perlu difokuskan pada ke-9 daerah super-prioritas dan unggulan pengembangan sektor pariwisata, dan (ii) di luar ke-9 daerah tersebut, bagi daerah-daerah yang mengalami kekurangan GMP diadakan pengurangan enrolmen secara bertahap, dengan penutupan sementara penerimaan siswa baru kelas X. Dengan ini diharapkan **kebutuhan GMP pada masing-masing SMK Pariwisata yang ada tercukupi berdasarkan beban kerja guru secara normal** sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pengurangan layanan tersebut juga merupakan adalah pengurangan secara nasional. Pengurangan layanan di luar dari ke-9 provinsi ini dilakukan dengan menyesuaikan tingkat ketersediaan GMP di masing-masing wilayah tersebut.

2. Menambah jumlah GMP yang berkompeten dalam fungsi sebagai instruktur praktik kejuruan

Dengan Opsi Kebijakan #1.1 dan #1.2, dalam 3 tahun GMP yang tersedia dan beban kerjanya akan mencapai kenormalan, juga biaya untuk praktik dasar di seluruh KK pada Bidang Keahlian Pariwisata terpenuhi. Apabila kedua opsi tersebut dilaksanakan mulai PPDB tahun ajaran 2021/2022, maka kenormalan beban guru dan kecukupan dana BOS untuk praktik dasar dapat tercapai pada tahun 2024/2025. Sementara waktu berlalu sampai 4 tahun y.a.d., terdapat peluang yang dapat dilaksanakan untuk mengadakan GMP baru yang benar-benar berkompeten, bukan dalam sertifikat, melainkan dalam melaksanakan pembimbingan siswa dalam melaksanakan praktik dasar di sekolah.

Gambaran umum. Pengadaan GMP baru dikelompokkan menjadi dua, guru tetap dan guru tidak tetap. Pemenuhan kebutuhan **guru tetap** dapat dilaksanakan melalui 3 pola, yakni pendidikan khusus calon GMP, *retraining* guru yang sudah berlebihan ketersediannya menjadi GMP, dan jalur pindah karir dari industri pariwisata menjadi instruktur atau GMP. Pemenuhan kebutuhan melalui pengadaan **guru tidak tetap** dilakukan melalui pola guru tamu dan kelas alumni, yakni para profesional dari industri pariwisata level supervisor ke atas secara terjadwal untuk mengajar di sekolah.

Pendidikan khusus calon GMP memerlukan waktu minimal 5 tahun sampai dengan pengangkatannya sebagai guru tetap berstatus ASN. Apabila perekrutan calon mahasiswanya dimulai tahun 2021/2022 maka pada tahun 2025/2026 baru akan dihasilkan guru baru melalui program ini. Sementara pola ini dilaksanakan, dapat dilaksanakan pola *retraining* guru yang memerlukan waktu 2 tahun. Pola ini dapat dilaksanakan sampai salah satu dari kedua cara tercapai, yakni sampai kelebihan guru mapel-mapel nonproduktif yang memenuhi kriteria untuk mengikuti *retraining* habis atau kebutuhan GMP terpenuhi. Perekrutan GMP tetap melalui pola pindah karier dari industri menjadi guru juga merupakan solusi kreatif. Tantangannya adalah pada pemberian penghasilan yang memadai, dan apabila sudah terjawab tinggal diterbitkan payung hukumnya. Apabila tidak terjawab, maka pola ini tidak perlu dilaksanakan.

Pengadaan GMP dengan status guru tidak tetap melalui pola guru tamu dan kelas alumni secara terjadwal merupakan solusi kreatif dan memiliki kelebihan besar dibanding pendidikan calon guru dan *retraining* guru yang ada. Kelebihannya pertama: dapat dilakukan hampir secara instan, hanya memerlukan waktu koordinasi dengan asosiasi profesi dan asosiasi industri. Ke dua: adanya potensi dalam pengkinian materi serta manajemen sekolah dan guru dengan praktik-praktik mutakhir dari industri, langsung oleh pelakunya. Ke tiga, waktu pembekalan materi tidak diperlukan karena mereka mereka memang sudah mempraktikkannya sehari-hari. Ke empat: apabila diperlukan biaya transport, karena sudah berkoordinasi dengan asosiasi industri tempat guru tamu tersebut bekerja, pembayarannya dapat dilakukan oleh perusahaan dan Pemerintah akan memotong pajak perusahaan sebesar 200 persen dari pengeluaran transport tersebut. Ke lima: apabila kompetensi yang dimilikinya tidak diperlukan lagi karena Revolusi Industri 4.0, Pemerintah tidak perlu menanggung biaya pensiun mereka, dan sekolah tinggal mencari GMP sesuai kompetensi baru yang diperlukan.

Opsi kebijakan #2.1. Pemenuhan GMP dengan status guru tidak tetap melalui Program Guru Tamu dan Kelas Alumni

Guru tamu (GT) adalah praktisi industri pariwisata yang datang ke sekolah, yang secara sederhananya adalah, untuk mewartakan kenyataan tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di dunia kerja. GT ini dicontohkan oleh asosiasi profesi IHGMA (untuk KK Perhotelan) dan ICA (untuk KK Kuliner dan Mapel *F & B Service* dari KK Perhotelan).

Kegiatan guru tamu IHGMA merupakan kerjasama asosiasi bersama Kemepar dalam program *One GM - One SMK*. GM hotel diharapkan melakukan penyegaran wawasan dan pengetahuan siswa dan juga GMP melalui pengisian waktu pembelajaran. Kegiatan guru tamu dari asosiasi *chef* ICA dikemas dalam Program *ICA Goes to School*. Melalui program ini para *chef* melakukan dua jenis pengkinian, yakni kurikulum serta praktik yang tentu saja diperkaya dengan pengetahuan terkini. Dalam melaksanakan dukungannya terhadap SMK, guru tamu dari ICA ini tidak dibiayai kedatangannya oleh sekolah.

Program kelas alumni memiliki kesamaan dan perbedaan (dalam arti positif atau kelebihan) dengan guru tamu, terutama guru tamu dari IHGMA. Kesamaannya adalah dalam hal keterlibatan praktisi dari industri dalam proses pembelajaran.

Perbedaan dalam aspek positif, atau kelebihannya, adalah sebagai berikut. **Pertama**, KA cenderung diisi oleh pelaku industri yang berusia muda. Mereka adalah kakak kelas dari para siswa. Kelebihan posisi kakak kelas ini adalah: (i) mereka melakukan pembimbingan melalui pembelajaran seperti seorang kakak terhadap adiknya dan adik kelasnya menikmati cara itu, dan (ii) mereka menggunakan gaya bicara, pilihan kata, dan berbahasa tubuh layaknya teman ketika menyampaikan informasi kepada siswa. Sambutan para siswa yang telah mengalami proses pembelajaran dalam program KA ini sangat baik, dan bahkan siswa menyatakan bahwa mereka merasa lebih mudah memahami dibanding dengan pembelajaran dari para guru. Tentu saja keberadaan praktisi industri di sekolah melalui Program KA ini tidak dapat menggantikan keberadaan GMP. Posisi yang tepat adalah kehadiran praktisi industri melalui Program KA melengkapi keberadaan GMP. **Ke dua**, program GT dibatasi oleh bidang pekerjaan, sementara KA dapat meliputi seluruh KK SMK Pariwisata. Program GT terbatas pada KK Perhotelan dan KK Kuliner. Program KA berlaku untuk semua KK yang ada di SMK Pariwisata. **Ke tiga**, perannya dalam pemutakhiran kurikulum sekolah lebih mudah diterima oleh para “mantan” gurunya, karena hubungan yang sudah terjadi ketika mereka

berstatus siswa dan guru selama 3 tahun di SMK. Tentu saja Program KA juga memiliki kelemahan, yakni terdapatnya alumni yang sukses yang berada dalam jangkauan jarak ulang-alik yang wajar dari sekolah.

Program-program GT dan Program Kelas Alumni perlu diagendakan dalam program tahunan atau program semester sekolah. Prioritas pertama diberikan pada Program KA, dan apabila tempat kerjanya dari sekolah, maka penjadwalan kehadiran masing-masing alumni yang sukses dapat dilakukan setahun sekali. Keterbatasan kehadiran alumni di sekolah dapat diimbangi dengan kehadiran GT dari ICA. Untuk melengkapi keduanya adalah kehadiran GT dari IHGMA yang akan memberikan wawasan yang lebih luas, bukan pembimbingan praktik siswa.

Dengan memasukkan ke program-program GT dan KA dalam program tahunan dan program semesteran sekolah, maka dukungannya dalam pembelajaran dapat dilaksanakan secara tersinkronkan dengan jadwal pembelajaran untuk masing-masing mata pelajaran dan KD. Dengan demikian program-program tersebut dapat melengkapi kegiatan Sinkronisasi Kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah bersama dunia kerja.

Opsi kebijakan # 2.2. Pemenuhan kebutuhan GMP dengan merekrut guru tetap melalui pendidikan khusus calon guru baru

Karakteristik program sebagai berikut: **Diploma IV berbeasiswa dan ikatan dinas** yang **hanya merekrut lulusan terbaik SMK** Bidang Keahlian Pariwisata. **Materi pembelajaran terdiri** materi kompetensi Pariwisata setara 3 tahun ditambah materi pedagogi setara 1 tahun termasuk praktik di industri selama minimal 1 tahun, untuk memastikan fokus pembentukan lulusan berkompeten sebagai instruktur praktik pada masing-masing KK di SMK Pariwisata.

Upaya ini perlu dilakukan dengan menggunakan dua prinsip. Pertama, *demand driven*, yakni penyiapan guru yang jumlah dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan (*demand*) nyata masing-masing SMK. Dari sudut pandang prinsip, upaya ini dioperasionalkan sebagai pembatasan jumlah mahasiswa baru di seluruh LPTK, apapun bentuk kelembagaannya, hanya untuk sejumlah guru yang diperlukan oleh SMK Pariwisata di Indonesia. Ke dua, penyiapan calon GMP dilaksanakan melalui pendidikan khusus calon GMP, tidak sembarang LPTK dapat menyelenggarakannya. Juga tidak semua lulusan S1, walaupun akan ditambah dengan kompetensi pedagogi selama setahun, dapat direkrut menjadi calon GMP. GMP harus mampu mengajar calon operator, sehingga harus memiliki kompetensi operator dan berpengalaman

industri. Sementara itu, program S1 reguler menghasilkan lulusan pada KKNI Level 6, yang bukan merupakan tumpukan kompetensi Level 2, operator.

Perkiraan mulai bertugas tahun **2025/2026**, apabila memulai kuliah pada bulan Juli 2021, dan akan **berada di profesinya s.d. tahun 2060-an**. Dengan ini secara bertahap kebutuhan guru akibat kekurangan guru yang tidak terpenuhi selama ini dan kebutuhan pengganti guru yang pensiun setiap tahunnya akan terpenuhi juga. (Asumsi: calon guru mulai bertugas pada umur 23 dan pensiun umur 60 tahun).

Opsi kebijakan #2.3. Pemenuhan kebutuhan GMP dengan status guru tetap melalui *retraining* guru mapel adaptif yang sudah berlebihan jumlahnya

Pemenuhan guru ini dilaksanakan melalui *retraining* kelebihan jumlah guru Mapel Adaptif (mapel Kelompok B) yang ada melalui PK Ganda yang disempurnakan. Penyempurnaannya meliputi tiga aspek berikut. **Peserta** program adalah guru mapel adaptif yang masih memungkinkan untuk menerima kompetensi baru yang jauh berbeda, yakni guru bersertifikat profesi yang berusia tertinggi 45 tahun, menandatangani perjanjian akan mengajar mapel produktif, dan keikutsertaan disertai dengan kesadaran untuk menghemat pengeluaran negara namun tidak atas tunjangan tanpa penyadaran. **Penyusunan materi tidak dilakukan sendiri oleh unsur internal Kemdikbud**, melainkan dilakukan melalui kerjasama dengan asosiasi industri dan asosiasi profesi kepariwisataan yang sesuai, yang lebih tahu bidangnya. Misalnya (i) materi perhotelan bersama PHRI, IHGMA, IHGM, dan IHKA, UPW bersama ASITA, HPI, dll.; (ii) materi Tata Boga bersama ICA, IPA, PCPI, PHRI; (iii) materi Tata Kecantikan bersama Tiara Kusuma, IPB Kartini dll; dan (iv) materi Tata Busana bersama IPM, dll. **Penyelenggaraan** retraining juga dilakukan bekerjasama dengan kedua jenis asosiasi sesuai dengan bidangnya. **Waktu penyelenggaraan** selama minimal 12 bulan, khusus untuk materi kejuruan karena materi pedagogi dianggap sudah terpenuhi dengan kepemilikan sertifikat profesi guru. Dalam kurun waktu retraining, 80 persen diantaranya untuk praktik. Untuk KK Perhotelan, praktik dilaksanakan meliputi ke-3 shift kerja di hotel.

Apabila program **dimulai pada Januari 2021** dan peserta berusia maksimal 45 tahun maka **GMP yang dihasilkan akan bertugas minimal selama 14 tahun**, yakni **s.d. tahun 2036**. Program ini berjalan berkesinambungan sampai kelebihan guru mapel adaptif tidak ada lagi, atau kebutuhan GMP terpenuhi.

Opsi kebijakan #2.4. Pemenuhan GMP dengan status guru tetap tetap melalui perpindahan karier dari pelaku industri pariwisata menjadi pendidik

Opsi ini dilakukan melalui dua peluang perekrutan, yakni Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). RPL memberi peluang bagi pendidikan terakhir ditambah pengalaman kerja di industri pariwisata dikonversi menjadi jenjang pendidikan yang disyaratkan bagi instruktur atau GMP. Untuk melaksanakan pola ini diperlukan payung hukum yang berupa keputusan Mendikbud dan pedoman operasionalnya oleh Dirjen GTK.

Di sisi lain program PPPK menyediakan peluang proses khusus pengangkatan sebagai ASN berbasis perjanjian kerja. Pelaku industri pariwisata berumur s.d. 59 tahun, yakni 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar, berpeluang mengikuti pola ini (ps. 6 butir a, PP tersebut). GMP dalam status ini memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, dan perlindungan.

Sisi positif dari opsi ini adalah kepemilikan kompetensi sebagai GMP sudah teruji karena mereka melakukannya sehari-hari. Satu keterbatasan yang mungkin ditemui, sehingga berpotensi mengurangi minat pelaku industri pariwisata adalah tidak diterimanya jaminan pensiun.

Industri pariwisata berubah dengan cepat setelah memasuki Revolusi Industri 4.0, sehingga kompetensi yang dituntut oleh industri terhadap lulusan SMK Pariwisata juga berubah. Agar GMP yang berstatus guru tetap, bukan Guru Tamu atau guru yang mengikuti Program Kelas Alumni yang memang berada di industri yang berubah tersebut, dengan tingkat kompetensi yang beragam, dapat menyiapkan lulusan yang selalu memiliki kompetensi yang memadai diperlukan upaya peningkatan dan pengkinian kompetensi secara berkelanjutan. Upaya tersebut dituangkan dalam opsi berikut.

Opsi kebijakan #2.5. Peningkatan sekaligus pengkinian kompetensi terhadap GMP selain Guru Tamu dan guru pada Program Kelas Alumni

Karena industri pariwisata berubah cepat dan berkelanjutan seiring tibanya Revolusi Industri ke-4, peningkatan sekaligus pengkinian kompetensi GMP, terutama unsur pengkiniannya, harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Mengingat skala kegiatan yang besar dan berkelanjutan ini, maka upaya ini perlu **menggunakan 1 prinsip dan 2 strategi**. Prinsipnya adalah bahwa peningkatan sekaligus pengkinian

kompetensi GMP melibatkan sepenuhnya asosiasi industri dan asosiasi profesi pariwisata beserta pembina sektornya, yakni Kemenpar; tidak dilaksanakan sendiri oleh unit kerja internal Kemdikbud bahkan internal pengelola pendidikan di pusat dan daerah. Pelibatan sepenuhnya bermakna bahwa asosiasi-asosiasi dan pembina sektor tersebut merupakan bagian integral dari Tim Kerja nasional yang bertugas sejak komprehensif, sejak dari penyiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi program. Pelibatan tidak lagi menggunakan pola “sekedar dilibatkan”, “yang penting sudah dilibatkan”, atau “asal sudah dilibatkan”, yakni diundang pada sekali-dua kali rapat lalu dikerjakan sendiri oleh direktorat, P4TK terkait, dan guru-guru SMK.

Strategi yang digunakan adalah pertama, Kemdikbud perlu melakukan **sinergi internal dan eksternal** Kemdikbud. **Sinergi internal** Kemdikbud bertolak dari kenyataan bahwa peningkatan dan pengkinian kompetensi guru bukan semata upaya mengembangkan kompetensi GMP, namun juga merupakan upaya pemastian kualitas penyelenggaraan pendidikan termasuk lulusan pendidikan melalui pemastian kompetensi gurunya. Peningkatan kompetensi merupakan tugas P4TK di pusat dan pemastian kualitas pendidikan merupakan tugas LPMP di provinsi. Dengan demikian, secara internal upaya ini merupakan tugas dari P4TK Bismar bersama LPMP di 34 provinsi. Penjajagan sudah dilakukan dengan LPMP Jakarta dan pimpinan LPMP secara lisan menyatakan siap melaksanakannya.

Sinergi eksternal Kemdikbud adalah sinergi dalam rangka mengoperasionalkan prinsip pelaksanaan yang telah dikemukakan di depan. Dalam melaksanakan upaya peningkatan dan pengkinian kompetensi GMP SMK Pariwisata, Kemdikbud harus secara aktif membangun sinergi dengan asosiasi-asosiasi profesi dan industri pariwisata serta Kemenpar sebagai pembina sektor pariwisata beserta UPT penyiapan SDM-nya, juga dengan asosiasi SMK Pariwisata se Indonesia. UPT-UPT tersebut adalah politeknik pariwisata yang tersebar di 6 lokasi, yakni Bali, Bandung, Makassar, Mataram, Medan, dan Palembang. Dengan catatan bahwa Poltekpar Bali (dulu STP Bali) dan Poltekpar Bandung (dulu STP Bandung) berhasil mencetak calon GMP untuk menyiapkan pendirian SMK pariwisata (dulu SMIP⁹⁶) untuk pertama kalinya dalam 6 angkatan, dengan masing-masing bekerjasama dengan Undiksha (dulu Fakultas Pendidikan Univ. Udayana) dan UPI (dulu IKIP Bandung).

⁹⁶ SMIP: Sekolah Menengah Industri Pariwisata, yakni pendidikan menengah pariwisata yang pertama kali dibentuk dalam sistem SMK, sekarang menjadi Bidang Keahlian Pariwisata, yakni 1 dari 9 bidang keahlian di SMK.

Untuk itu pada P4TK perlu dibentuk tim khusus yang beranggotakan unsur-unsur pelatih dari Kemenpar beserta keenam poltekparnya, P4TK, LPMP yang diwakili LPMP Jakarta, dan DPP asosiasi SMK Pariwisata se Indonesia, serta DPP asosiasi-asosiasi industri dan profesi perhotelan, perjalanan wisata, kuliner, busana, dan kecantikan. Tim ini menyusun pedoman-pedoman pengkinian kompetensi GMP dan membentuk tim pelatih nasional. Di LPMP dibentuk tim pelatih GMP Pariwisata. ini terdiri dari unsur-unsur dari berbagai BPD asosiasi profesi dan BPD asosiasi industri pariwisata provinsi, dan BPD asosiasi SMK Pariwisata provinsi, dan Poltekpar terdekat.

Pelaksanaan pelatihan hanya dilakukan dalam dua jenjang, yakni pelatihan tim provinsi di P4TK Bispar dan pelatihan GMP di provinsinya masing-masing di LPMP yang ada di masing-masing provinsi. Pelatihan di LPMP provinsi, bukan terpusat di P4TK, ini merupakan strategi untuk mempercepat pelatihan dan magang bagi 4.000-an GMP, sehingga GMP dapat mengejar ketertinggalan terhadap kecepatan perubahan pada sektor pariwisata.

Pelaksanaan magang dikoordinasikan oleh tim dari unsur-unsur tersebut yang berkedudukan di LPMP dengan peran sentral berada pada asosiasi industri pariwisata dan asosiasi profesi pariwisata setempat. Untuk GMP Perhotelan, setiap pemegang harus mengikuti ke-3 shift kerja di hotel, karena adanya pekerjaan-pekerjaan khusus yang dilaksanakan pada shift tertentu. Untuk GMP guru mapel PKK perlu mengikuti magang pada wirausahawan/wati untuk dapat memahami kompetensi inti kewirausahaan yang diperlukan untuk memulai usaha baru.

Pelaksanaan pelatihan dan magang secara nasional -- termasuk pengembangan materi dan metodenya -- dikoordinasikan oleh Kemdikbud, Kemenpar, dan induk organisasi asosiasi-asosiasi profesi pariwisata, pelaku industri pariwisata, dan SMK Pariwisata se Indonesia. Pelaksanaan di tingkat provinsi -- termasuk pelaksanaan pelatihan dan magang -- dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, LPMP, serta BPP masing-masing asosiasi tersebut.

Strategi kedua, penerapan sistem “insentif dan disinsentif” yang berdampak pada besarnya penerimaan tunjangan guru agar tidak terpadamkan motivasi GMP yang selama ini sudah aktif mengkinikan kompetensinya dan melecut motivasi GMP yang belum aktif. Jangan hanya GMP yang tidak aktif saja yang diperhatikan, melainkan juga GMP yang selama ini sudah aktif.

Para guru yang berkompeten dan aktif tersebut selama ini memendam kecewa terhadap kebijakan-kebijakan Kemdikbud dan Disdikprov yang cenderung menganggap semua GMP memiliki kompetensi, motivasi, dan kinerja yang sama dan rendah.

Dalam konteks mendukung pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata melalui penggalan devisa dari wisatawan mancanegara, GMP perlu mengkinikan kompetensinya dalam bahasa asing ke dua sesuai dengan karakteristik wisman yang datang ke provinsinya. Dengan itu maka setahap demi setahap GMP diharapkan menguasai Bahasa Inggris lebih dahulu dan kemudian bahasa asing kedua.

Catatan kecil terkait magang guru, yakni GMP muslimah tidak dapat melaksanakan magang di hotel bintang 4 & 5 hotel jejaring internasional dan nasional, apabila ingin magang maka, di beberapa provinsi, mereka diharuskan melepas jilbabnya. Padahal praktik penerapan etos kerja yang terbaik adalah yang dilaksanakan pada hotel berbintang 4 dan 5 tersebut, terutama apd ahotel dalam jaringan internasional. Untuk mengatasi masalah ini, koordinasi penyiapan dan pelaksanaan magang GMP ini melibatkan DPP PHRI, sebagai salah satu asosiasi pelaku industri.

3. Pengurangan beban kerja GMP sampai batas kewajaran kerja

Beban kerja GMP SMK Pariwisata sangat berat, apalagi ketika ke-5 sumber pembebanannya datang pada tahun yang sama. Beban kerja melaksanakan pembelajaran tatap muka teori dan praktik saja sudah mencapai sekitar 40 jam @ 60 menit per minggu. Beban ini belum termasuk termasuk beban pembelajaran lainnya dan ke-4 beban lainnya sebagaimana telah dikemukakan. Beban kerja melaksanakan pembelajaran tatap muka teori dan praktik setara 39,75 jam @ 60 menit per minggu pada semester gasal dan setara 41,25 jam @ 60 menit per minggu.

Beban pembelajaran lainnya meliputi beban kerja persiapan mengajar tahunan, semesteran, harian (tidak hanya RPP yang sudah tidak membebani lagi, tetapi juga penyiapan workshop praktik); evaluasi hasil pembelajaran siswa, dan evaluasi program pembelajaran dan merancang tindak lanjutnya. Beratnya beban kerja itu berasal dari 5 jenis tugas: 3 jenis beban kerja terkait dengan kompetensinya, dan 2 lainnya beban kerja administratif, dengan sudah memperhitungkan penyusunan RPP yang sudah tidak membebani guru lagi karena sudah diperpendek menjadi 1 halaman oleh Mendikbud akhir-akhir ini.

Beban kerja terkait kompetensi GMP adalah sebagai berikut. Pertama, kekurangan jumlah GMP SMK Pariwisata yang sangat akut karena semua

beban mengajar harus dipikul oleh GMP yang ada. Dengan kekurangan 51 persen GMP, misalnya, masing-masing GMP PK Perhotelan dan Jasa Wisata harus memikul beban kerja sebesar 2 kali lebih besar dibanding beban kerja normal. Ke dua, beban kerja terselubung yang tidak dimunculkan di Struktur Kurikulum (SK), yakni prakerin/PKL 6 bulan, dan pelaksanaan 3 ujian akhir sementara pada saat yang sama di SK terdapat beban pembelajaran @ 31 jp/minggu dan @ 33 jp/minggu. Akibatnya terjadi pemajuan pembelajaran hingga menumpuk di semester ganjil menjadi 53 jp/minggu, dan di semester genap menjadi 55 jp/minggu. Ke tiga, jumlah siswa yang melaksanakan praktik per rombel sangat besar, menyulitkan GMP sendirian membimbing praktik dengan memberi perhatian dan kesempatan sama per siswa dan bebas kecelakaan. Pada situasi kekurangan GMP sekolah cenderung memaksimalkan jumlah siswa per rombel, mendekati atau mencapai 36 siswa, untuk meminimalkan jumlah rombel paralel.

Beban kerja GMP karena pekerjaan administratif adalah sebagai berikut. Pertama, tugas-tugas tambahan berupa “proyek” (*block grant*) dari Dit. PSMK yang praktiknya menjadi tugas tambahan GMP sebagai pimpro, sekretaris, bendahara, dan anggota tim. Ini terjadi karena guru-guru mapel non-produktif menganggap bahwa pekerjaan itu bukan merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Niat baik Dit. PSMK meningkatkan kualitas pembelajaran di atas pengorbanan GMP dengan beban kerja administratif yang seharusnya bukan beban mereka. Ke dua, kekurangan GMP yang akut cenderung menjadikan tugas-tugas melekat dari PPDB sampai ujian akhir tidak dihitung sebagai jam kerja. Tugas-tugas ini misalnya wali kelas dan kaprodi, serta panitia/penguji untuk ke-3 ujian/asesmen akhir dan panitia PPDB tidak dihitung sebagai jam kerja.

Opsi kebijakan #3.1. Upaya tingkat sekolah sampai direktorat untuk mendukung pemenuhan kekurangan GMP dengan berbagai metode

- a. **Manajemen setiap SMK Pariwisata harus proaktif menggalang koordinasi** dengan asosiasi pelaku industri dan asosiasi profesi, di luar individu perusahaan yang menjadi institusi pasangan (IP) sekolah, juga alumni yang sudah sukses bekerja, dalam rangka **memperoleh guru tamu dan membuka kelas alumni**. Upaya ini dapat melalui 3 pola, yakni masing-masing sekolah berusaha sendiri, secara berkelompok di bawah koordinasi Asosiasi SMK Pariwisata se Indonesia, atau secara berkelompok melalui Dinas Pendidikan Provinsi.
- b. **Dinas Pendidikan Provinsi** (Disdikprov) sebagai pengelola tertinggi pendidikan SMK di provinsinya, sudah sewajarnya **meningkatkan status dan memerankan instansinya dari sekedar pengelola**

administratif menjadi pembina kualitas penyelenggaraan SMK Pariwisata di provinsi. Untuk itu perlu disadari bahwa SMK Pariwisata itu ada a.l. adalah untuk (i) meningkat-kan harkat dan martabat sebagian penduduk provinsinya menjadi pekerja terdidik, dan (ii) menyiapkan SDM Pariwisata yang akan bekerja pada sektor pariwisata yang akan mendukung perekonomian provinsinya.

Dalam konteks kekurangan akut GMP di SMK Pariwisata, Disdikprov setidaknya harus memerankan 2 tindakan pembinaan kualitas berikut.

- Pertama, Disdikprov **harus mengkhususkan formasi guru baru untuk GMP SMK Pariwisata, bukan guru mapel normatif dan adaptif.** Ditengarai ada provinsi yang disdiknya selama 3 tahun berturut-turut hanya merekrut guru mapel nonproduktif untuk SMK Pariwisata, padahal SMK Pariwisata di provinsi itu juga sudah kelebihan guru mapel normatif dan adaptif, dan kasus GMP KK Kuliner yang harus mengajar sampai 15 jam pelajaran per hari itu juga ditemukan di provinsi tersebut.
 - Ke dua, Disdikprov melalui Bidang PSMK perlu menghubungkan seluruh SMK pariwisata dengan dengan BPD-BPD asosiasi industri dan asosiasi profesi di sektor pariwisata yang ada di provinsinya, selaku wakil dari calon pemakai lulusan, dalam rangka peningkatan pengadaan Guru Tamu, tidak hanya untuk KK Perhotelan dan KK Kuliner dari IHGMA dan ICA, namun untuk seluruh KK yang ada dari seluruh BPD asosiasi yang trelavn dengan masing-masing KK.
- c. **Ditjen GTK segera melaksanakan dua hal berikut.**
- Melaksanakan *retraining* guru guru-guru mapel adaptif yang berlebihan jumlahnya untuk mengisi kekurangan GMP SMK Pariwisata melalui PK Ganda yang telah disempurnakan disainnya secara menyeluruh. Penyempurnaannya adalah pada syarat peserta dan penyelenggaraan yang menitikberatkan kemampuan membimbing *skills* praktik siswa.
 - Menyelenggarakan kembali kerjasama dengan Kemenpar beserta Poltekpar dan STP untuk membuka kembali program khusus pengadaan GMP SMK Pariwisata bekerjasama dengan fakultas kependidikan berkompeten dalam menyiapkan bekal pedagoginya. Dalam rangka pembinaan karakter kerja, karena pembinaan karakter kerja pada pendidikan 4 tahun di prguruan tinggi belum memadai, maka peserta program calon guru ini diusulkan berasal dari lulusan SMK Pariwisata terbaik per provinsi.

- d. **Direktorat PSMK** agar tidak memberikan *block grant* apapun kepada individu sekolah, termasuk *block grant* peningkatan kualitas SMK Pariwisata, karena ini merupakan **tambahan beban kerja yang benar-benar di luar tugas GMP, guru lainnya, dan kepala sekolah (KS)**. Tugas guru dan KS adalah mendidik, bukan mengerjakan tugas-tugas administrasi proyek. Penyerahan *block grant* ke individu sekolah memang memudahkan pekerjaan administrasi di pusat, dengan satu surat perjanjian pekerjaan dan tanggungjawab administrasi berpindah dari Dit. PSMK ke individu SMK, namun ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas SMK.

Untuk itu diusulkan agar pemberian *block grant* tidak lagi diberikan kepada individu SMK Pariwisata⁹⁷.

- *Block grant* perwajahan dan rehabilitasi SMK, misalnya, dapat dialihkan ke Kementerian PUPR, sebagaimana dialihkannya pembangunan UKB dan USB serta rehabilitasi gedung di SMP dan SMA, yang menempatkan pekerjaan kepada ahlinya, sehingga mengurangi beban kepala sekolah laksana pimpro bangunan atau bahkan kontraktor ketika proyek tersebut dilaksanakan secara swakelola s.d. 2 tahun yang lalu.
- *Block grant* peningkatan kualitas guru, sebagai contoh lain, perlu diserahkan ke P4TK, agar dengan kreativitasnya bekerja sama dengan LPMP di 34 provinsi, sebagai sesama UPT pusat.

Opsi kebijakan #3.2. Penyantuman segala kegiatan pembelajaran dalam struktur kurikulum dan tidak memberikan beban pembelajaran saat siswa mengikuti 3 ujian atau assesmen akhir

Ditjen Pendidikan Vokasi bersama Balitbang secara terus terang menyantumkan semua kegiatan pembelajaran pada Struktur Kurikulum, termasuk PKL dan pelaksanaan semua ujian-ujian akhir, agar (i) beban pembelajaran yang sangat banyak disadari oleh penyusun struktur sendiri, sehingga (ii) menjadikan sangat besarnya beban kerja GMP dapat disadari dan dikurangi. Selain itu juga perlu meniadakan beban pembelajaran bagi siswa selama mereka mengikuti 3 ujian akhir. Bukannya memberikan beban pembelajaran tertinggi pada Semester 6 (dan Semester 5) yang sebanyak 33 jp/minggu dibanding 31 jp/minggu pada Semester 3 dan 4 serta 22 jp/minggu pada Semester 1 dan 2.

⁹⁷ Tidak berarti bahwa SMK Pariwisata merupakan kasus khusus. SMK Pariwisata dicantumkan di sini sekedar karena lingkup kajian adalah SMK Pariwisata.

Opsi kebijakan #3.3. Melegalkan sistem *team-teaching* untuk GMP ketika membimbing siswa melaksanakan praktik dasar

- Kemdikbud melalui Sistem Dapodik-nya **melegalkan kembali Sistem *Team Teaching* khusus untuk GMP SMK Pariwisata dalam membimbing siswa melaksanakan praktik** di tengah besarnya jumlah siswa per rombongan (pengelola Dapodik mengetahui data ini) dan resiko kecelakaan dalam praktik yang menggunakan mesin.
- **Mengubah pendekatan pengontrolan dengan mengasumsikan semua GMP menggunakan kesempatan dalam kesempatan dengan memanfaatkan peluang agar bekerja secara ringan** hendaknya diubah dengan memberi kepercayaan kepada guru dengan sistem insentif dan disinsentif yang berdampak terhadap tunjangan profesi.

4. Pembiayaan praktik dasar di sekolah

Kata kunci dari penentuan pilihan kebijakan adalah **kemampuan memenuhi kebutuhan dana bagi penyelenggaraan praktik dasar** di SMK. Berkenaan dengan itu pilihan kebijakan yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hanya mengandalkan dana BOS saja, atau mengupayakan adanya kontribusi yang syah dari berbagai sumber.

Opsi kebijakan #4.1. Penggalangan dukungan pemprov bersama orang tua dalam penyelenggaraan praktik dasar di SMK Pariwisata

- a. **Ditjen Pendidikan Vokasi**, sendirian atau bersama Kemenko Perekonomian, hendaknya mendekati dan meyakinkan Pemprov yang secara finansial menunjukkan kemampuan dan komitmen terhadap pendidikan untuk menyinergikan langkah dengan Pemerintah (pusat) bagi pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber devisa di luar SDA melalui SMK Pariwisata. Masih terdapat 6 pemprov dalam klasifikasi ini yang belum memberikan kontribusi finansial terhadap penyelenggaraan SMK Pariwisata.

Sebagai contoh **praktik baik** ditunjukkan oleh **Pemprov DI Yogyakarta** yang memberikan kontribusi pembiayaan operasional sekolah yang 180% lebih tinggi dibanding dengan BOS (pusat). Dengan dukungan pemda ini, setiap SMK Pariwisata di DI Yogyakarta beroperasi dengan dana Rp 4,2 juta/siswa/tahun pada tahun 2019.

Sebagai contoh **praktik yang perlu disempurnakan** ditunjukkan oleh Pemprov Kaltim, dengan “strategi pemberian kail bukan ikan”, telah membangunkan masing-masing 1 hotel pendidikan (*edotel*) di SMK-SMK Pariwisata negeri. Pada awalnya, Pemprov merelakan pendapatan *edotel* untuk digunakan bagi tambahan pembiayaan operasional di sekolah, termasuk pembiayaan praktik dasar di sekolah. Namun, belakangan ini penghasilan *edotel* tersebut belakangan ini ditarik oleh Pemprov Kaltim, sehingga **dukungan finansialnya untuk pembiayaan praktik dasar di sekolah tidak ada lagi**. Padahal pemprov juga tidak memberikan dukungan tahunan pembiayaan operasional semisal BOSDa, ke SMK Pariwisata. Artinya **justru Pemprov-lah yang menikmati penghasilan edotel di SMK Pariwisata**. Semua pembiayaan operasional sekolah dibayar oleh Pemerintah (pusat) melalui BOS.

- b. **Dinas Pendidikan Provinsi** (Disdikprov) sebagai pengelola tertinggi pendidikan SMK di provinsinya, sudah sewajarnya **meningkatkan status dan memerankan instansinya dari sekedar pengelola administratif menjadi pembina kualitas penyelenggaraan SMK Pariwisata di provinsi**. Untuk itu perlu disadari bahwa SMK Pariwisata itu ada a.l. adalah untuk (i) meningkat-kan harkat dan martabat sebagian penduduk provinsinya menjadi pekerja terdidik, dan (ii) menyiapkan SDM yang akan bekerja pada sektor pariwisata yang akan mendukung perekonomian provinsinya.

Dalam konteks kekurangan akut biaya operasional penyelenggaraan praktik dasar di SMK Pariwisata, **Disdikprov pada provinsi yang tidak mampu memberi dukungan dana praktik dasar** di luar yang diterima sekolah dari BOS, hendaknya diusulkan untuk melakukan upaya-upaya berikut.

- Memimpin penggalangan dana pendukung pembiayaan operasional SMK pariwisata dari seluruh pelaku industri dan filantroph di provinsinya.
- Mengadaptasi cara Pemprov DKI Jakarta membangun fasilitas umum yang tidak terbiayai oleh APBD, yaitu memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk membangun jembatan penyeberangan sebagai kompensasi atas pelanggaran syarat-syarat tertentu sepanjang tidak membahayakan atau merugikan rakyat.
- Khusus untuk provinsi yang tidak mengadopsi “wajib belajar pendidikan menengah” atau “pendidikan menengah gratis”, Disdikprov seharusnya melakukan dua hal berikut. Pertama, mengumumkan bahwa **sumbangan orang tua ke sekolah tidak boleh dianggap pungli** karena dilegalkan oleh UU Sistem

Pendidikan Nasional, bahkan orang tua merupakan salah satu pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anaknya sendiri. Penggalangan dukungan dari orang tua merupakan upaya sekolah yang syah menurut UU Sisdiknas dan bahkan sudah dioperasionalkan dengan peraturan pemerintah. Lebih baik lagi apabila diterbitkan peraturan daerah (perda)-nya. Ke dua, menyampaikan kepada Kejati Provinsi, Tim Saber Pungli, Ombudsman, dan persatuan wartawan tentang hal tersebut agar para pihak ini dapat menyikapi kemungkinan laporan dari masyarakat sesuai UU Sisdiknas.

Mengingat berbagai pengalaman buruk di masa lalu, pelibatan orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya di sekolah perlu dilakukan dengan empat strategi yang tepat berikut. Pertama, dari awal, ketika PPDB, orang tua sudah diberi tahu secara terbuka dan terus terang bahwa BOS dari Pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai praktik harian siswa di sekolah yang setiap kali memerlukan bahan praktik yang habis sekali pakai, juga ketika ditambah dengan bantuan Pemprov, apalagi kalau tidak ada. Untuk memberikan pengalaman praktik yang memadai orang tua diminta ikhlas untuk berkontribusi. Lebih baik lagi apabila keikhlasan itu dikuatkan oleh pernyataan keikhlasan tertulis dalam form yang sudah disiapkan sekolah.

Ke dua, sedapat mungkin dihindari permintaan peranserta orang tua untuk praktik harian anaknya dalam bentuk uang, namun dalam bentuk barang. Sebagai contoh untuk praktik mengukir buah (*food carving*), secara berkelompok siswa diminta membeli sendiri buah yang akan diukir, misalnya semangka.

Ke tiga, hasil praktik diunggah ke laman sekolah setiap minggu, difoto siswa untuk ditunjukkan ke orang tuanya, atau mengirim foto hasil praktik siswa menggunakan aplikasi pengiriman foto, misalnya *WhatsApp*. Apabila hasil praktiknya adalah produk makanan, selain di foto, sejauh mungkin diusahakan agar dibawa pulang ke rumah oleh masing-masing siswa, agar orang tua bangga dengan kemampuan anaknya.

Ke empat, apabila pembelajaran praktik memerlukan uang, misalnya praktik *table manner* yang dilakukan di hotel, harus dihindarkan pengumpulan uang kepada guru. Uang harus dikelola siswa sendiri, misalnya ketua kelas dan wakilnya, dan selanjutnya diserahkan ke hotel juga oleh mereka, dan kuitansi juga diserahkan oleh hotel

langsung ke mereka dan mereka simpan. GMP hanya menyaksikan saja.

Opsi kebijakan #4.3. Pengubahan pola pikir pengelola SMK Pariwisata di tingkat provinsi dan individu sekolah terkait perlunya penggalangan dukungan bagi pelaksanaan pendidikan pariwisata dari luar Pemerintah

Industri pariwisata merupakan pihak yang diuntungkan dengan penyiapan SDM Pariwisata level operator, yang jumlahnya justru terbesar, melalui SMK Pariwisata. Sudah selayaknya industri pariwisata berkontribusi bagi penyiapan SDM melalui SMK Pariwisata, termasuk pelaksanaan praktik dasar di sekolah yang sangat memerlukan dukungan berbagai pihak dan menentukan kompetensi calon SDM pariwisata.

Peluang pemberian dukungan telah dibuka, baik oleh Pemerintah melalui Kemenkeu maupun oleh sebagian pelaku industri pariwisata. Dukungan bagi penyelenggaraan praktik dasar tersebut sebenarnya dapat diberikan. Dukungan pelaku industri pariwisata, dicontohkan oleh **BPP ASITA Sulawesi Utara** telah menawarkan pemanfaatan peralatan kerja di kantornya untuk digunakan sebagai tempat praktik dasar bagi siswa KK Usaha Perjalanan Wisata. **Kemenkeu** telah menyediakan insentif bagi individu industri yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, termasuk pendidikan dan pelatihan oleh SMK Pariwisata. Insentif tersebut adalah pemberian pemotongan pajak sampai sebesar 200 persen dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai berbagai komponen pendidikan dan pelatihan tersebut.

Upaya yang perlu dilakukan oleh Kemdikbud adalah **mengubah pola pikir (*mind set*) manajemen SMK Pariwisata di tingkat bidang pada dinas pendidikan provinsi dan di tingkat individu sekolah** untuk tidak hanya mengharapkan dukungan dari Pemerintah. Kedua tingkatan manajemen ini harus berusaha aktif untuk menggali dukungan dari berbagai pemangku kepentingan penyiapan SDM pariwisata. Indikator bagi masih digunakannya pola lama ini dicontohkan oleh dua fakta. Pertama, tidak disambutnya tawaran BPP ASITA tersebut oleh sekolah. Ke dua, pertemuan penyiapan kerjasama SMK Pariwisata dengan pelaku industri pariwisata di salah satu provinsi yang masih dalam status sedang dipersiapkan sampai dengan satu tahun rencana pertemuan tersebut diusulkan. Pengelola SMK di provinsi ini nampaknya tidak nyambung dengan rencana Pemerintah membangun sektor pariwisata dengan menetapkan provinsi ini sebagai salah satu wilayah super-prioritas pembangunan pariwisata nasional.

Opsi kebijakan #4.2. Pengubahan manajemen SMK Pariwisata menjadi Badan Layanan Usaha Daerah

Pengusahaan dana dari berbagai pihak yang dapat dikelola oleh sekolah sendiri melalui penerapan pola BLUD bagi SMK Pariwisata. Menggunakan pola BLUD, sebagai badan layanan umum, sekolah dapat mengelola sendiri penerimaan dananya untuk keperluan sekolah. Dengan catatan bahwa setelah masa transisi (masa tenggang, *grace period*) dari pola reguler ke pola BLUD selama 3 tahun terlampaui, sekolah diharapkan memenuhi keperluan pembiayaannya dari penghasilan sendiri. Agar tidak selalu memulai segala sesuatu dari nol, pemprov lain dapat mempelajari penyiapan dan pelaksanaan BLUD SMK di Jawa Timur yang dirintis di 21 SMK.

SMK Pariwisata yang tidak berstatus BLUD, membiayai praktik dasar siswanya menggunakan biaya BOS dengan dua kemungkinan sebagaimana yang diuraikan pada opsi sebelumnya.

5. Pemberdayaan kurikulum

Pada pembahasan tentang beban kerja guru di depan, terdapat analisis terhadap pengaruh faktor kurikulum terhadap beban kerja guru dan pelaksanaan pembelajaran praktik dasar di sekolah. Kurikulum yang berlaku mempunyai, setidaknya 3 kelemahan utama, yakni ketinggalan terhadap kemajuan sektor pariwisata, penanaman nilai yang kurang mengadopsi prinsip-prinsip penanaman nilai dan terkotak-kotak, tidak dicantumkannya pelaksanaan peningkatan kompetensi lanjut di industri waktu siswa PKL dan dijadwalkannya pembelajaran penuh pada Semester 6 ketika siswa mengikuti 3 ujian atau asesmen akhir, serta tidak ditetapkannya alokasi waktu pembelajaran praktik. Untuk itu diajukan opsi-opsi kebijakan berikut.

Opsi kebijakan #5.1. Penetapan materi dan strategi pembelajaran yang mengacu ke kompetensi masa depan

Pemberdayaan kurikulum difokuskan pada struktur, materi dan strategi penyampaiannya. Pemberdayaan ditujukan agar kurikulum memang menjadi pedoman pembelajaran yang layak (*feasible*) untuk dilaksanakan dan secara sadar ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten. Dengan terbentuknya lulusan yang berkompeten, maka tingkat kebekerjaan lulusan akan semakin tinggi dan tingkat pengangguran menurun. Namun demikian, kurikulum SMK Pariwisata juga harus diarahkan untuk memenuhi kompetensi untuk masa depan.

Dari aspek materi dan strategi, pembelajaran yang bersifat **penanaman nilai-nilai** perlu berangkat dari prinsip penanaman nilai sampai terinternalisasi, yakni disampaikan, dicontohkan, dilaksanakan dengan disiplin, dan dibiasakan. Dengan ini maka pembelajaran justru tidak dipadati dengan penyajian materi di kelas, melainkan diarusutamakan (*mainstream*) sebagai kegiatan-kegiatan di sekolah. Sebagian besar kegiatan ceramah di kelas harus diganti dengan praktik-praktik yang mengarah ke internalisasi nilai-nilai keagamaan, yakni pencontohan, penerapan, pelaksanaan dengan disiplin, dan pembiasaan.

- Penyampaian materi, serta pemberian contoh, pelaksanaan, dan pembiasaan penerapan **nilai-nilai keagamaan** Islam, misalnya, juga dilaksanakan melalui kultum harian jelang sholat Dzuhur, khotbah ibadah mingguan sholat Jumat, serta peringatan tahunan 2 hari besar dan hari kelahiran Nabi, yang materi khutbah dan kultumnya disesuaikan dengan KI dan KD pada kurikulum yang berlaku dan ceramah di kelas disinkronkan dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kepengurusan dan kepanitiaan kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan siswa agar partisipasi aktif dan perasaan bertanggungjawabnya menjadi bagian dari penanaman nilai-nilai keagamaan. Di sisi lain, dengan penggunaan pendekatan pengarusutamaan penanaman nilai-nilai keagamaan, maka pemberian contoh, pelaksanaan, dan pembiasaan dilakukan oleh semua warga sekolah yang seiman. Hal ini juga berlaku untuk penanaman nilai-nilai agama lain.
- Penanaman **nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan**, melalui strategi pengarusutamaan, juga disinergikan dengan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi kegiatan OSIS, pemilihan pengurus kelas, serta kegiatan ekstrakurikuler, upacara bendera mingguan dan perayaan hari besar nasional, dan perilaku demokratis dalam pembelajaran, yang materi, serta pemberian contoh, pelaksanaan, dan pembiasaan penerapan nilai-nilainya dirancang sesuai KI dan KD PPKn pada kurikulum yang berlaku. Kepengurusan dan kepanitiaan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, upacara dan perayaan tersebut melibatkan siswa agar partisipasi aktif dan perasaan bertanggungjawabnya menjadi bagian dari penanaman nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan, termasuk keragaman dan toleransi.

Pembelajaran bahasa -- termasuk Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya -- diarahkan ke penguasaan kompetensi komunikasi dan penguatan kemampuan berfikir tinggi (mencipta karya, mengevaluasi, dan menganalisis) ditambah dengan penanaman sikap dalam berkomunikasi (tidak hanya menyampaikan tetapi juga menyimak pendapat), keingintahuan, inisiatif, ketabahan melalui debat lisan dan tertulis, kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini, juga

komponen literasi yang lebih luas, termasuk sains dan keuangan. Untuk itu metode ceramah yang kenyataannya masih mendominasi, diubah menjadi metode pembelajaran yang juga berorientasi ke penanaman sikap, termasuk misalnya pendekatan *integrated learning* dan *project based learning*, termasuk melalui penugasan-penugasan, misalnya pengamatan, telaah kasus dan “proyek” secara mandiri oleh kelompok siswa.

Pembelajaran matematika diarahkan pada penguatan keterampilan berfikir tingkat tinggi, a.l. meliputi kemampuan berpikir kritis, analitis dan memecahkan masalah, juga penguatan nilai-nilai kreativitas, inisiatif, orijinalitas. Untuk itu pembelajarn berbasis soal-jawab di kelas, perlu ditambah dalam porsi yang lebih luas dengan pembelajaran luar-kelas yang memberi peluang kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan dan nilai-nilai tersebut. Selain itu juga perlu diintegrasikan mapel matematika pada dua kelompok mapel, yakni Kelompok A dan Kelompok B.

Opsi kebijakan #5.2. Penyantunan semua kegiatan terkait pengembangan kompetensi siswa dalam struktur kurikulum

Kegiatan-kegiatan PKL dan ujian-ujian akhir yang selama ini disembunyikan harus dimunculkan dalam struktur kurikulum sehingga menjadi struktur kurikulum yang layak dilaksanakan di sekolah oleh para guru. Dengan itu penyusun kurikulum tersadar akan berlebihannya beban belajar di SMK Pariwisata. Salah satu dampak positif kesadaran itu, termasuk yang diusulkan pada pemberdayaan kurikulum melalui penganekaragaman strategi pencapaian kompetensi melalui upaya-upaya pengarusutamaan (*mainstreaming*) penanaman nilai-nilai keagamaan serta Pancasila dan kewarganegaraan, serta peningkatan kompetensi berbahasa dan bermatematika, adalah **ketersediaan secara signifikan jam pelajaran berbasis ruang kelas yang akan menampung penggeseran waktu praktik dasar ke semester-semester sebelum siswa mengikuti pembelajaran praktik lanjutan melalui PKL dan pemberian kesempatan siswa untuk tidak mengikuti 3 ujian akhir sambil mengikuti pembelajaran 10 mapel selama 33 jp per minggu selama 6 bulan pada Semester 6.**

Opsi kebijakan #5.3. Penetapan alokasi waktu pelaksanaan praktik secara terbakukan

Penyerahan alokasi waktu pembelajaran praktik kepada guru, dan tidak diatur secara terbakukan, menyebabkan sangat beragamnya waktu praktik kejuruan yang dilaksanakan oleh siswa yang berdampak hebat dalam

upaya membentuk kompetensi siswa yang setidaknya sesuai KKNi Level 2. Beragamnya alokasi waktu praktik di sekolah berdampak pada rendahnya kompetensi yang dikuasai melalui praktik dasar di sekolah sampai dibawah kompetensi minimal yang disyaratkan untuk mengikuti praktik lanjutan di dunia kerja. Tidak tercapainya kompetensi minimal untuk mengikuti praktik lanjutan ini berdampak pada ketidakmaksimalan peningkatan kompetensi melalui praktik lanjutan melalui PKL. Dampak akhirnya adalah rendahnya kompetensi lulusan yang bertengger di bawah Level 2 dan ini bersama faktor-faktor lain mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran.

Apabila alokasi waktu praktik ditetapkan secara terbakukan, yang dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan untuk mencapai kompetensi kerja tertentu, maka kebutuhan akan peralatan dan mesin praktik serta biaya operasional praktik per siswa dapat ditentukan. Berdasarkan itu, logika penyediaan anggaran dapat disusun dan bila anggaran memang tidak mencukupi, maka tekanan kenaikan enrolmen yang terlalu tinggi dapat dikurangi, juga tidak bermimpi untuk mencapai Level 3 KKNi tanpa kecukupan sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang no. 37 th. 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah no. 48 th. 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah no. 11 th. 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah no. 49 th. 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Inpres no. 9 th. 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan
- Perpres no. 2 th. 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019
- Perpres no. 87 th. 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Perpres no. 18 th. 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Lampiran II.
- Keppres no. 8 th. 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Permendagri no. 61 th. 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
- Permendiknas no. 69 th. 2009 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan
- Permendikbud no. 14 th. 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP
- Permendikbud no. 16 th. 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja P4TK
- Permendikbud no. 75 th. 2016 tentang Komite Sekolah
- Permendikbud no. 17 th. 2017 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK atau yang sederajat.
- Permendikbud no. 15 th. 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru
- Permenristek no. 26 th. 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- SK Kemenhub no. 303/DL.005/PHB-81 tgl. 18 Desember 1981 tentang Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata.
- Surat Keputusan Dirjen Belmawa no. 23/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau
- Peraturan BKN no. 1 th. 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

- Peraturan Dirjen Dikdasmen no. 07/D.D5/KK/2018 th. 2018 tgl. 7 Juni 2018 tentang Struktur Kurikulum SMK dan MAK
- Lampiran Peraturan Dirjen Dikdasmen no. 464/D.D5/KR/2018 th. 2018 tgl. 30 Agustus 2018 tentang KI dan KD Mata Pelajaran Muatan Nasional (A), Muatan Kewilayahan (B), Dasar Bid. Keahlian (C1), Dasar Program Keahlian (C2), dan Kompetensi Keahlian (C3).
- Peraturan Gubernur Jawa Timur no. 98 th. 2018 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Acemoglu, D (2011). *Labor Economics, 14.661. Lectures 9 and 10: Investments in General and Specific Skills*. MIT. Nov. 29 and Dec 1.
- Bakrun (2018). *Penyusunan Silabus*. Bahan Pelatihan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan.
- Bappenas, Kedepatian Ekonomi (2019). *Peningkatan Daya Saing Pariwisata*. Disampaikan dalam Pra-Musrenbangnas, Jakarta, 16-24 April.
- BPS (2018). *Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara*. Data dinamis.
- Ditjen GTK (2017a). *Penataan, Pemerataan, dan Pemenuhan Guru Pendidikan Menengah*. Bahan paparan Dit. Pembinaan Guru Pendidikan Menengah.
- (2017b). *Penataan, Pemerataan, dan Pemenuhan Guru Pendidikan Menengah*. Paparan disusun oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah.
- (2017c). *Pedoman Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik Bagi Guru SMK/SMA (Keahlian Ganda) Angkatan 2*. (Paparan PowerPoint)
- Dit. PSMK (2018). *Implementasi Kurikulum 2013 SMK: Materi Penyusunan Silabus SMK*. Jakarta: Dit. PSMK.
- Delke, V. (2015). *The Resource Dependence Theory: Assessment and Evaluation as a Contributing Theory for Supply Management*. Bachelor degree thesis. University of Twente, the Netherland.
- Fattah, N (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Flick, Uwe (2014). *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. Los Angeles: SAGE.
- Ghozali, A (2012). Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Kebutuhan Dana untuk Pendidikan Dasar Gratis. *Cakrawala Pendidikan*. Februari 2012, th. XXXI, no. 1.

- Loewenstein, M, & Speltzer, J (1999). General and Specific Training: Evidence and Implications. *The Journal of Human Resources*, 34 (4), 710-733. Doi: 10.2307/146414
- Majid, MA (2019). *Panduan Tata Kelola BLUD SMK Berbasis Good School Governance*. Jakarta: Dit. PSMK.
- Miles, Matthew, B & Huberman, Michael A (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Second Ed.* Thousand Oaks, CA: Sage publications.
- Panda, B & Leepsa, M (2017). Agency Theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives dalam *Indian Journal of Corporate Governance*, Vol. 10 Issue 1, 2017.
- Prats, J & Agules R (2013). Three Competencies Every Entrepreneur Should Develop. Diunggah tahun 2013 dalam <https://www.ideasforleaders.com/ideas/three-competencies-every-entrepreneur-should-develop>. Diunduh 29 Juni 2019
- Purwadi, A (1985). *Vocational and Technical Education Planning in Central Java Province: the Case of Art and Craft School*. Thesis program master pada Social Engineering Dept., Tokyo Institute Technology, Tokyo, Japan.
- (2019a). *Pengembangan Model Kerjasama SMK dengan K/L, Pemda, serta Dunia Kerja dan Industri: Kasus SMK Bidang Keahlian Kemaritiman*. Jakarta: Puslitjakdikbud.
- (2019b). *Paparan FGD Pengelolaan Pendidikan Vokasi yang Bermutu pada SMK Bidang Keahlian Kepariwisata di Manado*, 2019
- (2019c). *Paparan FGD Pengelolaan Pendidikan Vokasi yang Bermutu pada SMK Bidang Keahlian Kepariwisata di Samarinda*, 2019
- (2019d). *Paparan FGD Pengelolaan Pendidikan Vokasi yang Bermutu pada SMK Bidang Keahlian Kepariwisata di Yogyakarta*, 2019
- (2019e). *Paparan FGD Pengelolaan Pendidikan Vokasi yang Bermutu pada SMK Bidang Keahlian Kepariwisata di Medan*, 2019.
- Rossignoli, C., ed. (2015). Agency Theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives dalam *Indian Journal of Corporate Governance*, Vol. 10 Issue 1, 2017.
- Setiawan, Y (2016). *Penyusunan Pola Tata Kelola BLUD SMK*. Jakarta: Dit. PSMK.
- Supriadi, D., ed (2002). *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia: Membangun Manusia Produktif*. Jakarta: Depdiknas.

- Usep (2017). “Pengelolaan Magang Guru Produktif SMK Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor berbasis Kemitraan” dalam *Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. XXIV, no. 1 April 2017*.
- WEF (2017). *Travel and Tourism Competitiveness Report 2017*. Geneve: World Economic Forum.
- Williamson, OE. (2007). Transaction Cost Economics: An Introduction. Dalam Jurnal *Economic Discussion Paper 2007-3*, 1 Maret.

Sumber internet

- Asistensi BLUD. Dalam <http://www.bpkp.go.id/dan/konten/376/Asistensi-BLUD.bpkp> Diunduh
- BHI Hospitality School. www.bhi.ac.id diunduh 9 Agustus 2019
- Components and principles of quality assurance. Dalam <https://ismuni.lt/en/activities/quality-assurance>
- <http://setkab.go.id/januari-pemerintah-mulai-rekrut-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja/>
- <http://www.panorama-sentraxisata.com/panorama-group>
- <http://www.ypamdr-astr.com/m>
- <http://www.tanotofoundation.org/id/tentang-kami/sejarah-dan-tonggak-capaian.html>.
- <https://merahputih.com/post/read/presiden-jokowi-paparkan-tiga-tahapan-menuju-visi-indonesia-emas-2045> Diunggah 27 Maret 2017 Diunduh 1 Oktober 2018
- Jumlah Guru Produktif di SMK Meningkat. Dalam <https://edukasi.kompas.com/read/2018/05/03/07000081/jumlah-guru-produktif-di-smk-meningkat>. Diunduh 1 Agustus 2019
- Kemenperin mengelola 9 SMK, 9 poltek, dan 1 akademi komunitas. kemenperin.go.id/sekolah.
- m.ayobogor.com/read/2017/07/14/5480
- Mendikbud: Tidak Semua Pungutan Sekolah disebut Pungli, Ada yang Resmi. <https://www.merdeka.com/peristiwa/mendikbud-tidak-semua-pungutan-sekolah-disebut-pungli-ada-yang-resmi.html> diunggah 22 Februari 2019 01:04 diunduh 22 Juli 2019
- Pariwisata Diproyeksikan jadi Penyumbang Devisa Terbesar. <https://www.antaraneews.com/berita011145300/> pariwisata-

diprojeksikan-jadi-penyumbang-devisa-terbesar Diunggah 15 Oktober 2019, diunduh 16 Oktober 2019.

Prats, J dan Agules R (2013). *Three Competencies Every Entrepreneur Should Develop*. Diunggah tahun 2013 dalam <https://www.ideasforleaders.com/ideas/three-competencies-every-entrepreneur-should-develop>. Diunduh 29 Juni 2019

Presiden Jokowi Luncurkan Visi Indonesia 2045. <https://www.merdeka.com/uang/presiden-jokowi-luncurkan-visi-indonesia-2045.html> Diunggah 9 Mei 2019, diunduh 10 Mei 2019.

Presiden Jokowi Paparkan Tiga Tahapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045
Qualitative Data Analysis and Methods.
<http://www.intellspot.com/qualitative-data-analysis-methods/> Diunduh 10 September 2018

Quality control, Quality assurance, systems and application.
<https://www.academia.edu>

Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali.
www.campus.quipper.com/sekolah-tinggi diunduh 9 Agustus 2019

Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta. www.stpsahidsolo.ac.id diunduh 9 Agustus 2019

Team Teaching Tidak Diperbolehkan.
http://datadapodik.com/kontenweb/modul/download_dapodik.php?id_berita=142 Diunduh 29 September 2019

Top 7 Personal Competencies of an Entrepreneur.
<https://www.paggu.com/entrepreneurship/top-7-personal-competencies-of-an-entrepreneur/> Diunduh 29 Juni 2019.

What is Quality Assurance. <http://www.Project-management-skills.com>
mengutip definisi dari American Society for Quality (ASQ).

What is Quality Assurance? Process, Methods, Examples.
<http://www.guru99.com>



**Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020**

ISBN 978-602-0792-72-9

